KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT

2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI JAWA BARAT

Gedung Dwi Warna Jalan Diponegoro 39 Bandung
Telepon : (022) 7207046,7207049 Faksimili : (022) 7207048
Website : http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar

NOTA DINAS

ND-142/WPB.13/BG.0104/2019

Yth	:	Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
Dari	:	Plt. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu Buku
Hal	:	Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018
Tanggal	:	30 Januari 2019

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-77/PB.1/2019 tanggal 8 Januari 2019 hal Pelaporan Kinerja dan *Achievement* Tahun 2018 di Lingkungan DJPb, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Laporan dimaksud dalam bentuk softcopy telah kami sampaikan ke alamat email : subbag.pso@gmail.com

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Rizki Taviantto Karipany

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintah sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan penganggaran dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi, misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-24/MK.1/2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Wilayah Ditrektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan melaksanakan Visi Misi Unit organisasi yang mengacu pada Visi Misi Unit Organisasi dari unit organisasi dari level diatasnya yaitu Ditjen Perbendaharaan sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Kemenkeu Two Kanwil DJPB yang terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif yaitu : Perspektif *Stakeholder,* Perspektif *Customer,* Perspektif *Internal Process,* dan Perspektif *Learning and Growth.*

Sasaran-sasaran Strategis tersebut dirinci lebih spesifik menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur oleh IKU. Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai, yang kesemuanya telah tertuang didalam Kontrak Kinerja. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 dan memenuhi Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-77/PB.1/2019 tanggal 8 Januari 2019 hal Pelaporan Kinerja dan *Achievement* Tahun 2018 di Lingkungan DJPb, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2018 sebagai gambaran pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Harapan kami LAKIN ini secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu secara internal dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada masa selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi dan misi keberadaannya akan semakin baik.

Bandung, 31 Januari 2019
Plh. Kepala Kantor Wilayah

Rizki Taviantto Karipany

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2007 merupakan tahun awal dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Keuangan Kementerian Keuangan bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih dan bertanggungjawab (*clean government*) serta birokrasi yang efektif sehingga menghasilkan pelayanan publik yang optimal (*good governance*). Agar kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dapat terarah diperlukan *guidance* sebagaimana tergambar dalam visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang selaras dan mampu mendukung visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menetapkan misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan.

Selanjutnya untuk mewujudkan misi di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selaku kantor vertikal di daerah yang membawahi 12 KPPN di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, mencanangkan tekad dan tujuan yang ingin dicapai yaitu "Menjalankan peran strategis dan mengembangkan potensi yang ada untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat".

Pada tahun 2018 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja baik di tingkat nasional maupun regional provinsi. Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Pencapaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

1. Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 91,28% dari target 80%.
2. Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil terealisasi sebesar 92,96 dari target 87.
3. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil terealisasi sebesar 97,39 dari target 93.
4. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil terealisasi sebesar 4,61 dari target 4,52.
5. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 99,68% dari target 98%.

6. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
7. Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervise Kanwil terealisasi sebesar 96,54 dari target 90.
8. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 88,14 dari target 85.
9. Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 90%.
10. Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 93,25 dari target 87.
11. Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar 96,54 dari target 70.
12. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 95,09% dari target 88%.
13. Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program terealisasi sebesar 100 dari target 75.
14. Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar 86,09 dari target 75.
15. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai Kanwil terealisasi sebesar 92 dari target 77.
16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 97,74 dari target 78.
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 95 dari target 81.
18. Persentase pemenuhan BMN sesuai standar terealisasi sebesar 120,72% dari target 91%.
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 101,72% dari target 95%.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target adalah N I H I L

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang N/A (*Not Availabel*) adalah N I H I L

Selain keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas, Selama tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga mempunyai prestasi antara lain:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 10 Desember 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik kedua penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja Tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018 (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-668/PB/2018 tanggal 27 Desember 2018).

3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat terbaik kedua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dalam menyusun Laporan

Keuangan Tingkat Wilayah (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-527/PB/2018tanggal 18 Oktober 2018).

4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh peringkat kesatu Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 (Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-676/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018).

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 diharapkan dapat dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan di tahun 2019. Sedangkan beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum optimal akan menjadi fokus perhatian sehingga kedepannya bisa mendapatkan prestasi tingkat pusat. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan keberhasilan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja setelah periode pelaksanaan Kontrak Kinerja Tahun 2018 berakhir. LAKIN ini disamping memuat rencana strategis dan rencana kerja tahunan, juga memuat realisasi, evaluasi hasil dan analisa atas pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

Hasil evaluasi dan analisis LAKIN ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyesuaian strategis dan penyusunan Kontrak Kinerja tahun berikutnya serta pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas pemerintahan bagi terciptanya *good governance*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
IKHTISAR EKSEKUTIF		III
DAFTAR ISI		VI
DAFTAR TABEL		VII
DAFTAR GAMBAR		XI
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	7
	D. Sistematika Laporan	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. Rencana Startegis	13
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	A. Capaian Kinerja Organisasi	26
	B. Realisasi Anggaran	90
	C. Kinerja Lainnya	94
BAB IV	PENUTUP	102

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Tahun 2018
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018
4. Lain-lain, meliputi:
   - Tabel Renstra 2015-2019
   - Matriks RPJMN 2015-2019 Bagian Anggaran 015.08
   - Kalender Kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
   - RKAKL Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat 2018

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	
Tabel.1.1	Jumlah SDM Kanwil DJPb Prov. Jabar tahun 2018	5
Tabel.1.2	Komposisi Pegawai bedasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel.1.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Usia	5
Tabel.1.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Kelompok Generasi	5
Tabel.1.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Kepangkatan	6
Tabel.1.6	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatn/Eselon	6
Tabel.1.7	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
Tabel.2.1	Target Kinerja antara Renstra 2015-2019 dan Kontrak Kinerja Tahun 2018	14
Tabel.2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
Tabel.3.1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2016 - 2018	26
Tabel.3.2	Nilai Kinerja Pespektif	26
Tabel.3.3	Capaian Kinerja dari SS, Perspektif IKU dan NKO	27
Tabel.3.1.1	Penjelasan Target IKU 1a-CP	29
Tabel.3.1.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 1a-CP	31
Tabel.3.1.3	Capaian Kinerja IKU 1a-CP tahun 2015-2018	31
Tabel 3.1.4	Perbandingan Capaian IKU 1a-CP Th.2015-2018 dan Renstra 2015-2019	32
Tabel.3.1.5	Perbandingan IKU 1a-CP, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	32
Tabel.3.2.1	Penjelasan Target IKU 1b-N	34
Tabel.3.2.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 1b-N	34
Tabel.3.2.3	Capaian Kinerja IKU 1b-N tahun 2015-2018	35
Tabel 3.2.4	Perbandingan Capaian IKU 1b-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	35
Tabel.3.3.1	Penjelasan Target IKU 1c-N	37
Tabel.3.3.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 1c-N	38
Tabel.3.3.3	Capaian Kinerja IKU 1c-N tahun 2015-2018	38
Tabel 3.3.4	Perbandingan Capaian IKU 1c-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	38

Tabel.3.3.5	Perbandingan IKU 1c-N, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	39
Tabel.3.4.1	Penjelasan Target IKU 2a-N	40
Tabel.3.4.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 2a-N	41
Tabel.3.4.3	Capaian Kinerja IKU 2a-N tahun 2015-2018	41
Tabel 3.4.4	Perbandingan Capaian IKU 2a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	41
Tabel.3.5.1	Penjelasan Target IKU 3a-CP	43
Tabel.3.5.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 3a-CP	44
Tabel.3.5.3	Capaian Kinerja IKU 3a-CP tahun 2015-2018	44
Tabel 3.5.4	Perbandingan Capaian IKU Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	44
Tabel.3.6.1	Penjelasan Target IKU 4a-N	45
Tabel.3.6.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 4a-N	46
Tabel.3.6.3	Capaian Kinerja IKU 4a-N tahun 2015-2018	46
Tabel 3.6.4	Perbandingan Capaian IKU 4a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	46
Tabel.3.7.1	Penjelasan Target IKU 5a-N	48
Tabel.3.7.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 5a-N	48
Tabel.3.7.3	Capaian Kinerja IKU 5a-N tahun 2015-2018	48
Tabel 3.7.4	Perbandingan Capaian IKU 5a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	49
Tabel.3.8.1	Penjelasan Target IKU 5b-N	50
Tabel.3.8.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 5b-N	50
Tabel.3.8.3	Capaian Kinerja IKU 5b-N tahun 2015-2018	51
Tabel 3.8.4	Perbandingan Capaian IKU 5b-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	51
Tabel.3.8.5	Perbandingan IKU 5b-N, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	51
Tabel.3.9.1	Penjelasan Target IKU 5c-N	53
Tabel.3.9.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 5c-N	54
Tabel.3.9.3	Capaian Kinerja IKU 5c-N tahun 2015-2018	54
Tabel 3.9.4	Perbandingan Capaian IKU 5c-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	54
Tabel.3.9.5	Perbandingan IKU 5c-N, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	55
Tabel.3.10.1	Penjelasan Target IKU 6a-N	57
Tabel.3.10.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 6a-N	57
Tabel.3.10.3	Capaian Kinerja IKU 6a-N tahun 2015-2018	57
Tabel 3.10.4	Perbandingan Capaian IKU 6a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	58
Tabel.3.10.5	Perbandingan IKU 6a-N, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	58
Tabel.3.11.1	Penjelasan Target IKU 6b-N	62

Tabel.3.11.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 6b-N	62
Tabel.3.11.3	Capaian Kinerja IKU 6b-N tahun 2015-2018	64
Tabel 3.11.4	Perbandingan Capaian IKU 6b-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	64
Tabel.3.12.1	Penjelasan Target IKU 7a-N	65
Tabel.3.12.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 7a-N	65
Tabel.3.12.3	Capaian Kinerja IKU 7a-N tahun 2015-2018	66
Tabel 3.12.4	Perbandingan Capaian IKU 7a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	66
Tabel.3.12.5	Perbandingan IKU 7a-N, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	66
Tabel.3.13.1	Penjelasan Target IKU 7b-N	69
Tabel.3.13.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 7b-N	69
Tabel.3.13.3	Capaian Kinerja IKU 7b-N tahun 2015-2018	69
Tabel 3.13.4	Perbandingan Capaian IKU 7b-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	70
Tabel.3.14.1	Penjelasan Target IKU 8a-N	72
Tabel.3.14.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 8a-N	73
Tabel.3.14.3	Capaian Kinerja IKU 8a-N tahun 2015-2018	73
Tabel 3.14.4	Perbandingan Capaian IKU 8a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	73
Tabel.3.15.1	Penjelasan Target IKU 9a-N	75
Tabel.3.15.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 9a-N	75
Tabel.3.15.3	Capaian Kinerja IKU 9a-N tahun 2015-2018	75
Tabel 3.15.4	Perbandingan Capaian IKU 9a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	76
Tabel.3.16.1	Penjelasan Target IKU 10a-N	77
Tabel.3.16.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 10a-N	78
Tabel.3.16.3	Capaian Kinerja IKU 10a-N tahun 2015-2018	78
Tabel 3.16.4	Perbandingan Capaian IKU 10a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	78
Tabel.3.17.1	Penjelasan Target IKU 10b-N	79
Tabel.3.17.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 10b-N	80
Tabel.3.17.3	Capaian Kinerja IKU 10b-N tahun 2015-2018	80
Tabel 3.17.4	Perbandingan Capaian IKU 10b-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	81
Tabel.3.18.1	Penjelasan Target IKU 11a-N	82
Tabel.3.18.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 11a-N	82
Tabel.3.18.3	Capaian Kinerja IKU 11a-N tahun 2015-2018	83
Tabel 3.18.4	Perbandingan Capaian IKU 11a-N Th.2015-2018 dengan Renstra 2015-2019	83
Tabel.3.18.5	Perbandingan IKU 11a-N, Renstra 2015-2019 dan RPJMN 2015-2019	84

Tabel.3.19.1	Penjelasan Target IKU 12a-CP	86
Tabel.3.19.2	Perbandingan Target dengan Realisasi IKU 12a-CP	86
Tabel.3.19.3	Capaian Kinerja IKU 12a-CP tahun 2015-2018	87
Tabel 3.19.4	Perbandingan Capaian IKU 12a-CP Th.2015-2018 dan Renstra 2015-2019	87
Tabel.3.4	Perbandingan pagu dan realisasi per jenis belanja tahun 2016-2018	91
Tabel.3.5	Perbandingan pagu dan realisasi per kegiatan output	92
Tabel.3.6	Obyek Penghematan/efisiensi	93
Tabel.3.7	Capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART 2016-2018	94

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	
Gambar.1.1	Gedung Dwi Warna Jl. Diponegoro No.59 Bandung	2
Gambar.1.2	Struktur Orgainsasi Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
Gambar.2.1	Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
Gambar.3.1	Inovasi EWS (Early Warning System)	94
Gambar.3.2	Inovasi Si Adon	95
Gambar.3.3	Inovasi Si Jakki	95
Gambar.3.4	Inovasi Si Pinter	96
Gambar.3.5	Inovasi SEMAR	96
Gambar.3.6	Inovasi URC	97
Gambar.3.7	Inovasi Silih Emutan	97
Gambar.3.8	Inovasi Taman Gratifikasi	98
Gambar.3.9	Piagam WBK dari KemenPANRP	100
Gambar.3.10	Peresmian Museum Perbendaharaan oleh Sesditjen, Kunjungan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Silaturahmi Para Pejabat Eselon I dengan Para Pegawai Kementerian Keuangan di Jawa Barat.	101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

C. Peran Strategis

D. Sistematika Laporan

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai *prinsip good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No.28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Gambar.1.1

LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018. LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada setiap bidang dan bagian di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Dan tujuan lain penyusunan LAKIN adalah sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendahaaan Provinsi Jawa Barat adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi :

a. penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan;
b. penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah;
c. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran;
d. pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran;
e. pembinaan teknis sistem akuntansi pemerintahan;
f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan;
h. pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
i. pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
j. pelaksanaan pengelolaan dana investasi dan pemberian pinjaman kepada daerah;
k. pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum;
l. pelaksanaan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja program pensiun;
m. verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
n. pelaksanaan kehumasan;
o. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

a. Bagian Umum;

b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;

c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;

d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 1.2

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu instansi vertikal unit eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki kondisi sumber daya manusia per tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel.1.1

Jumlah Sumber Daya Manusia							
Tahun	Kanwil	KPPN Bandung I	KPPN Bandung II	KPPN Sumedang	KPPN Garut	KPPN Tasikmalaya	KPPN Purwakarta
2016	125	52	41	25	28	41	28
2017	110	51	41	24	22	37	20
2018	106	46	36	24	19	35	22
	KPPN Karawang	KPPN Bekasi	KPPN Bogor	KPPN Sukabumi	KPPN Kuningan	KPPN Cirebon	TOTAL
2016	30	33	60	30	25	40	558
2017	29	31	51	27	20	36	499
2018	24	31	47	24	20	31	465

Tabel. 1.2

Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin		Jumlah
- L		51 orang
- P		55 orang
Jumlah		**106 orang**

Tabel.1.3

Statistik Pegawai Berdasarkan Usia		
Usia		Jumlah
- Usia 20 s.d. 29 (tahun)	:1 ^	1 orang
- Usia 30 s.d. 39 (tahun)	:3 ^ :4 ^	7 orang
- Usia 40 s.d. 49 (tahun)	:15 ^ :12 ^	27 orang
- Usia 50 s.d. 59 (tahun)	:32 ^ :39 ^	71 orang
Jumlah		**106 orang**

Tabel1.4

Statistik Pegawai Berdasarkan Kelompok Generasi		
Kelompok Generasi		Jumlah
- Baby Boomers (1945 - 1964)	55.6604%	59 orang
- Generation X (1965 - 1979)	36.7925%	39 orang
- Generation Y (1980 - 1994)	7.5472%	8 orang
- Gen Z (1995 ~)	0%	0 orang
Jumlah		**106 orang**

Tabel.1.5

Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Pangkat	Gol.	Jumlah
- Pengatur Tingkat I	II/d	7 orang
- Penata Muda	III/a	1 orang
- Penata Muda Tingkat I	III/b	54 orang
- Penata	III/c	3 orang
- Penata Tingkat I	III/d	27 orang
- Pembina	IV/a	10 orang
- Pembina Tingkat I	IV/b	4 orang
Jumlah		**106 orang**

Tabel.1.6

Statistik Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon		Jumlah
- III.A	:3 ^ :2 ^	5 orang
- IV.A	:16 ^	16 orang
- Pelaksana	:32 ^ :53 ^	85 orang
Jumlah		**106 orang**

Tabel.17

Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan		Jumlah
- Sekolah Menengah Atas	:25 ^ :30 ^	55 orang
- Diploma (Umum)	:1 ^	1 orang
- Diploma I (PKN STAN)	:1 ^	1 orang
- Diploma III (PKN STAN)	:4 ^ :2 ^	6 orang
- Strata I / Sarjana	:11 ^ :18 ^	29 orang
- Strata II / Magister	:10 ^ :4 ^	14 orang
Jumlah		**106 orang**

C. PERAN STRATEGIS

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola perbendaharaan negara di wilayah kerjanya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai pengelola perbendaharaan, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan termasuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.Jawa Barat diharapkan mampu menguasai bidang tugasnya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan (*hard skill*) serta integritas/moralitas (*soft skill*) yang memadai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga memudahkan sekaligus meningkatkan kualitas hasil kerja.

Seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepada publik/masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melaksanakan peran strategisnya sebagai berikut:

1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan akuntabel
2. Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga mengambil peran penting dalam mewujudkan Nawacita antara lain:

1. Sejalan dengan Nawacita ke 5, dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam upaya membina pengelolaan bantuan langsung ke masyarakat serta pembinaan layanan kredit usaha mikro (Umi).
2. Sejalan dengan Nawacita ke 3, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam mensukseskan program pembangunan kawasan perdesaan melalui pembinaan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik.

Seluruh fungsi dalam Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat senantiasa saling sinergi dan terintegrasi, baik antar bidang maupun dengan KPPN-KPPN di daerah. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan terhadap organisasi ke depan.

Dengan dukungan dan keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan kinerja maka organisasi akan semakin berkembang mengikuti zaman dan memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholders.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi atas pencapaian sasaran strategis dan hambatan dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Agar mudah dipahami, penyajian LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut
:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada bab ini memuat:

A. Latar Belakang
   - Menyajikan informasi latar belakang penyusunan LAKIN

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
   - Menyajikan informasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta komposisi sumber daya manusia baik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan golongan.

C. Peran Strategis
   - Menyajikan peran strategis organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta isu strategis yang sedang dihadapi.

D. Sistematika Laporan
   - Menyajikan informasi sistematika atas LAKIN (Bab I s.d. Lampiran beserta penjelasan ringkas atas apa yang akan disajikan dalam setiap bab dan lampiran).

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Pada bab ini memuat:

A. Rencana Strategis

- Menyajikan informasi visi, misi, dan tujuan strategis tahun 2015-2019 dan target kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA unit tahun 2015-2019.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

- Menyajikan informasi perjanjian kinerja tahun 2018 yang memuat peta strategis unit, sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan pendanaan dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2018;
- Penjelasan atas penyebab perbedaan indikator kinerja dan/atau target kinerja tahun 2018 antara yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2015-2019 dan yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini memuat:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pada Sub bab ini memuat:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit kerja tahun 2018 dan perbandingan dengan NKO beberapa tahun terkahir (dari tahun 2015).
2. Nilai kinerja untuk setiap perspektif (*stakeholder, customer, internal process*, dan *learning and growth*).
3. Tabel meneyeluruh atas NKO (dari IKU ke SS, perspektif, sampai dengan NKO).
4. Penjelasan setiap sasaran strategis yang meliputi:
   a. Definisi sasaran strategis;
   b. Capaian IKU-IKU pada sasaran strategis.
   c. Penjelasan berurutan atas setiap IKU pada sasaran strategis, yang meliputi:
      1) Definisi IKU (penjelasan atas IKU dan latar belakang/asal-usulnya);
      2) Cara ukur/formula IKU tahun 2018;
      3) Penjelasan target IKU tahun 2018, dengan dibandingkan dengan target tahun lalu dan target pada Renstra;
      4) Penjelasan realisasi IKU tahun 2018;
      5) Perhitungan IKU (bagaimana realisasi IKU dihitung, bila nilai IKU diperoleh dari hasil perhitungan);
      6) Penjelasan perolehan nilai IKU (bila nilai IKU diperoleh dari hasil penilaian unit lain);
      7) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018;
      8) Perbandingan antara capaian kinerja (target dan realisasi) tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir;

9) Perbandingan antara capaian kinerja (target dan realisasi) sampai dengan tahun ini (2015-2018) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra 2015-2019);
10) Perbandingan capaian kinerja (target dan realisasi) tahun 2018 dengan target kinerja pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional);
11) Perbandingan realisasi/capaian kinerja unit dengan unit sejenis (hanya bila informasi tersebut dapat diperoleh; biasanya berupa suatu nilai yang diumumkan sehingga dapat diketahui nilai-nilai untuk unit-unit sejenis dimaksud);
12) Isu, permasalahan, tantangan, dan tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU, serta rekomendasi rencana aksi (action plan) yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian IKU;
13) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, program/kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian, dan alternatif solusi yang telah dilakukan;
14) Penjelasan atas capaian inisiatif strategis yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2018 untuk mendukung pencapaian IKU.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada Sub bab ini memuat:

1. Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit (per jenis belanja) beberapa tahun terakhir;
2. Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit tahun 2018 per kegiatan/output;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) yang terkuantifikasi dan dapat dijelaskan.

C. Kinerja Lain-lain

Pada sub bab ini diuraikan pelaksanaan kinerja lainnya yang mendukung tercapainya target kinerja utama, Kinerja lainnya dituangkan dengan klasifikasi:

1. Inovasi manajemen/pelayanan;
2. Inisiatif pemberantasan korupsi;
3. Penghargaan; dan
4. Capaian tahun 2018 lainnya.

.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

Terdiri atas:

1. Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja) Tahun 2018;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018;
3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018;
4. Lain-lain:
   - Dokumen/bagian dokumen pendukung penjelasan atas capaian IKU atau kinerja lainnya;
   - Informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan pencapaian kinerja tahun 2018;
   - Informasi relevan lainnya.

Dengan sistematika laporan tersebut di atas, diharapkan LAKIN ini dapat mudah dipahami baik oleh internal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta eksternal yaitu masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai visi :

"***Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional***"

Dalam visi tersebut yang dimaksud dengan tugas Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara adalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai suatu pernyataan yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan pembinaan yang berkesinambungan.

Ada 12 (dua belas) Tujuan Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah tercantum dalam Renstra 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L serta mewujudkan kualitas penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
   SS : Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada mitra kerja.
   SS : Kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
3. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi/konfirmasi seluruh UAPPA-W lingkup wilayah kerjanya.
   SS : Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi.
4. Mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar selalu mengedepankan pelayanan prima.
   SS : Pelayanan Prima.
5. Mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.
   SS : Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal.
6. Mewujudkan laporan reviu pelaksanaan anggaran yang berkualitas.
   SS : Pelaksanaan anggaran yang efektiv dan optimal.
7. Meningkatkan efektivitas penyusunan GFS regional oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

SS : Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

8. Meningkatkan efektivitas pembinaan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan..

   SS : Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan.

9. Meningkatkan kompetensi dan integritas para pegawai.

   SS : SDM yang profesional dan berintegritas.

10. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penanganan risiko, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan pengendalian intern.

    SS : Organisasi sehat yang berkinerja tinggi.

11. Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana BMN yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil.

    SS : Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

12. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian output.

    SS : Pengelolaan anggaran yang optimal.

Perbandingan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2015-2019 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel.2.1

Target Kinerja antara Renstra 2015-2019 dan Kontrak Kinerja 2018

No	Sasaran Strategis	IKU		Target	
				Renstra	2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	75%	80%
		1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	80	87
		1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	92	93
2	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,09	4,52 (skala 5)
3	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	N/A	98%
4	Pemenuhan layanan	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang	100%	100%

	unggulan yang prima		diselesaikan tepat waktu		
5	Pembinaan yang berkesinambungan	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	75	90
		5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	N/A	85
		5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	N/A	90%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	75	87
		6c-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	N/A	70
7	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	85%	88%
		7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	N/A	75
8	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	N/A	75
9	SDM yang kompetitif	9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	N/A	77
10	Organisasi yang fit *for purpose*	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	N/A	78
		10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	80	81
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	N/A	91%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	95%

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, target dari sasaran strategis di atas perlu selalu dicermati dan dikelola secara benar. Mencermati dan memahami semua peraturan perundangan yang mendukung dengan benar serta dalam pengelolaannya harus menggunakan strategi maupun pemikiran-pemikiran yang rasional, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dengan memperhitungkan kekuatan maupun kekurangan yang dimiliki maupun peluang dan tantangan / ancaman yang dihadapi maka strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

- ***Strategi mengoptimalkan kekuatan memanfaatkan peluang yang ada.***
  Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, harus cepat diantisipasi oleh segenap jajaran instansi dengan cara mengoptimalkan SDM dan peralatan yang kita miliki agar tidak ketinggalan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- ***Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.***
  Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tuntutan pelayanan, dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, namun beberapa kendala yang dihadapai diantaranya 66,98% (71 dari 106) pegawai yang telah berusia di atas 50 tahun, serta keterbatasan dana. Untuk meminimalkan kelemahan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada maka perlu dilakukan penjagaan motivasi para pegawai agar kinerjanya terus bertahan serta pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada.
- ***Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.***
  Kekurangpahaman masyarakat maupun instansi/satker tentang mekanisme pengelolaan perbendaharaan negara yang baru sebagai akibat dari kurang tersedianya sarana informasi keuangan negara merupakan tantangan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi dan misinya. Namun dengan kemampuan SDM, tersedianya perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada, dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan sosialisasi peraturan perbendaharaan maupun peraturan-peraturan yang terkait lainnya secara berkesinambungan
- ***Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan.***
  Kelemahan disiplin pegawai dan orientasi pegawai yang kurang dapat diselesaikan dengan penegakan disiplin pegawai, mutasi pegawai dan pembinaan mental agama. Untuk mengatasi tantangan keterbatasan informasi keuangan negara dan kekuranganpahaman masyarakat maupun instansi / satker didalam mengelola keuangan negara maka perlu diadakan Diklat maupun GKM sebagai bekal bagi pegawai untuk menyampaikan informasi yang benar dan juga meningkatkan pelayanan.

  Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan berupa Layanan Unggulan Kanwil yaitu penerapan konsep layanan unggulan untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan trasparan dengan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan berintegrasi tinggi merupakan cermin budaya organisasi serta perwujudan kode etik pegawai anti korupsi.

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Perjanian Kinerja tahun 2018 yang merupakan Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Knerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Prov. Jabar Tahun 2018

Gambar.2.1

KONTRAK KINERJA
NOMOR : 22/PB/2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

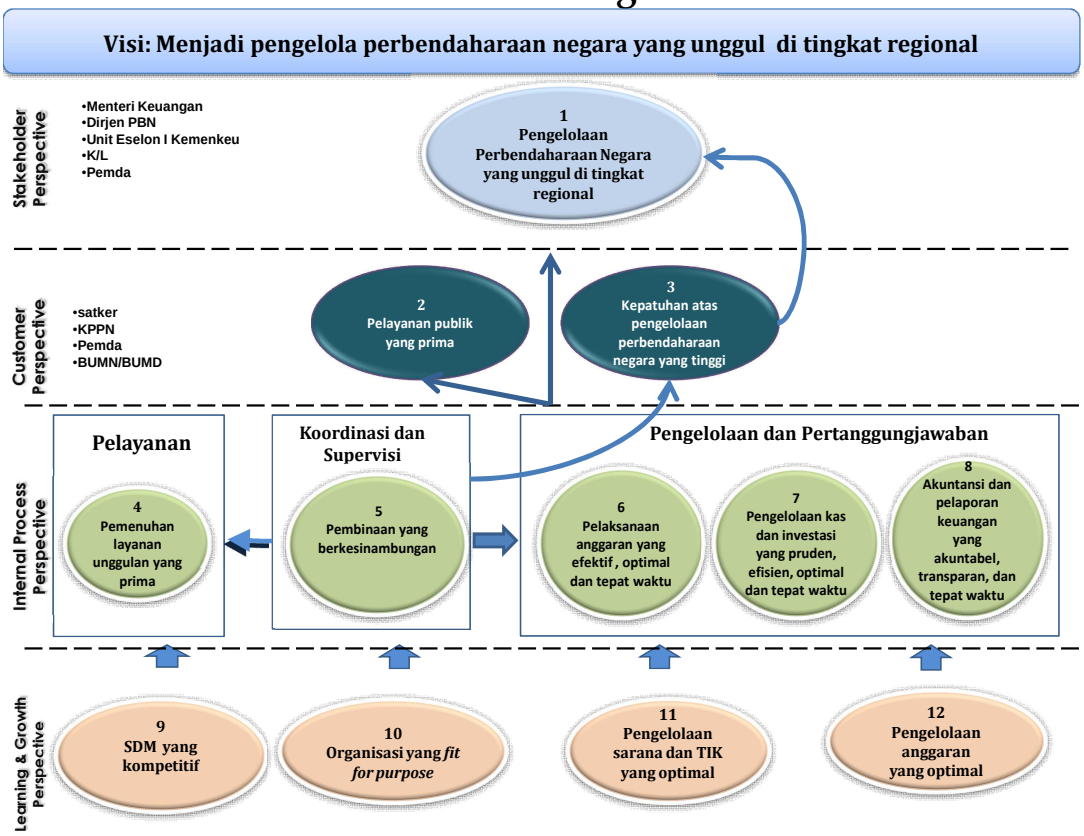

Tabel. 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80%
		1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	87
		1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	93
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,52 (skala 5)
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Pembinaanyang berkesinambungan	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90
		5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	85
		5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	90%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	87
		6c-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	70
7.	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%
		7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75
8.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	75

9.	SDM yang kompetitif	9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77
10.	Organisasi yang *fit for purpose*	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78
		10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	81
11.	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91%
12.	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

Program/Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah **Rp.9.394.281.000,-**

Empat Perspective

Peta Strategi yang telah disusunt ersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. ***Stakeholder Perspective***

   Perspective ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. ***Customer Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. ***Internal Proces Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (*value chain*).

4. ***Learning and Growth Perspective***

   Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi

yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

Penjelasan Refinement IKU pada Kontrak Tahun 2018 dengan Kontrak sebelumnya

Terdapat Refinement IKU yang ditetapkan pada Kontrak Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Refinement tersebut berupa perubahan target IKU, perubahan wording IKU dan penetapan IKU baru. Penjelasan refinement kontrak kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. IKU : Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L
   Terdapat kenaikan target sebesar 5% , tahun 2017 sebesar 75% menjadi 80% pada tahun 2018.
2. IKU : Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil
   Terdapat kenaikan target sebesar 2 poin, tahun 2017 sebesar 85 menjadi 87 pada tahun 2018.
3. IKU : Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil
   Target IKU pada tahun 2018 ditetapkan sama dengan pada tahun 2017 yaitu sebesar 93.
4. IKU : Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil
   Terdapat kenaikan target indeks sebesar 0,4 poin, tahun 2017 sebesar 4,12 menjadi 4,52 pada tahun 2018.
5. IKU : Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
   Terdapat kenaikan target sebesar 1%, tahun 2017 sebesar 97% menjadi 98% pada tahun 2018.
6. IKU : Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu
   Target IKU pada tahun 2018 ditetapkan sama dengan pada tahun 2017 yaitu sebesar 100%.
7. IKU : Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil
   Terdapat kenaikan target sebesar 5 poin, tahun 2017 sebesar 85 menjadi 90 pada tahun 2018.
8. IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
   Target IKU pada tahun 2018 ditetapkan sama dengan target pada tahun 2017 yaitu sebesar 85.
9. IKU : Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI
   Merupakan penetapan IKU baru pada tahun 2018 sebagai implementasi pelaksanaan penggunaan aplikasi SAKTI Piloting III pada Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal, Direktora Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Kekayaan Negara dan lainnya di luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada tahun 2018 target IKU ditetapkan sebesar 90%.
10. IKU : Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil
    Terdapat kenaikan target sebesar 2 poin, tahun 2017 sebesar 85 menjadi 87 pada tahun 2018.

11. IKU : Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN
    Merupakan penetapan IKU baru pada tahun 2018 sebagai program andalan baru tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yaitu penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Pada tahun 2018 target IKU ditetapkan sebesar 70.
12. IKU : Persentase akurasi rencana penarikan dana satker
    Terdapat kenaikan target sebesar 3%, tahun 2017 sebesar 85% menjadi 88% pada tahun 2018.
13. IKU : Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program
    Merupakan penetapan IKU baru pada tahun 2018 sebagai program tambahan andalan baru terhadap monitoring kredit program pemerintah selain Kredit Usaha Menengah dan Kecil (UMKM) ditambah dengan yang baru yaitu Kredit Usaha Mikro (Umi). Pada tahun 2018 target IKU ditetapkan sebesar 75.
14. IKU : Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah
    Terdapat kenaikan target sebesar 5 poin, tahun 2017 sebesar 70 menjadi 75 pada tahun 2018.
15. IKU : Nilai rata-rata *hard competency* pegawai
    Terdapat kenaikan target sebesar 2 poin, tahun 2017 sebesar 75 menjadi 77 pada tahun 2018.
16. IKU : Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal
    Terdapat kenaikan target sebesar 1 poin, tahun 2017 sebesar 77 menjadi 78 pada tahun 2018.
17. IKU : Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*
    Terdapat kenaikan target sebesar 2 poin, tahun 2017 sebesar 79 menjadi 81 pada tahun 2018.
18. IKU : Persentase pemenuhan BMN sesuai standar
    Terdapat kenaikan target sebesar 1 poin, tahun 2017 sebesar 90% menjadi 91% pada tahun 2018.
19. IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil
    Target IKU pada tahun 2018 ditetapkan sama dengan pada tahun 2017 yaitu sebesar 95%.

Penjelasan Umum perbedaan IKU pada Kontrak Kinerja Tahun 2018 dengan Renstra 2015-2019

Dari 19 (sembilan belas) IKU yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) IKU yang masih *inline* dengan Renstra 2015-2019, sedangkan 9 (sembilan) IKU lainnya mengalami perubahan perhitungan formula IKU atau penambahan IKU baru karena adanya tugas pokok dan fungsi Kanwil yang baru yang mengikuti perkembangan tgas-tugas baru pemerintahan. Penjelasan umum perbedaan IKU pada Kontrak Kinerja tahun 2018 dengan Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. IKU : Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, tidak terdapat perubahan wording pada IKU. Namun untuk indikator-indikator yang digunakan sebagai data perumusan hasil persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L semakin berkembang.

2. IKU : Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil

   Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, tidak terdapat perubahan wording pada IKU.

3. IKU : Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil

   Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, tidak terdapat perubahan wording pada IKU.

4. IKU : Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil

   Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, tidak terdapat perubahan wording pada IKU.

5. IKU : Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

   Dengan implementasi aplikasi e-rekon, rekonsiliasi UAKPA ke atasan langusngnya (UAPPA-W) sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 sudah tidak dilaksanakan. Rekonsiliasi langsung dilaksanakan tingkat UAKPA ke KPPN melalui aplikasi e-rekon.

6. IKU : Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu

   Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, tidak terdapat perubahan wording pada IKU.

7. IKU : Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil

   Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, namun terdapat perubahan wording pada IKU, di Renstra berbunyi Nilai laporan pembinaan kanwil yang berkualitas.

8. IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

   IKU ini tidak tercantum dalam penetapan pada Renstra 2015-2019, namun merupakan IKU baru yang ditetapkan masuk pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* sejak tahun 2016.

9. IKU : Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI

   IKU ini tidak tercantum dalam penetapan pada Renstra 2015-2019, namun merupakan IKU baru yang ditetapkan masuk pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* baru pada tahun 2018 ini. Implementasi SAKTI sebelumnya merupakan Tusi dari Direktorat Sistem Perbendaharaan dan setelah aplikasi SAKTI diterapkan di lingkup Kementerian Keuangan maka IKU ini menjadi bagian dari Tusi Kanwil dan KPPN.

10. IKU : Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil

    Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, tidak terdapat perubahan wording pada IKU.

11. IKU : Persentase akurasi rencana penarikan dana satker

Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, namun terdapat penyesuaian wording IKU. Di Renstra berbunyi Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker yang akurat dengan target maksimal 15%. Dengan perubahan wording tersebut maka formula perhitungannya juga berubah. Dan polarisasi indikator kinerja juga berubah yang semula minimize menjadi maximize.

12. IKU : Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN

    Setelah Kanwil dan KPPN mendapatkan penugasan baru yaitu pembinaan dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa maka dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* pada tahun 2018 ditetapkan IKU baru ini.

13. IKU : Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program

    IKU ini baru ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* tahun 2018. IKU ini merupakan pengembangan dari Renstra yaitu Persentase rekonsiliasi *outstanding* pinjaman yang andal dan tepat waktu. Berhubung pada tahun 2018, pemerintah mempunyai unggulan kredit program baru yaitu kredit UMKM dan kredit Umi, maka menjadi *concern* Kanwil untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring kegiatan tersebut.

14. IKU : Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah

    IKU ini merupakan pengembangan dari Renstra yaitu Indeks ketepatan waktu Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat kanwil. Jadi pada Renstra yang semula lebih menargetkan ketepatan waktu penyampaian laporan namun sejak tahun 2016 lebih menargetkan pada kualitas laporan.

15. IKU : Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

    IKU ini merupakan pengembangan dari Renstra yaitu Persentase pegawai yang mendapatkan nilai *hard competency* baik. Namun sejak tahun 2016 target IKU lebih ke Nilai rata-rata *hard competency* pegawai.

16. IKU : Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

    IKU ini merupakan pengembangan dari Renstra yaitu Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern. Sejak tahun 2016 target IKU yang berkaitan dengan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai, pemantauan mitigasi risiko , pemantauan pengaduan dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit menjadi 4 komponen yang menghasilkan nilai evaluasi kepatuhan inetrnal.

17. IKU : Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

    Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, namun terdapat perubahan wording IKU. Untuk di Renstra berbunyi Nilai kualitas pengelolaan kinerja.

18. IKU : Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

    IKU ini merupakan pengembangan dari Renstra yaitu Persentase Barang Milik Negara dengan kondisi baik. Namun sejak tahun 2016 target IKU lebih ditingkatkan kualitasnya dari semula kondisi BMN baik menjadi kondisi BMN harus sesuai dengan standar

spesifikasi yang telah ditetapkan.

19. IKU : Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil

    Masih sesuai dan meneruskan IKU yang tercantum pada Renstra 2015-2019, namun terdapat perubahan wording pada IKU. Pada Renstra berbunyi Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kanwil. Pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil, formula penghitungan persentase nilai IKU ditambah menjadi 4 (empat) komponen serta memperhitungkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diambil dari data aplikasi OMSPAN.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

C. Kinerja Lainnya

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja terebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 110,70 (sangat baik).

Perbandingan NKO 2018 dengan beberapa tahun sebelumnya

Tabel.3.1

Nilai Kinerja Organisasi

Tahun	NKO
2015	109,09
2016	112,29
2017	112,29
2018	110,39

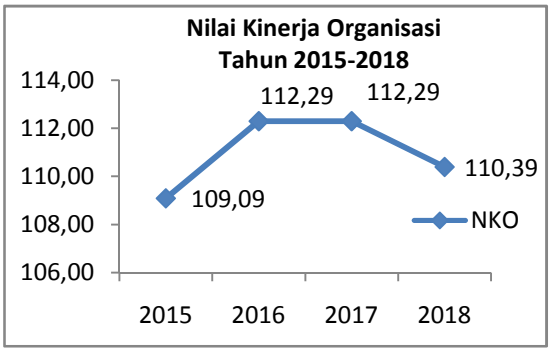

Nilai kinerja setiap perspektif

Capaian nilai kinerja setiap perspektif pada tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2017. Hal ini bukan disebabkan karena kinerja pada keempat perspektif tersebut berkurang namun karena semata-mata disebabkan oleh kenaikan target yang terjadi pada hampir semua indikator kinerja utama.

Tabel.3.2

Nilai Kinerja Perspektif

Perspective	**Bobot**	**Nilai**	**Nilai Akhir**	**Nilai**	**Nilai Akhir**	**Nilai**	**Nilai Akhir**
		Tahun 2016		**Tahun 2017**		**Tahun 2018**	
Stakeholder	25%	111,95	27,99%	111,13	27,78%	109,16	27,29%
Customer	15%	113,45	17,02%	106,72	16,01%	101,87	15,28%
Internal Process	30%	111,83	33,55%	110,18	33,05%	109,77	32,93%
Learning and Growth	30%	112,46	33,74%	118,15	35,44%	116,30	34,89%
Nilai Kinerja Organisasi / NKO			112,29%		112,29%		110,39%

Capaian kinerja dari IKU ke SS, pespektif sampai dengan NKO

Capaian nilai kinerja pada ke-19 (sembilan belas) indikator kinerja utama dan 12 (dua belas) sasaran strategis beserta nilai ke-4 (empat) perspektif sampai dengan nilai kinerja organisasi (NKO) pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

Tabel.3.3

Capaian Kinerja dari SS, Perspektif, IKU dan NKO

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
I	Stakeholder Perspektif (25%)				27,29%
1	Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional				109,15%
1	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80,00%	91,28%	114,10%
2	1b-N	Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	87,00	92,96	106,85%
3	1c-N	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	93,00	97,39	104,72%
II	Customer Perspektif (15%)				15,28%
2	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi				101,99%
4	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,52	4,61	101,99%
3	Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi				101,71%
5	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%	99,68%	101,71%
III	Internal Process (30%)				32,93%
4	Pemenuhan Layanan unggulan yang Prima				100,00%
6	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100%	100,00%
5	Pembinaan yang berkesinambungan				107,36%
7	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90	96,54	107,27%
8	5b-N	Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi	85	88,14	103,69%
9	5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	90%	100,00 %	111,11%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu				113,59%
10	6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	87,00	93,25	107,18%
11	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	70	96,54	120,00%
8	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, optimal dan tepat waktu				113,12%

12	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%	95,09%	108,06%
13	7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75	100	120,00%
8	Akuntansi dan pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Tepat Waktu				114,79%
14	8a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	75	86,09	114,79%
IV	Learning and Growth Perspektif (30%)				34,89%
9	SDM yang kompetitif				119,48%
15	9a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	92,00	119,48%
10	Organisasi yang kondusif				118,64%
16	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78	97,74	120,00%
17	10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	81	95,00	117,28%
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal				120,00%
18	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91,00%	120,72 %	120,00%
12	Pengelolaan Anggaran yang Optimal				107,07%
19	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	101,72 %	107,07%
CAPAIAN KINERJA PEGAWAI/ORGANISASI					110,39%

Definisi Sasaran Strategis, Definisi Indikator Kinerja Utama, Formula Perhitungan IKU serta Penjelasan Capaian IKU pada setiap sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Definisi SS.1
Pengelola Perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Unggul di tingkat regional memiliki makna bahwa pengelolaan perbendaharaan negara oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah.

1) IKU.1a-CP

Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ)

Formula IKU

KPA= [2,5% (REV) + 2,5% (HAL3) + 7,0% (RTR) + 35,0% (REAL) + 5,0% (TAG) + 15,0% (SPM) + 5% (RPD) + 5% (KTR) + 18,0% (PUP) + 5,0% (LPJ)] x 100

Penjelasan target

Target IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada tahun 2018 ditetapkan sebesar 80%, berarti ada kenaikan 5% dibandingkan dengan target pada tahun 2017 dan target Renstra 2015-2019.

Tabel.3.1.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	75%	75%	80%

Keterangan:

KPA — indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker

REV — indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula = (Jdiparev1/Jdipa)-(Jdiparev2/Jdipa), dengan ketentuan: (i) JDIPA merupakan Total jumlah DIPA/Petikan DIPA Satker; (ii) Jdiparev1 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1-Q4 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi maksimal 1 kali dalam 1 triwulan (**dengan demikian, untuk DIPA yang tidak direvisi termasuk kategori Jdiparev1**); dan (iii) Jdiparev2 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1-Q4 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah revisi pergeseran pagu tanpa mengakibatkan perubahan pagu DIPA Satker, didalamnya tidak termasuk revisi perubahan pagu akibat APBNP, kebijakan penghematan anggaran, kebijakan pemerintah pusat lainnya terkait APBN, serta revisi administratif. Dengan kata lain, meliputi semua revisi pagu tetap berupa pergeseran anggaran (baik yang DS-nya tetap maupun berubah). Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan bernilai negatif, maka nilainya dikonversi menjadi 0.

HAL3 — indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = 1- rata2 per bulan [(jreal-Jrenc)/Jrenc], dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iiii) hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi. **(v) hasil [(jreal-Jrenc)/Jrenc] bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus).**

RTR — indeks kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = 1-(∑retur penerima transfer SP2D/∑penerima transfer SP2D)

REAL — indeks penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = %Real/%Target, dengan ketentuan: (i) %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan pagu yang telah dikurangi *self blocking* (pagu efektif), dan (ii) %Target merupakan nilai target % penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%.

TAG — indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = ∑Tagihan **LS non BP Kontraktual** yang disampaikan tepat waktu/∑Total Tagihan **LS non BP Kontraktual**. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).

SPM — indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker, yang dihitung dengan formula = JSPM Benar/JSPM, dengan ketentuan: (i) JSPM Benar merupakan Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D pada Q1-Q4 (tidak kumulatif), dan (ii) JSPM merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office pada Q1-Q4 (tidak kumulatif).

RPD — indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = ∑Renkas Akurat/∑Renkas, dengan ketentuan: (i) ∑Renkas Akurat merupakan jumlah total data RPD harian yang akurat (diajukan SPMnya tepat waktu), dan (ii) ∑Renkas merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.

KTR — indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = ∑Kontrak yang disampaikan tepat waktu/∑Total Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.

PUP — indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = ∑GUP yang disampaikan tepat waktu/∑Total GUP. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir.

LPJ — indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = ∑LPJ yang disampaikan tepat waktu/∑Total LPJ yang harus disampaikan. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Hasil nilai IKPA triwulan IV diambil berdasarkan data pada apalikasi OMSPAN.

No	Aspek	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Kesesuaian dengan perencanaan	Revisi DIPA (REV)	95,25	5%	4,76%
		Deviasi Halaman III DIPA (HAL 3)	100	5%	5%
		Pagu Minus	99,18	5%	4,96%
2.	Efektivitas Pelaksanaan Anggaran	Retur SP2D (RTR)	99,53	5%	4,98%
		Penyerapan Anggaran (REAL)	100	20%	20,00%
		Penyelesaian Tagihan (TAG)	98,21	20%	19,64%
3.	Efisiensi Pelaksanaan Kegt	Pengembalian/Kesalahan SPM	97,28	5%	4,86%
		Renkas (RPD)	96,97	5%	4,85%
4.	Kepatuhan terhadap regulasi	Data Kontrak (KTR)	93,80	10%	9,38%
		Pengelolaan UP (PUP)	90,07	10%	9,01%
		Rekon LPJ (LPJ)	100	5%	5%
		Dispensasi Penyampaian SPM	99,99	5%	5%
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					97,44%

Rata-rata : [Q1+Q2+Q3+Q4}/4 = [84,70%+90,65%+92,34%+97,44%]/4

= 365,13%/4 **= 91,28%**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada tahun 2018 adalah sebesar 91,28% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Tabel.3.1.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80%	91,28%	114,10%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Realisasi IKU Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu realisasi 95,52% dengan target 70%. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi mengalami penurunan dikarenakan semakin banyaknya indikator yang dimasukkan sebagai komponen penghitungan nilai IKU

.

Tabel.3.1.3

Tahun	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	70%	87,40%	120%
2016	70%	95,52%	120%
2017	75%	95,55%	120%
2018	80%	91,28%	114,10%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Realisasi IKU dari tahun tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan dari 87,40% menjadi 95,55% dan melampaui target renstra 2015-2019 sebesar 75%. Pada tahun 2018 target renstra dinaikkan menjadi 80% sedangkan realisasinya sebesar 91,28% sama dengan capaiannya sebesar 114,10%.

Tabel.3.1.4

Tahun	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	0%	70%	87,40%
2016	75%	70%	95,52%
2017	75%	75%	95,55%
2018	80%	80%	91,28%
2019	80%		

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja pada RPJMN 2015-2019

Target Persentase Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L yang ditetapkan dalam RPJMN dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 91% lebih tinggi bila dibandingkan dengan Renstra 2015-2019 dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Tahun 2018. Dilihat dari realisasi IKU 2018 yang sebesar 91,28% berarti masih melampaui target dari RPJMN sebesar 91%.

Tabel.3.1.5

Tahun	RPJMN	*Persentase Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L*		
	Renstra	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi
2015	91%	0%	70%	87,40%
2016	91%	75%	70%	95,52%
2017	91%	75%	75%	95,55%
2018	91%	80%	80%	91,28%
2019	91%	80%		

Isu Utama

Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut maka tercapai prosentase kinerja pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga triwulan IV tahun 2018 sebesar 97,44%.

Capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan, semua indikator telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Namun demikian terdapat dua indikator yang mendapat perhatian lebih untuk peningkatan pada triwulan berikutnya yaitu Indikator Perekaman Data Kontrak yang tepat waktu (KTR) dan Pengelolaan UP yang tidak boleh terlambat (PUP).

Permasalahan yang dihadapi

Keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan, proses pelaksanaan pengadaan masih dalam pelelangan dan kesesuaian perencanaan untuk ke depan masih memerlukan perhatian.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menginformasikan regulasi terkait Tata cara revisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 pada seluruh satker di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat baik melalui sarana Grup WA Satker KIPAS maupun melalui layanan Pojok Konsultasi.

Action Plan

1. Memantau aspek-aspek dan variabel yang mempengahuri kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Kepala Seksi pada PPA I.
2. Melakukan reviu atas jumlah penyelesaian revisi DIPA satuan kerja Kementerian/Lembaga melalui Kepala Seksi pada PPA I.
3. Berdasarkan hasil pantauan realisasi anggaran pada satker dan reviu atas jumlah penyelesaian revisi DIPA, jika terdapat satker yang mempunyai masalah maka satker tersebut diundang untuk melakukan diskusi dalam forum FGD untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan pelaksanaan anggaran yang dihadapi.

2) IKU.1b-N

Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil

Kanwil Ditjen Perbendaharaan memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Sesuai ketentuan SE- 61/PB/2017, setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal tingkat wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: Ketepatan waktu penyampaian laporan (5%); Kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE (10%); Kelengkapan, relevansi, dan kualitas data (35%); Kualitas analisis (40%); Tehnik penyajian dan estetika (10%).

Kategori nilai Kajian Fiskal Regional Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (Excellent)

Level 4 = 75-90 (Good)

Level 3 = 61-74 (Fair)

Level 2 = 41-60 (Poor)

Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan KFR yang bersifat *historical* report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2018 merupakan hasil penilaian Laporan KFR tahunan 2017, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2018 merupakan hasil penilaian Laporan KFR semester I tahun 2018.

Formula IKU

Hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan target

Penetapan target pada Kontrak Kinerja tahun 2018 terus mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 dan target pada renstra, yaitu dari 80 ke 85 dan menjadi 87.

Tabel.3.2.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
1b-N	Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	80	85	87

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan hasil penilaian laporan KFR oleh Kantor Pusat diperoleh nilai pada semester I sebesar 91,53 dan semester II sebesar 94,38. Jadi bila dirata-rata : [91,53 + 94,38]/2 = 185.91/2 **= 92,96**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai Kualitas Laporan kajian Fiskal Regional Kanwil mencapai nilai sebesar 92,96 dari target 87 sehingga mendapatkan capaian IKU sebesar 106,85%

Tabel.3.2.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
1b-N	Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	87	92,96	106,85%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar 116,75% dengan realisasi 93,40 dan target 80. Sedangkan capaian IKU pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 106,85%. Hal ini disebabkan karena perolehan realisasi sebesar 92,96 namun targetnya naik menjadi 87.

Tabel.3.2.3

Tahun	1b-N	Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	80	93,40	116,75%
2016	82	91,97	112,59%
2017	85	92,15	108,12%
2018	87	92,96	106,85%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Penetapan target IKU Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil pada kontrak kinerja terus mengalami kenaikan, sedangkan target renstra sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditetatpkan tetap yaitu sebesar 80.

Tabel.3.2.4

Tahun	1b-N	Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	80	80	93,40
2016	80	82	91,97
2017	80	85	92,15
2018	80	87	92,96
2019	80		

Isu Utama

1. Hasil Penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional Semester II 2018 dari Kantor Pusat atas kualitas Laporan KFR TW II-2018 sebesar 94,38 meningkat jika dibandingkan nilai pada Semester I 2018 yang hanya mencapai 91,53 dan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87. Meskipun nilai kualitas Laporan KFR Semester II 2018 meningkat dibandingkan Semester I 2018 namun turun secara peringkat dari peringkat 6 menjadi peringkat 7.
2. Laporan KFR Triwulan III 2018 telah diselesaikan dan dikirim ke Kantor Pusat pada tanggal 12 November 2018.
3. Isu utama dalam penyusunan KFR adalah ketersediaan data untuk bahan penyusunan KFR mendekati akhir batas waktu penyelesaian, kurang lengkapnya data yang diperoleh dan analis kajian yang kurang mendalam.
4. Adanya pembatasan halaman yang tidak seimbang dengan banyaknya data dan analisa yang harus disajikan sehingga mempengaruhi estetika penyajian.

Permasalahan yang dihadapi

1. Keterbatasan SDM yang kompeten terutama dalam hal analisa data pada Bidang PPA II.
2. Data sebagai bahan penyusunan KFR dari pihak internal maupun eksternal Kanwil diperoleh/tersedia menjelang akhir batas waktu penyelesaian kajian sehingga waktu analisa dan penyusunan terbatas.
3. Kurang lengkapnya data yang tersedia baik dari pihak internal maupun eksternal Kanwil.
4. Adanya pembatasan halaman yang tidak seimbang dengan banyaknya data dan analisa yang harus disajikan dimana untuk Jawa Barat harus menyajikan data dari 28 Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga mempengaruhi estetika penyajian.
5. Tidak adanya review dari hasil penilaian Kantor Pusat terkait kekurangan atau kelebihan laporan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan GKM internal bidang dan mengikutsertakan pegawai PPA II dalam diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat serta melakukan *Coaching and conseling* kepada Kepala Seksi dan Pelaksana dalam rangka peningkatan kompetensi.
2. Dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional melakukan sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak internal Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat (antar bidang atau KPPN) maupun pihak eksternal antara lain BI, BPS, Pemda Prov/Kab/Kota, Satker Pemda, KPPN se Prov.Jabar dan akademisi dalam pengumpulan data dan sharing informasi.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan penyelesaian penyusunan KFR.
4. Melakukan koreksi terhadap konsep KFR yang telah disusun.
5. Melakukan diskusi hasil penyusunan KFR dengan Regional Ekonomis sebelum disampaikan ke Kantor Pusat.
6. Melakukan penyusunan Laporan KFR Triwulan III 2018 dan telah dikirim ke Kantor Pusat pada tanggal 12 November 2018.

Action Plan

1. Penyusunan dan penyelesaian KFR Tahunan 2018, direncanakan dapat diselesaikan dan disampaikan ke Kantor Pusat sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu sebelum tanggal 28 Februari 2018.
2. Dalam penyusunan KFR Tahunan 2018, akan dilakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak baik dengan pihak internal Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat maupun pihak eksternal antara lain BI, BPS, Pemda Prov/Kab/Kota, Satker Pemda, KPPN se Prov Jabar, serta akademisi dalam pengumpulan data dan sharing informasi.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan penyelesaian dan koreksi terhadap KFR Tahunan 2018.
4. Melakukan FGD/diskuksi antara Tim Penyusun dengan pihak akademisi sebelum KFR Tahunan 2018.
5. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Bidang PPA II melaui GKM, diklat serta *coaching and conseling.*

3) IKU.1c-N

Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil

Berdasarkan 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil DItjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKABUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemprosesan data gabungan dan LK UAKABUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Dit. PK (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) ketepatan waktu (10%), (2) Akurasi Data (75%), (3) Kelengkapan Dokumen (5%), (4) Partisipasi (10%).

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2018, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2017.

Formula

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK

Penjelasan target

Target kontrak kinerja tahun 2018 ditetapkan sama dengan kontrak kinerja tahun 2017 yaitu sebesar 93, namun naik 1 poin bila dibandingkan dengan target renstra yang sebesar 92.

Tabel.3.3.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
1c-N	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	92	93	93

Perhitungan dan penjelasan perolehan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-559/PB/2018

nilai IKU

tanggal 8 November 2018, hasil penilaian Kualitas LK BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai 97,39

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil memperoleh nilai sebesar 97,39 dengan target 93 sehingga capaian IKUnya diperoleh nilai sebesar 104,72%

Tabel.3.3.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
1c-N	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	93	97,39	104,72%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar 105,93% dengan realisasi 97,46 dan target 92. Pada tahun 2018 nilai capaiannya sebesar 104,72% lebih besar dibandingkan dari tahun 2017 dan 2016.

Tabel.3.3.3

Tahun	1c-N	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	92	97,46	105,93%
2016	92	93,37	101,49%
2017	93	94,69	101,82%
2018	93	97,39	104,72%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Realisasi IKU Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil dari tahun 2015-2018 senantiasa melampaui target yang ditetapkan pada renstra yaitu sebesar 92.

Tabel.3.3.4

Tahun	1c-N	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	92	92	97,46
2016	92	92	93,37
2017	92	93	94,69
2018	92	93	97,39
2019	92		

Perbandingan capaian kinerja

Penetapan target pada RPJMN dan Renstra 2015-2019 adalah sama yaitu 92, sedangkan

dengan target kinerja pada RPJMN 2015-2019

pada kontrak kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan 1 poin yaitu menjadi 93. *Wording* IKU ini pada RPJMN adalah Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W.

Tabel.3.3.5

Tahun	RPJMN	Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W		
	Renstra	Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi
2015	92	92	92	97,46
2016	92	92	92	93,37
2017	92	92	93	94,69
2018	92	92	93	97,39
2019	92	92		

Isu Utama

1. PMK Nomor 221/PMK.05/2016 Tgl.30-12-2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
2. Perdirjen No.56/PB/2016 tgl. 30-12-2016 tentang Pedoman Analisis Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat KPPN dan UAKKBUN Tingkat Kanwil.
3. Surat Direktur APK Nomor S-6193/PB/2017 Tanggal 13 Juli 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah dan Koordinator Kuasa BUN Kanwil
4. Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-559/PB/2018 tanggal 8 November 2018 diperoleh nilai 97,39

Permasalahan yang dihadapi

LK BUN KPPN lingkup Kanwil Prov. Jawa Barat telah mencapai nilai kualitas di atas target namun masih harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat rangking yang lebih baik.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan analisa LK Kuasa BUN KPPN bulan September, Oktober dan November 2018.
- Melakukan pembinaan bersama Bidang SKKI ke KPPN Bogor,KPPN Kuningan, KPPN Bekasi, KPPN Bandung I, KPPN Bandung II, KPPN Cirebon, KPPN Garut, KPPN Sumedang, KPPN Sukabumi dan KPPN Tasikmalaya.
- Melakukan monitoring rekonsiliasi bulan September, Oktober dan November 2018.

Action Plan

Melakukan koordinasi dengan KPPN dalam rangka penyusunan LK Kuasa BUN tingkat

KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Definisi SS.2
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan customer (pelanggan) terhadap layanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Pelayanan publik yang prima didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan Kanwil Ditjen perbendaharaan yang telah memenuhi atau melebihi harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

4) IKU.2a-N

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil

Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Formula IKU

Indeks hasil survei kepuasan satker

Penjelasan target

Target yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 0,40 dari tahun 4,12 di tahun 2017 menjadi 4,52 pada tahun 2018, bila dibandingkan dengan kenaikan target tahun sebelumnya yang hanya naik 0,03 poin.

Tabel.3.4.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,09	4,12	4,52

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Bidang PPA I terhadap 272 responden diperoleh indeks nilai sebesar 4,61 dari skala 5. Responden diambil dari satuan kerja-satuan kerja di wilayah pembayaran pada KPPN-KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa

Barat.

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil memperoleh nilai 4,61 dari target 4,52 yang berarti capainnya sebesar 101,99%

Tabel.3.4.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,52	4,61	101,99%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 113,45% dengan realisasi sebesar 4,64 dari target 4,09. Pada tahun 2018, capaian IKU mengalami penurunan dan memperoleh capaian paling rendah dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari penetapan target yang naik signifikan.

Tabel.3.4.3

Tahun	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	4,06	4,38	107,88%
2016	4,09	4,64	113,45%
2017	4,12	4,56	110,68%
2018	4,52	4,61	101,99%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Penetapan target di kontrak kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami kenaikan, dibandingkan target pada renstra yang terus ditetapkan hanya dikisaran 4,09.

Tabel.3.4.4

Tahun	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	4,06	4,06	4,38
2016	4,09	4,09	4,64
2017	4,09	4,12	4,56
2018	4,09	4,52	4,61
2019	4,09		

Isu Utama

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan indeks kepuasan

satker di antaranya adalah kapasitas dan jumlah petugas FO serta gangguan pada aplikasi atau jaringan.

Permasalahan yang dihadapi

1. Belum optimalnya pelayanan baik secara jumlah petugas maupun kapasitasnya.
2. Adanya gangguan aplikasi dan jaringan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Untuk melayani satker di FO, selain petugas FO yang telah ditetapkan disusun pula jadwaln piket pegawai yang bertugas selama jam layanan dan jam istirahat.
2. Adanya gangguan pada aplikasi atau jaringan langsung ditindaklanjuti/ dilaporkan baik ke petugas internal Kanwil juga kepada *service desk* guna untuk mendapatkan penyelesaian
3. Menambah layanan konsultasi lebih intensif melalui sarana Pojok Konsultasi
4. Menyediakan Bengkel Satker Mandiri

Action Plan

1. Menambah jumlah petugas FO;
2. Meningkatkan kapasitas petugas FO;
3. Membangun komunikasi yang intensif dengan *service desk*;
4. Penyampaian informasi melalui berbagai media.

Definisi SS.3
Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Tinggi

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja/KL lingkup Kanwil dalam melakukan rekonsiliasi tingkat UAKPA.

5) IKU.3a-CP

Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Ekternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2018 = Desember 2017 - Februari 2018

Triwulan 2 2018 = Maret - Mei 2018

Triwulan 3 2108 = Juni - Agustus 2018

Triwulan 4 2108 = September - November 2018

Formula IKU

Capaian = $$50\%\left(\frac{a}{c}\right) + 50\%\left(\frac{b}{c}\right)$$

a. Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
b. Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen.
c. Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Penjelasan target

Target yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 yaitu sebesar 98% atau naik 1 poin dibandingkan dengan target pada tahun 2017 yang sebesar 97%. Sedangkan pada Renstra 2015-2019 karena terjadi perubahan perkembangan aplikasi e-rekon maka IKU ini tidak tersedia di Renstra.

Tabel.3.5.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	N/A	97%	98%

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Hasil persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA Triwulan IV

$$50\%\left(\frac{1.204+1.205+1.205}{1.205+1.205+1.205}\right) + 50\%\left(\frac{0}{3.615}\right) = 49{,}99\% + 49{,}82\% = 99{,}81\%$$

Nilai rata-rata : [Q1+Q2+Q3+Q4]/4 = [99,88%+99,08%+99,94%+99,81%]/4

= 398,71%/4

= 99,68%

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal memperoleh nilai sebesar 99,68% dari target 98%.

Tabel.3.5.2

IKU		Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%	99,68%	101,71%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal baru ada pada tahun 2017 karena baru ditetapkan pada tahun tersebut. Capaian IKU pada tahun 2018 sebesar 101,71% mengalami penurunan sebesar 1,05 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 102,76%.

Tabel.3.5.3

Tahun	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	97%	99,68%	102,76%
2018	98%	99,68%	101,71%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Hasil realisasi IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal tahun 2018 sama hasilnya dengan tahun 2017 yaitu sebesar 99,68%. Untuk target pada renstra tidak tersedia sehingga tidak bisa untuk perbandingan.

Tabel.3.5.4

Tahun	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	N/A	97%	99,68%
2018	N/A	98%	99,68%
2019	N/A		

Isu Utama

Masih ada satker yang melakukan rekonsiliasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Permasalahan yang dihadapi

Terbatasnya petugas rekonsiliasi satker yang memahami permasalahan rekonsiliasi.

Tindakan yang telah dilakukan

Telah dilaksanakan pengawasan terhadap monitoring rekonsiliasi bulan September, Oktober dan November 2018.

Action Plan

Berkoordinasi dengan KPPN dalam pelaksanaan rekonsiliasi tingkat KPPN.

Definisi SS.4
Pemenuhan Layanan unggulan yang Prima

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

6) IKU.4a-N

Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaranSatker yang diselesaikan tepat waktu

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA.

Berdasarkan PMK 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2017, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap.

Formula IKU

$$\frac{\sum \text{revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker}} \times 100\%$$

Penjelasan target

Target yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 sama dengan tahun 2017, begitu juga sama dengan target pada renstra yaitu sebesar 100% (maksimal).

Tabel.3.6.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Hasil persentase revisi pada triwulan IV adalah

$$\frac{1.383}{1.383} \times 100\% = 100\%$$

Nilai rata-rata : [Q1+Q2+Q3+Q4]/4 = [100%+100%+100%+100%]/4
= 400%/4 **= 100%**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu memperoleh nilai maksimal yaitu 100% sesuai dengan target.

Tabel.3.6.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Dari tahun 2015 sampai dengan 2018, antara target, realisasi dan capaian senantiasa memperoleh hasil nilai 100%.

Tabel.3.6.3

Tahun	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Begitu juga target yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019 adalah 100% juga.

Tabel.3.6.4

Tahun	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	100%	100%	100%
2016	100%	100%	100%
2017	100%	100%	100%
2018	100%	100%	100%
2019	100%		

Isu Utama

Proses revisi DIPA telah diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu, namun demikian beberapa hal yang dapat mengganggu kelancaran proses revisi seperti adanya gangguan aplikasi atau jaringan dan keterlambatan penyampaian kekurangan dokumen pendukung

Permasalahan yang dihadapi

1. Gangguan pada aplikasi atau jaringan;
2. Keterlambatan penyampaian dokumen pendukung revisi DIPA oleh satker.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Setiap adanya gangguan aplikasi atau jaringan telah ditindaklanjuti dengan melaporkan hal tersebut kepada *service desk.*
2. Usulan revisi yang masuk terlebih dahulu dicek kelengkapan usulannya melalui *e-mail* untuk menghindari kekurangan dokumen pendukung.

Action Plan

1. Melaporkan setiap gangguan aplikasi dan/atau jaringan.
2. Membangun sinergi dan komunikasi dengan *service desk*.
3. Meningkatkan kapasitas petugas melalui GKM setiap minggu, *briefing* pagi setiap hari, Bimtek dan Diklat.

Definisi SS.5
Pembinaan yang berkesinambungan

Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan satuan kerja di wilayah kerjanya secara berkala.

7) IKU.5a-N

Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-inikator pada setiap unsur berikut:

1. Pelaksanaan tugas Kuasa BUN
2. Pelayanan Perbendaharaan
3. Kinerja dan Tata Kelola KPPN

Pengisian realisasi IKU bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU Semester I tahun 2018 merupakan rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan semester II tahun 2017. Sedangkan realisasi IKU Semester II tahun 2017 merupakan rata-rata hasil pembinaan semester I tahun 2018.

Formula IKU

$$\frac{\textbf{Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil}}{\textbf{Jumlah KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil}}$$

Penjelasan target

Target yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 adalah sebesar 90, terjadi kenaikan 5 poin bila dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu sebesar 85, dan kenaikan 15 poin bila dibandingkan dengan target renstra.

Tabel.3.7.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	75	85	90

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan hasil penilaian penyusunan laporan pembinaan diperoleh nilai pada semester I sebesar 96,14 dan semester II sebesar 96,93. Jadi rata-rata nilainya adalah [96,14+96,93]/2 = 193,07/2 = **96,54**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil memperoleh nilai sebesar 96,54 dari target 90.

Tabel.3.7.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90	96,54	107,27

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi tertinggi diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 120% dengan realisasi 97,18 dari target 80. Sedangkan pada tahun 2018 capaian IKU mengalami penurunan yaitu memperoleh 107,27% dengan realisasi 96,54 dari target 90. Hal ini dipengaruhi karena penetapan target yang naik cukup banyak.

Tabel.3.7.3

Tahun	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	75	87,24	116,32%
2016	80	97,18	120,00%
2017	85	95,18	111,98%
2018	90	96,54	107,27%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Hasil realisasi IKU dari tahun 2015-2018 senantiasa melampaui target yang telah ditetapkan walaupun target untuk kontrak kinerja setiap tahunnya dinaikkan sebesar 5 poin, berbeda dengan target pada renstra yang ditetapkan stabil pada kisaran angka 75.

Tabel.3.7.4

Tahun	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	75	75	87,24
2016	75	80	97,18
2017	75	85	95,18
2018	75	90	96,54
2019	75		

Isu Utama

Berdasarkan hasil penilaian penyusunan laporan pembinaan untuk semester II tahun 2018 Kanwil DJPb Prov. Jabar mendapatkan nilai sebesar 96,93 dan meraih predikat peringkat 1 (pertama).

Permasalahan yang dihadapi

Masih minimnya pengetahuan tentang sistematika penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Kanwil

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah membuat pedoman Pembinaan berupa Smartbook Supervisi Pembinaan KPPN.
2. Mengevaluasi terhadap temuan-temuan saat Supervisi Pembinaan semester sebelumnya.
3. Pemberian penghargaan terhadap KPPN Terbaik atas Hasil pembinaan dan supervisi untuk memotivasi KPPN.

Action Plan

1. Smartbook Pembinaan KPPN
2. Mendorong KPPN menerapkan self audit compliance
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja KPPN
4. Pemberian penghargaan terhadap KPPN Terbaik atas Hasi l pembinaan dan supervisi untuk memotifasi KPPN

8) IKU.5b-N

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen perbendaharaan.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner.

Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula IKU

Rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

0 < x ≤ 20 = sangat tidak efektif

20 < x ≤ 40 = tidak efektif

40 < x ≤ 60 = kurang efektif

60 < x ≤ 80 = efektif

80 < x ≤ 100 = sangat efektif

Penjelasan target

Target IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tahun 2018 ditetapkan sebesar 85 sama dengan target pada tahun 2017, sedangkan untuk Renstra IKU ini belum ada.

Tabel.3.8.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
5b-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	N/A	85	85

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan hasil post test para peserta satker saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bidang PPA I dan Bidang PAPK diperoleh nilai pada semester I sebesar 87,64 dan semester II 88,63. Jadi bila dirata-rata memperoleh nilai : [87,64+88,63]/2 = 176,27/2=**88,14**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi mendapatkan nilai sebesar 88,14 dari target 85 sehingga memperoleh capaian 103,69%.

Tabel.3.8.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
5b-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	85	88,14	103,69%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi memperoleh nilai tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 105,59% dengan realisasi 89,75 dari target 85. Sedangkan capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 103,69% dengan realisasi 88,14

dari target 85.

Tabel.3.8.3

Tahun	5b-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	80	84,08	105,10%
2017	85	89,75	105,59%
2018	85	88,14	103,69%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Pada renstra 2015-2019 belum ada penetapan IKU Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi, sehingga capaian kinerja pada kontrak kinerja tidak dapat diperbandingkan.

Tabel.3.8.4

Tahun	5b-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	80	84,08
2017	N/A	85	89,75
2018	N/A	85	88,14
2019	N/A		

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja pada RPJMN 2015-2019

IKU ini dalam RPJMN ditetapkan dengan wording: Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran dengan penetapan target tahun 2018 sebesar 85. Jadi penetapan target pada Kontrak Kinerja tahun 2018 sama pada target RPJMN.

Tabel.3.8.5

Tahun	RPJMN	*Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran*		
	Renstra	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikas		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi
2015	80	N/A	N/A	N/A
2016	80	N/A	80	84,08
2017	85	N/A	85	89,75
2018	85	N/A	85	88,14
2019	90	N/A		

Isu Utama

Rendahnya tingkat pemahaman *stakeholders* dapat mengakibatkan kurang akurat dan terlambatnya penyampaian usulan revisi dan penyerapan anggaran satker menjadi terhambat.

Permasalahan yang dihadapi

1. Tingkat pemahaman *stakeholders* yang masih rendah.
2. Tingkat kompetensi narasumber yang belum optimal.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menyebarkan *pretest* dan *postest* kepada satker di acara Rakorda Pelaksanaan Anggaran dan Bimtek Laporan Keuangan.

Action Plan

1. Pelaksanaan bimtek dan sosialisasi Pelaksanaan Anggaran, bahan materi *pre-test* dan *post-test* pada acara bimbingan teknis pelaksanaan anggaran. sebagai bahan evaluasi penilaian tingkat efektivitas edukasi kepada satker.

2. Mengevaluasi hasil penilaian atas soal *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui tingkat efektivitas edukasi kepada satker sebagai bahan untuk melakukan langkah kebijakan selanjutnya terkait peningkatan edukasi dan komunikasi kepada satker.

9) IKU.5c-N

Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI

Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2018 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Untuk Kanwil, IKU ini mengukur tingkat keberhasilan Kanwil dalam melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring penyelesaian tahapan implementasi SAKTI pada satuan kerja lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Formula IKU

$$\frac{\textbf{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III}}{} \textbf{ X 100\% X Proporsi Tahapan}$$

Total Jumlah satker yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III

Keterangan Tahapan Implementasi SAKTI Tahap III untuk Kanwil DJPb dan KPPN:

Tahapan	Keterangan Tahapan:	Waktu Pelaksanaan	Porsi
Tahap 1	Pendampingan Piloting SAKTI Tahap III B (UP, TUP, Gaji Februari 2018)	Januari- Februari	10%
Tahap 2	Pendampingan migrasi saldo awal 2018 (Tahap III B) (Unaudited dan Audited)	Maret dan Juni	10%
Tahap 3	Pendampingan Piloting SAKTI Tahap III C	Juli - Desember	10%
Tahap 4	Training modul penganggaran	Maret	20%
Tahap 5	End User Traning DJP dan DJBC	Juli - Oktober	20%
Tahap 6	FGD sosialisasi Satker DJP dan DJBC	Agustus - Oktober	10%
Tahap 7	Publikasi dan komunikasi SAKTI	April, Juni, Oktober	20%

-Apabila Kanwil/KPPN tidak memiliki satker yang mengikuti Piloting SAKTI Tahap IIIB, maka tahapan implementasi SAKTI adalah sebagai berikut:

Tahapan	Keterangan Tahapan:	Waktu Pelaksanaan	Porsi
Tahap 1	Training modul penganggaran	Maret	25%
Tahap 2	Pendampingan Piloting SAKTI Tahap III C	Juli - Desember	15%
Tahap 3	End User Traning DJP dan DJBC	Juli - Oktober	25%
Tahap 4	FGD sosialisasi Satker DJP dan DJBC	Agustus - Oktober	10%
Tahap 5	Publikasi dan komunikasi SAKTI	April, Juni, Oktober	25%

Penjelasan target

Berhubung IKU Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI merupakan penetapan IKU Baru pada Kontrak Kinerja tahun 2018 maka perbandingan target dengan tahun sebelumnya ataupun dengan renstra tidak dapat dilakukan.

Tahap.3.9.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	N/A	N/A	90%

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Persentase jumlah satker yang harus melaksanakan implementasi aplikasi SAKTI Tahap III adalah sebagai berikut:

$$\frac{51}{51} \times 100\% \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI mendapatkan nilai sebanyak 100% dari target 90% sehingga memperoleh capaian sebesar 111,11%.

Tabel.3.9.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	90%	100%	111,11%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja IKU dengan capaian beberapa tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena merupakan penetapan IKU baru pada kontrak kinerja tahun 2018.

Tabel.3.9.3

Tahun	5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	N/A	N/A	N/A
2018	90%	100%	111,11%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Perbandingan dengan renstra juga tidak dapat dilakukan karena pada renstra belum ada penetapan IKU Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI.

Tabel.3.9.4

Tahun	5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	N/A	N/A	N/A
2018	N/A	90%	100%
2019	N/A		

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja pada RPJMN 2015-

Pada RPJMN 2015-2019, IKU ini telah ditetapkan dengan bunyi Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI dimana core bisnisnya sebelumnya ada pada

2019

Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP) belum ada di Kanwil. Namun mengikuti perkembangan implementasi aplikasi tersebut maka mulai tahun 2018 diturunkan ke Kanwil. Realisasi pada tahun 2018 memperoleh nilai sebesar 100% sama dengan target yang ditetapkan pada RPJMN untuk tahun 2018 yaitu 100% juga.

Tabel.3.9.5

Tahun	RPJMN	*Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI*		
	Renstra	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi
2015	72%	N/A	N/A	N/A
2016	75%	N/A	N/A	N/A
2017	86%	N/A	N/A	N/A
2018	100%	N/A	90%	100%
2019	100%	N/A		

Isu Utama

Satker -satker seharusnya yang sudah implementasi SAKTI namun belum bisa menjalankan aplikasi SAKTI

Permasalahan yang dihadapi

1. Terdapat kendala dalam jaringan infrastruktur SAKTI, sehingga aplikasi SAKTI tidak bisa di install di Satker.
2. SDM belum menguasai aplikasi SAKTI

Tindakan yang telah dilakukan

1. Pendampingan piloting SAKTI dalam pengajuan SPM.
2. Pengecekan Infrastruktur SAKTI
3. Monitoring melalui aplikasi MON SAKTI terhadap satker-satker yang sudah piloting SAKTI
4. Telah dilaksanakan pendampingan kepada para operator KPP, KPBC wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat sebagai Implementasi Piloting SAKTI Tahap 3C.

Action Plan

1. Pendampingan piloting SAKTI dalam pengajuan SPM
2. Monitoring melalui aplikasi MON SAKTI terhadap satker-satker yang sudah piloting SAKTI

Definisi SS.6 Pelaksanaan anggaran yang

Pelaksanaan anggaran yang efektif adalah anggaran dilaksanakan oleh

efektif, optimal dan tepat waktu

Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Optimal berarti bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan tepat waktu adalah anggaran dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran K/L yang efektif dan optimal, dengan cara melakukan pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran.

10) IKU.6a-N

Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya .

Tujuan disusunnya Laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas.

Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA (15%); Alur pikir/flow (10%); Kualitas analisis dan inovasi (25%); Ketajaman rekomendasi (15%); Analisis aspek khusus-Bab IV (15%); Format review/sistematika (5%); Penyajian dashboard (5%); Ketetpatan waktu (5%); dan Desain/layout (5%).

Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (Excellent)
Level 4 = 75-90 (Good)
Level 3 = 61-74 (Fair)
Level 2 = 41-60 (Poor)
Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan monitoring dan evaluasi spending review pelaksanaan anggaran yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2018 merupakan hasil penilaian Laporan semester II

tahun 2017, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2018 merupakan hasil penilaian Laporan semester I tahun 2018.

Formula IKU

Hasil penilaian laporan reviu pelaksanaan anggaran oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan target

Target IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja tahun 2018 adalah sebesar 87 naik 2 poin bila dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 85, dan naik signifikan yaitu sebesar 12 poin bila dibandingkan dengan target pada renstra yaitu sebesar 75.

Tabel.3.10.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	75	85	87

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan hasil penilaian laporan reviu pelaksanaan anggaran (RPA) oleh Kantor Pusat diperoleh nilai pada semester I sebesar 93,02 dan semester II sebesar 93,48. Jadi nilai rata-ratanya adalah [93,02+93,48]/2= 186,5/2 = 93,25

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil mendapatkan nilai sebesar 93,25 dari target 87 sehingga memperoleh capaian sebesar 107,18%

Tabel.3.10.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	87	93,25	107,18%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil memperoleh nilai tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 116,92% dengan realisasi sebesar 87,69 dari target 75. Sedangkan capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan walaupun realisasi IKU meningkat memperoleh nilai sebesar 93,25 namun dari target yang sudah dinaikkan menjadi 87.

Tabel.3.10.3

Tahun	6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil

	Target	Realisasi	Capaian
2015	75	87,69	116,92%
2016	80	91,87	114,84%
2017	85	93,34	109,81%
2018	87	93,25	107,18%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU ini tahun 2015-2018, realisasinya senantiasa melampaui target kontrak kinerja yang ditetapkan terus naik dan melampaui target pada renstra yang ditetapkan di kisaran 75.

Tabel.3.10.4

Tahun	6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	75	75	87,69
2016	75	80	91,87
2017	75	85	93,34
2018	75	87	93,25
2019	75		

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja pada RPJMN 2015-2019

Wording IKU ini pada RPJMN adalah Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review, dengan target 3 pada skala 5. Dengan perbedaan *wording* Nilai dengan Indeks tersebut maka capaian kinerja pada kontrak kinerja tidak dapat dilakukan perbandingan dengan RPJMN.

Tabel.3.10.5

Tahun	RPJMN	*Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan reviu Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review*		
	Renstra	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi
2015	3	75	75	87,69
2016	3	75	80	91,87
2017	3	75	85	93,34
2018	3	75	87	93,25
2019	3	75		

Isu Utama

Untuk mendapatkan hasil penilaian RPA untuk semester II 2018 yang memuaskan harus

didukung oleh data yang akurat dan koordinasi yang baik dan solid pada tim penyusun RPA

Permasalahan yang dihadapi

1. Keterlambatan petunjuk teknis tentang penyusunan RPA diterima oleh Kanwil.
2. Data dukung yang kurang akurat.
3. Kurangnya koordinasi tim internal penyusun RPA.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Mengevaluasi hasil penilaian RPA semester I 2018 untuk perbaikan penyusunan RPA semester II 2018.

Action Plan

1. Memberikan arahan dalam rapat pendahuluan terkait persiapan dan pembagian tugas penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dengan Kepala Seksi PPA I serta pelaksana terkait.
2. Melakukan rapat konsolidasi dan memberikan arahan dan koreksi dalam pembahasan *draft* Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dengan Kepala Seksi PPA I dan staf pelaksana terkait.
3. Memberikan arahan dan melakukan pengawasan untuk memastikan pengiriman dokumen Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran baik softcopy maupun hardcopy dikirimkan tepat waktu atau mendahului jadwal yang telah ditetapkan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Jakarta.

11) IKU.6b-N

Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN

Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN menggambarkan sejauh mana upaya pembinaan dan monitoring yang dilakukan Kanwil dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran DAK Fisik dan Dana Desa pada seluruh KPPN di lingkup wilayah kerjanya berjalan secara efektif, optimal dan tepat waktu.

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Formula IKU

x̄ NKP DFDD = Σ [NKP DFDD di KPPN] / Jumlah KPPN

NKP DFDD = [0,10 (SYARAT) + 0,30 (SSPSPM) + 0,30 (MONEV) + 0,30 (LK-UAKPA)] x 100

Apabila s.d. Triwulan I tidak terdapat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DFDD oleh Pemda, maka: NKP DFDD = 0,50 (MONEV) + 0,50 (LK-UAKPA)] x 100

Keterangan :

x̄ NKP DFDD : rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

NKP DFDD : Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

SYARAT:

rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. upload melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DFDD oleh pemda per jenis transfer per bidang dengan mengacu pada ketentuan pasal 11, 12, 14, dan 21 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2018. Sesuai ketentuan tersebut, diatur batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut:

a. DAK Fisik: Tahap I (21 Juli); Tahap II (21 Oktober); dan Tahap III (15 Desember).

b. DAK Fisik Bidang Tertentu: 21 Juli.

c. Dana Desa: Tahap I (7 HK sebelum minggu ketiga Juni); Tahap II (7 HK sebelum minggu keempat Juni); dan Tahap III (mengikuti pedoman Akhir TA).

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran (NIKWPDP DFDD) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan

0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan

0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan

0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 3 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan

0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 2 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan

0,75 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan

0,70 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan

0,60 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah terlambat dari batas waktu yang ditentukan

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian = ∑NIKWPDP DFDD/Jumlah Penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "SYARAT" bersifat kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

SSPSPM :

prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK

Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dengan mengacu pada ketentuan pasal 24 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017. Sesuai ketentuan tersebut, diatur bahwa Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

Persentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM =jumlah penyaluran DFDD per pemda per bidang per tahap secara tepat waktu/jumlah penyaluran DFDD per pemda per bidang per tahap

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "SSPSPM" bersifat kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

MONEV:

indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 HK sebelum batas waktu yang ditentukan

0,90 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 HK sebelum batas waktu yang ditentukan

0,80 = dokumen laporan monev disampaikan 1 HK sebelum batas waktu yang ditentukan

0,70 = dokumen laporan monev disampaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan

0,60 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat setelah batas waktu yang ditentukan

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "MONEV" bersifat tidak kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka hanya menggunakan data pada triwulan berkenaan.

LK-UAKPA:

prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 221/PMK.05/2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebegai berikut:

a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan

berikutnya.

b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan.

c. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.

d. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

Pelaksanaan penyampaian LK-UAKPA mengacu pada ketentuan yang disampaikan oleh Dit. PA selaku koordinator KPA Penyalur DFDD.

LK Kuasa UAKPA =∑laporan yang disampaikan tepat waktu s.d. triwulan berkenaan/∑laporan yang harus disampaikan s.d. triwulan berkenaan.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka hanya menggunakan data pada triwulan berkenaan.

Penjelasan target

Berhubung IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN merupakan penetapan IKU Baru pada Kontrak Kinerja tahun 2018 maka perbandingan target dengan tahun sebelumnya ataupun dengan renstra tidak dapat dilakukan.

Tabel.3.11.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	N/A	N/A	70

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Rata-rata nilai kinerja penayluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Triwulan IV adalah sebagai berikut:

No.	KPPN	Nilai	No.	KPPN	Nilai
1	KPPN Bandung I	100	7	KPPN Kuningan	99
2	KPPN Bandung II	92	8	KPPN Purwakarta	93,5
3	KPPN Bekasi	100	9	KPPN Sukabumi	99,64
4	KPPN Bogor	97,8	10	KPPN Sumedang	100
5	KPPN Garut	95,3	11	KPPN Tasikmalaya	91,50
6	KPPN Karawang	96	12	KPPN Cirebon	100
Total		**1.164,74 /12 = 97,06**			

Nilai rata-rata : [Q1+Q2+Q3+Q4]/4 = [94,5+96,90+97,68+97,06]/4 = 386,14/4

= 96,54

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN mendapatkan nilai sebesar 96,54 dari target 70 sehingga memperoleh capaian sebesar 120% (maksimal).

Tabel.3.11.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	70	96,54	120%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pada IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN baru ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018.

Tabel.3.11.3

Tahun	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	N/A	N/A	N/A
2018	70	96,54	120%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Perbandingan dengan renstra juga tidak dapat dilakukan karena pada renstra belum ada penetapan IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN.

Tabel.3.11.4

Tahun	6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	N/A	N/A	N/A
2018	N/A	70	96,54
2019	N/A		

Isu Utama

1. Pemda tepat waktu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa per jenis transfer per bidang pada Triwulan berkenaan.
2. KPPN tepat waktu menyelesaikan SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa selaku KPA Penyaluran pada Triwulan berkenaan.
3. KPPN tepat waktu menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik Triwulan berkenaan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA.

4. Tepat waktu dalam penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN pada Triwulan berkenaan.

Permasalahan yang dihadapi

Belum tersalurkannya Dana Desa dari rekening Kas Daerah ke Rekening Desa sesuai dengan ketentuan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada setiap tahapan penyaluran pada triwulan berkenaan.
2. Melakukan identifikasi permasalahan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada setiap tahapan penyaluran pada triwulan berkenaan sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
3. Melakukan Rakor, sosialisasi atau FGD bersama KPPN dan Pemda terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terutama apabila ada peraturan atau mekanisme kebijakan baru.

Action Plan

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait penyaluran DAK Fisik dan dan Dana Desa pada periode Triwulan I tahun 2019.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress penyaluran DAK Fisik dan dan Dana Desa pada KPPN pada periode Triwulan I tahun 2019 dan mendorong agar penyampaian laporan pemantauan DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN pada Triwulan I tahun 2019 dilakukan secara tepat waktu kepada Kanwil.
3. Melakukan Rakor, sosialisasi atau FGD bersama KPPN dan Pemda terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa terutama apabila ada peraturan atau mekanisme kebijakan baru.

Definisi SS.7
Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, optimal dan tepat waktu

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

12) IKU.7a-N Persentase akurasi rencana penarikan

Teknisnya, KPA menyampaikan RPD dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala

dana satkerl

KPPN.

Persentase rencana dan penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila rencana penarikan dengan realisasinya mencapai 85%

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi yang maksimal (100%) dengan tingkat deviasi pada periode tertentu.

Formula IKU

(100%-Tingkat Deviasi)

Keterangan :

Tingkat Deviasi diperoleh dari rata-rata akumulasi seluruh Laporan Deviasi KPPN di wilayah kerjanya.

Penjelasan target

Target IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 sebesar 88% naik 3 poin bila dibandingkan dengan target pada tahun 2017 sebesar 85%. Untuk perbandingan target dengan renstra tidak dapat dilakukan karena IKU tersebut tidak terdapat pada renstra.

Tabel.3.12.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	N/A	85%	88%

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN, rata-rata persentase akurasi rencana penarikan dana satker diperoleh nilai : [Q1+Q2+Q3+Q4]/4 = [93,55%+96,77%+97,16%+92,91%]/4 = 380,39%/4 = **95,09%**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker mendapatkan nilai sebesar 95,09% dari target 88% sehingga memperoleh capaian sebesar 108,06%

Tabel.3.12.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%	95,09%	108,06%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun

Capaian IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker tertinggi pada tahun 2016

2018 dengan beberapa tahun terakhir

yaitu sebesar 112,71% dengan realisasi 95,77% dari target 85%. Sedangkan capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan sedikit yaitu sebesar 0,52% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 108,58%.

Tabel.3.12.3

Tahun	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	85%	95,77%	112,71%
2017	85%	92,29%	108,58%
2018	88%	95,09%	108,06%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU Persentase akurasi rencana penarikan dana satker yang mulai ditetapkan pada kontrak kinerja sejak tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2015-2019 dikarenakan formula perhitungan pada renstra kepada tingkat Deviasi bukan ke Akurasi.

Tabel.3.12.4

Tahun	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	85%	95,77%
2017	N/A	85%	92,29%
2018	N/A	88%	95,09%
2019	N/A		

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja pada RPJMN 2015-2019

Realisasi IKU dari tahun 2016-2018 senantiasa melampaui target yang ditetapkan pada kontrak kinerja, namun bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada RPJMN yaitu sebesar 95% maka pada tahun 2017 realisasinya masih di bawah target yaitu sebesar 92,29%. Kondisi saat ini target yang ditetapkan pada kontrak kinerja masih di bawah target yang ditetapkan pada RPJMN.

Tabel.3.12.5

Tahun	RPJMN	*Persentase Akurasi Perencanaan Kas berdasarkan CPIN*		
	Renstra	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi

2015	95%	N/A	N/A	N/A
2016	95%	N/A	85%	95,77%
2017	95%	N/A	85%	92,29%
2018	95%	N/A	88%	95,09%
2019	95%	N/A		

Isu Utama

Deviasi rencana penarikan satker pada KPPN secara keseluruhan sudah cukup baik, namun kedisiplinan dalam penyampaian SPM sesuai RPD harian masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan yang dihadapi

1. Masih terdapat satker yang tidak disiplin dalam penyampaian SPM yang tidak sesuai dengan RPD harian.
2. Masih banyaknya dispensasi tanpa RPD yang diberikan oleh KPPN kepada satker.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah pemantauan RPD harian pada aplikasi OM SPAN dan KPPN diminta untuk melakukan sosialisasi dalam pelaksanaan RPD Harian kepada satker yang ada di wilayah bayarnya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Action Plan

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN yang terindikasi mengalami deviasi RPD yang tinggi dan menghimbau agar mempedomani Deklarasi Dwi Warna (*Dwi warna Charter*) terkait mitigasi Deviasi RPD pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
2. Meningkatkan pemahaman satker mengenai rencana penarikan dana melalui KPPN.
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum dalam hal ini Subbag Pengelolaan Kinerja Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat untuk penghitungan nilai deviasi RPD per KPPN.

13) IKU.7b-N

Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.

Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan

dan monitoring yang berupa :

a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman.
b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat early warning system (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah.

Formula IKU

Hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat Ditjen DJPb

Mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

$$Nilai = \left\{\left(\sum Kualitas\,Pembinaan\ X\ 80\%\right) + (Ketepatan\,Waktu\ X\ 20\%)\right\}$$

$$Kualitas\,Pembinaan = \{(A1\ X\ 10\%) + (A2\ X\ 30\%) + (A3\ X\ 30\%) + (A4\ X\ 30\%)\}$$

A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program

100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

50 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017

A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

50 = Dembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017

0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah

pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.

Penjelasan target

Target IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target pada tahun 2017 maupun pada target Renstra 2015-2019 karena IKU ini merupakan penetapan IKU baru pada kontrak kinerja tahun 2018.

Tabel.3.13.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	N/A	N/A	75

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Pada semester I memperoleh nilai 100 sedangkan pada semester II berdasarkan Nota Dinas Dit.SMI No.ND-10/PB.4/2019 tanggal 7 Januari 2019 juga memperoleh nilai 100. Jadi rata-rata nilainya adalah [100+100]/2 = 200/2 = **100**

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program mendapatkan nilai sebesar 100 dari target 75 sehingga capainnya memperoleh nilai sebesar 120% (maksimal).

Tabel.3.13.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75	100	120%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pada IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program baru ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018.

Tabel.3.13.3

Tahun	7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A

2017	N/A	N/A	N/A
2018	75	100	120%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Begitu juga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan Renstra 2015-2019 karena IKU tersebut tidak ada dalam renstra, yang ada dalam renstra adalah IKU Persentase rekonsiliasi *outstanding* pinjaman yang andal dan tepat waktu, belum ada kredit program Umi yang menjadi andalan pemerintah saat ini.

Tabel.3.13.4

Tahun	7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	N/A	N/A
2017	N/A	N/A	N/A
2018	N/A	75	100
2019	N/A		

Isu Utama

1. Realisasi IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Semester II 2018 adalah sebesar 100 berdasarkan sesuai dengan Nota Dinas Dit.SMI No.ND-10/PB.4/2019 tanggal 7 Januari 2019.
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembinaan kredit program dan tepat waktu dalam penyampaian laporan semesteran pembinaan dan monitoring atas pinjaman dan kredit program sesuai Rencana Kerja dan menyampaikan Laporan Semesteran ke Kantor Dit.SMI secara tepat waktu sehingga hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.

Permasalahan yang dihadapi

1. Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017 atau tidak menyampaian dokumen perencanaan ke kantor pusat.
2. Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017 atau tidak melakukan pembinaan.
3. Debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan rekonsiliasi dilaksanakan tidak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data.
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program dilakukan satu kali dalam enam

bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017 atau tidak melaksanakan Monev Kredit Program.

5. Laporan disampaikan lebih dari 5 hari sesudah semester berakhir.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Beberapa kegiatan pembinaan dan monitoring telah dilaksanakan oleh Kanwil pada Semester II 2018 antara lain :
   a. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman PDAM/Pemda yang andal dan tepat waktu pada Juli 2018.
   b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program Semester II 2018.
   c. Bimtek KUR dan SIKP selama Semester II 2018.
2. Membuat dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017 dan telah disampaikan ke Dit.SMI Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan pada Triwulan I tahun 2018.
3. Realisasi capaian IKU Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program Semester II 2018 Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai 100 sesuai dengan Nota Dinas Dit.SMI No.ND-10/PB.4/2019 tanggal 7 Januari 2019.

Action Plan

1. Melakukan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah yang bersumber dari RDI dan Penerusan Pinjaman kepada BUMN/PT masa penyelesaian piutang negara yang dilakukan minimal satu kali pada Semester I – 2019 sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017.
2. Melakukan pembinaan dan monitoring kredit program dan investasi lainnya pada Triwulan I 2019.
3. Melakukan rekonsiliasi pinjaman Semester I 2019 pada Bulan Januari 2019 sesuai penugasan dari Kantor Pusatpembinaan dan kredit program Semester II – 2018 pada 1 s.d. 5 hari setelah semester II-2018 berakhir.

Definisi SS.8
Akuntansi dan pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan, dan Twpat Waktu

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

14) IKU.8a-N

Nilai kualitas Laporan Government

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah

Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah

dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian.

Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 60-89 (Baik)

Level 2 = 40-59 (Cukup)

Level 1 = <39 (Kurang)

Formula IKU

Hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan target

Target IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 sebesar 75 naik 5 poin dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 70. Namun bila dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 tidak dapat dilakukan karena perbedaan *wording*. *Wording* IKU pada renstra adalah Indeks ketepatan waktu laporan GFS dengan target 3 dari skala 4.

Tabel.3.14.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	N/A	70	75

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor : KEP-560/PB/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah diperoleh nilai 86,09

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah mendapatkan nilai sebesar 86,09 dari target 75 sehingga memperoleh capaian sebesar 114,79%.

Tabel.3.14.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	75	86,09	114,79%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan nilai maksimal, sedangkan untuk tahun 2018 mendapatkan capaian sebesar 114,79% turun 5,21 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel.3.14.3

Tahun	8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	60	91,76	120%
2017	70	84,48	120%
2018	75	86,09	114,79%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah yang mulai ditetapkan pada kontrak kinerja sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2015-2019 dikarenakan wording IKU pada renstra lebih ke Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan.

Tabel.3.14.4

Tahun	8a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	60	91,76
2017	N/A	70	84,48
2018	N/A	75	86,09
2019	N/A		

Isu Utama	Apabila penyampaian Laporan Keuangan Pemda tidak tepat waktu dan tidak akurat maka akan menurunkan kualitas Laporan GFS Kanwil
Permasalahan yang dihadapi	Penyampaian Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah mendekati dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Tindakan yang telah dilakukan	1. Melakukan Bimtek Penyusunan LK UAPPAW tahun 2017 pada tanggal 23 Januari 2018 2. Melakukan Bimtek Aplikasi Persediaan di Kab. Karawang pada tanggal 13 s/d 14 Februari 2018
Action Plan	Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan GFS
Definisi SS.9 SDM yang kompetitif	SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.
15) IKU.9a-N ***Nilai rata-rata hard competency pegawai***	IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Pengukuran tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi dilakukan dengan cara memberikan tes secara online kepada para pegawai, yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-Two Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available). Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.
Formula IKU	$\frac{\textbf{Jumlah Nilai Hard compertency pegawai kanwil}}{\textbf{Jumlah pegawai kanwil yang mengikuti tes } \textbf{\textit{hard competency}}}$
Penjelasan target	Target IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 sebesar 77 naik 2 poin dibandingkan dengan target pada tahun 2017, namun dengan target Renstra 2015-2019 tidak dapat dilakukan perbandingan karena *wording* pada renstra adalah Persentase pegawai yang mendapatkan nilai *hard competency* baik.

Tabel.3.15.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	N/A	75	77

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Hasil nilai hard competency pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat berdasarkan aplikasi Training Pbnopen diperoleh nilai sebagai beriku:

No.	Unit	Jumlah Pegawai	Jumlah Nilai	Rata-rata	Capaian IKU
1	Bagian Umum	31	2934	94,65	122,93
2	PA I	16	1481	92,56	120,21
3	PA II	13	1167	89,77	116,58
4	PAPK	10	885	88,57	115,02
5	SKKI	14	1260	90	116,88
6	Kanwil Jabar	84	7727	92	119,48

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai mendapatkan nilai sebesar 92 dari target 77 sehingga memperoleh capaian sebesar 119,48%.

Tabel.3.15.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77	92	119,48%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan nilai maksimal yaitu 120%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0.52 poin atau capainnya menjadi 119,48%. Namun dilihat dari realisasi, pada tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu 92 dibandingkan dengan dua tahu sebelumnya.

Tabel.3.15.3

Tahun	9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	72	91,51	120%
2017	75	90,61	120%
2018	77	92	119,48%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU Nilai Nilai rata-rata *hard competency* pegawai yang ditetapkan pada kontrak kinerja sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2015-2019 dikarenakan *wording* IKU pada renstra adalah Persentase pegawai yang mendapatkan nilai *hard competency* baik yaitu dengan target sebesar 90.

Tabel.3.15.4

Tahun	9a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	72	91,51
2017	N/A	75	90,61
2018	N/A	77	92
2019	N/A		

Isu Utama

Belum meratanya hasil nilai *hard competency* pegawai pada semua bidang yang menghasilkan nilai maksimal. Untuk pelaksana di Bagian Umum dan Bidang PPA I telah memberikan capaian nilai Tes HC sebesar 120%.

Permasalahan yang dihadapi

Nilai *hard competency* pegawai belum seluruhnya sangat baik

Tindakan yang telah dilakukan

1. Telah dilakukan bimbingan secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaksana baik melalui GKM maupun Bimtek.
2. Telah dilakukan briefing kepada pegawai per Bidang/Bagian setiap hari salah satunya tentang *update* informasi terkini (baik kebijakan maupun kegiatan).

Action Plan

1. Dilakukan bimbingan secara berkelanjutan terhadap seluruh pelaksana baik melalui GKM maupun Bimtek.
2. Dilakukan briefing kepada pegawai per Bidang/Bagian setiap hari salah satunya tentang *update* informasi terkini (baik kebijakan maupun kegiatan).

Definisi SS.10
Organisasi yang fit for purpose

Organisasi yang *fit for purpose* tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian

pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

16) IKU.10a-N

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internali

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal .

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Formula IKU

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan

Penjelasan target

Target IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 adalah sebesar 78 lebih tinggi 1 poin bila dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu sebesar 77, namun tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target pada Renstra 2015-2019. Karena unsur penilaian pada IKU tahun 2018 masih terurai pada 3 (tiga) IKU pada Renstra 2015-2019 yaitu 1) IKU Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai, 2) Persentase mitigasi risiko yang efektif dan 3) Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern.

Tabel.3.16.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	N/A	77	78

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-676/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat meraih peringkat ke-1 (satu) dengan nilai sebesar 97,74.

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal mendapatkan nilai sebesar 97,74 dari target 78 sehingga memperoleh capaian sebesar 120% (maksimal).

Tabel.3.16.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78	97,74	120%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian dan Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tertinggi dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 120% (maksimal) dengan realisasi 97,74 dari target 78.

Tabel.3.16.3

Tahun	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	75	85,46	113,95%
2017	77	85,51	111,05%
2018	78	97,74	120%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang ditetapkan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 realisasinya senantiasa melampaui target yang ditetapkan pada kontrak kinerja, namun bila dibandingkan dengan target pada Renstra 2015-2019 tidak dapat dilakukan karena data tidak tersedia.

Tabel.3.16.4

Tahun	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	75	85,46
2017	N/A	77	85,51
2018	N/A	78	97,74
2019	N/A		

Isu Utama

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-676/PB/2018 tanggal 28 Desember 2018 nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal memperoleh nilai 97,74 dan meraih peringkat kesatu.

Permasalahan yang dihadapi

Masih adanya para pegawai yang belum memahami secara meneyeluruh terkait peraturan tentang kode etik, gratifikasi dan pengaduan.

Tindakan yang telah dilakukan

Melakukan gugus kendali mutu terkait peraturan kode etik dan kepatuhan internal.

Action Plan

1. Penerapan Manajemen Risiko
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian internal
3. Penerapan Kode etik dan disiplin pegawai
4. Pengelolaan pengaduan

17) IKU.10b-N

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2018 (60%).
b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2017 (40%).

Formula IKU

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan target

Target IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* yang ditetapkan pada kntrak kinerja tahun 2018 adalah sebesar 81 naik 2 poin bila dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu sebesar 79 dan naik hanya 1 poin bila dibandingkan dengan target pada Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 80.

Tabel.3.17.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	80	79	81

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-668/PB/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat meraih peringkat ke-2 (dua) dengan nilai sebesar 95.

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* mendapatkan nilai sebesar 95 dari target 81 sehingga memperoleh capaian sebesar 117,28%.

Tabel.3.17.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	81	95	117,28%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* tertinggi diperoleh pada tahun 2015 yaitu sebesar 119,71% dengan realisasi 89,78 dari target 75. Sedangkan capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 117,28% dengan realisasi 95 dari target 81. Namun dilihat dari capaian realisasi dan peringkat SFO, pada tahun 2018 mendapatkan nilai realisasi paling tinggi dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya dan mendapatkan peringkat SFO terbaik kedua tingkat Kanwil.

Tabel.3.17.3

Tahun	10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	75	89,78	119,71%
2016	77	90,86	118,00%
2017	79	94,17	119,20%
2018	81	95,00	117,28%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused* tahun 2015-2018 realisasinya senantiasa melampaui target yang telah ditetapkan pada kontrak kinerja walaupun targetnya setiap tahun dinaikkan, berbeda dengan target pada Renstra 2015-2019 ditetapkan berkisar pada angka 80.

Tabel.3.17.4

Tahun	10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	75	75	89,78
2016	80	77	90,86
2017	80	79	94,17
2018	80	81	95,00
2019	80		

Isu Utama

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-668/PB/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat mendapat nilai SFO sebesar 95 dan berhasil menduduki peringkat ke 2 (dua).

Permasalahan yang dihadapi

Disamping *performance dialogue,* banyak kegiatan Kanwil dalam bulan yang sama sehingga pelaksanaan *performance dialogue* tiap bulan dapat tidak terlaksana.

Tindakan yang telah dilakukan

Telah dilaksanakan *performance dialogue* secara berkala setiap bulan dalam rangka monitoring dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target-target IKU-IKU yang telah ditetapkan.

Action Plan

Dilaksanakan *performance dialogue* atau Dialog Kinerja Organisasi secara rutin setiap bulan

Definisi SS.11
Pengelolaan Sarana dan TIK yang Optimal

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

18) IKU.11a-N

Persentase pemenuhan BMN sesuai standar

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis BMN peralatan dan mesin pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 11 (sebelas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi.

Sedangkan, sfesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.

Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendahaan, Setditjen Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit secara periodik.

Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$80\% \times \frac{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin yang tersedia}}{\text{Jumlah jenis BMN peralatan dan mesin sesuai SE-32 (11)}} + 20\% \frac{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang memenuhi spesifikasi SE-32}}{\text{Jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus terpenuhi sesuai SE-32}}$$

Hasil evaluasi dimaksud disampaikan oleh Setditjen Perbendaharaan sebagai dasar pengukuran capaian IKU Kanwil dan KPPN.

Formula IKU

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar BMN peralatan dan mesin oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan target

Target IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 sebesar 91% naik 1 poin dibandingkan dengan target tahun 2017 yaitu sebesar 90%. Namun dengan target Renstra 2015-2019 tidak dapat dilakukan perbandingan karena *wording*-nya adalah Persentase BMN dengan kondisi baik dengan target sebesar 95%.

Tabel.3.18.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	N/A	90%	91%

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-/PB.1/2018 tanggal 28 Desember 2018, Capaian IKU Standardisasi Peralatan dan Mesin memeperoleh nilai sebesar 120,72%.

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar mendapatkan nilai sebesar 120,72% dari target 91% sehingga memperoleh capaian sebesar 120% (maksimal).

Tabel.3.18.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91%	120,72%	120%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 mencapai nilai maksimal yaitu 120%.

Tabel.3.18.3

Tahun	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	N/A	N/A	N/A
2016	80%	95,69%	119,61%
2017	90%	120,63%	120,00%
2018	91%	120,72%	120,00%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Capaian kinerja IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar sejak ditetapkan pada kontrak kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 senantiasa melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 95% karena pada renstra lebih berfokus dalam mencapai persentase kondisi BMN yang baik dalam pengertian BMN dapat berfungsi beroperasi.

Tabel.3.18.4

Tahun	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	N/A	N/A	N/A
2016	N/A	80%	95,69%
2017	N/A	90%	120,63%
2018	N/A	91%	120,72%
2019	N/A		

Perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja pada RPJMN 2015-2019

IKU ini ditetapkan pada RPJMN dengan wording adalah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi dengan target sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan target RPJMN maka capaian kinerja IKU Persentase pemenuhan BMN sesuai standar selama tahun 2016-2018 masih melampaui dari target RPJMN.

Tabel.3.18.5

Tahun	RPJMN	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standarisasi*		
	Renstra	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar		
	Konkin			
	RPJMN	Renstra	Target	Realisasi
2015	90%	N/A	N/A	N/A
2016	90%	N/A	80%	95,69%
2017	90%	N/A	90%	120,63%
2018	90%	N/A	91%	120,72%
2019	90%	N/A		

Isu Utama

Jumlah peralatan dan mesin yang telah memenuhi standar tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada.

Permasalahan yang dihadapi

Keterbatasan alokasi belanja modal peralatan dan mesin membuat hambatan dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan mesin yang sesuai standar dengan jumlah pegawai yang ada.

Tindakan yang telah dilakukan

1. Telah dilaksanakan inventarisasi kebutuhan peralatan dan mesin yang ideal untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
2. Telah dilaksanakan revisi belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin secara bertahap.
3. Telah dilaksanakan kembali update penilaian pemenuhan BMN yang sesuai standar untuk periode berikutnya.
4. Telah dibuat surat permohonan permintaan pengadaan peralatan dan mesin kepada kantor pusat dan telah ditindaklanjuti oleh Kantor Pusat dengan telah mengirimkan peralatan dan mesin tersebut ke Kanwil DJPb Prov. Jabar.

Action Plan

1. Akan dilaksanakan pengadaan peralatan dan mesin sesuai hasil revisi belanja modal.
2. Berkirim surat permohonan pengiriman peralatan dan mesin ke Kantor Pusat.
3. Kantor Pusat telah memenuhi permintaan kebutuhan peralatan dan mesin ke Kanwil Jabar.

Definisi SS.12 Pengelolaan Anggaran yang Optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

19) IKU.12a-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil

Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, efisiensi, pencapaian keluaran rill, dan konsistensi:

a. Penyerapan anggaran atas pagu netto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum.
b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (pencapaian Output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian Output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak.
c. Pencapaian keluaran riil adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan.
d. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan dengan rencana penarikan dana bulanan.
   Pengukuran mengikuti SE 35 tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.
e. Nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN

Formula IKU

Capaian IKU KPA Kombinasi = 90% Realisasi IKU KPA + 10% Capaian IKPA

Keterangan :

Realisasi IKU KPA = (Penyerapan anggaran atas pagu netto x 9%) + (pencapaian keluaran riil x 32%) + (efisiensi x 42%) + (konsistensi x 17%)

Capaian IKPA = Data dari OMSPAN

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki pagu objek efisiensi, maka formula penghitungan realisasi IKU adalah : (Penyerapan anggaran atas pagu netto x 15%) + (pencapaian keluaran riil x 55%) + (konsistensi x 30%)

Penjelasan target

Target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil ditetapkan pada kontrak kinerja tahun 2018 sebesar 95% sama dengan yang ditetapkan pada tahun 2017 begitu sama dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019.

Tabel.3.19.1

IKU		Target		
		Renstra 2015-2019	2017	2018
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	95%	95%

Perhitungan dan penjelasan perolehan nilai IKU

Berdasarkan template, nilai persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil diperoleh nilai sebagai berikut:

Lampiran II
Nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendahara
Nomor: ND-10103/PB.1/2018
Tanggal: 31 Desember 2018

CAPAIAN IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
KANWIL DJPb PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN IV TA 2018

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran atas pagu neto x 9%) + (% pencapaian keluaran riil x 32%) + (% efisiensi x 42%) + (% konsistensi x 17%)

% Penyerapan anggaran atas pagu neto	100,00%	←	MAKS 100%
% Capaian keluaran riil	100,00%	←	MAKS 100%
% Efisiensi	106,55%		
% Konsistensi	95,32%	←	MAKS 100%

REALISASI IKU KPA	101,95%	X	90%	=	91,76%
CAPAIAN IKPA	99,63%	X	10%	=	9,96%
CAPAIAN IKU KPA (KOMBINASI)					101,72%

Perbandingan target dengan realisasi

Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil mendapatkan nilai sebesar 101,72% dari target 95% sehingga memperoleh capaian sebesar 107,07%.

Tabel.3.19.2

IKU 2018		Target	Realisasi	Capaian
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	101,72%	107,07%

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan beberapa tahun terakhir

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil memperoleh nilai tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 117,46% dengan realisasi 111,59% dari target 95%. Capaian IKU pada tahun 2017 nilainya tinggi karena waktu itu melakukan penghematan yang lumayan cukup banyak yaitu mendekati angka 20% dari pagu. Komponen efisiensi inilah yang banyak menyumbang nilai capaian IKU waktu itu. Pada tahun 2018 capaian IKU yang diperoleh juga sangat baik yaitu 107,07% dengan realisasi sebesar 101,72% dari target 95%. Sedangkan komponen efisiensi pada tahun 2018 berkisar pada angka 8% dari pagu.

Tabel.3.19.3

Tahun	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	
	Target	Realisasi	Capaian
2015	95%	95,94%	100,99%
2016	95%	96,77%	101,86%
2017	95%	111,59%	117,46%
2018	95%	101,72%	107,07%

Perbandingan antara capaian kinerja 2015-2018 dengan Renstra 2015-2019

Penetapan target pada kontrak kinerja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar 95% sama dengan target yang ditetapkan pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil selama 4 (empat) tahun dari 2015 sampai dengan 2018 senantiasa melampaui target yang ditetapkan.

Tabel.3.19.4

Tahun	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	
	Renstra 2015-2019	Target	Realisasi
2015	95%	95%	95,94%
2016	95%	95%	96,77%
2017	95%	95%	111,59%
2018	95%	95%	101,72%
2019	95%		

Isu Utama

Penyerapan anggaran yang sesuai rencana kegiatan/ kerja tahunan yang telah ditetapkan akan menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kinerja organisasi. Nilai capaian kinerja triwulan IV 2018 sebesar 101,72% melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95%. Semua komponen dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil telah memberikan kontribusi yang positif. Komponen yang paling besar memberikan kontribusinya adalah efisiensi yaitu sebesar 106,55%

Permasalahan yang dihadapi

Penghitungan realisasi anggaran belum dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran karena masih menunggu penerbitan SP2D GU Nihil pada awal tahun anggaran berikutnya.

Tindakan yang telah dilakukan

1. Penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebesar 100%, Capaian output sebesar 100%, Efisiensi sebesar 106,55%, dan Konsistensi sebesar 95,32%
2. Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa penggantian atap sirap telah dapat diselesaikan 100%.
3. Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi saat pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan IV 2018

Action Plan

1. Melakukan revisi anggaran guna mengantisipasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV 2018;
2. Berkoordinasi dengan Bidang-bidang dan Bagian untuk menginventarisasi komponen-komponen belanja apa saja yang dapat dilakukan efisiensi tanpa mengurangi tercapaianya output riil.
3. Memastikan semua kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dapat dilaksanakan pada triwulan IV 2018.

Capaian Inisiatif Strategis

Pada tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 (tiga) Inisiatif Strategis, sebagai berikut:

1. Penguatan Strategi Komunikasi Kanwil.
2. Peningkatan kapasitas Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*) lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar.
3. Penguasaan Strategi Koordinasi Kanwil dengan Pemerintah Daerah/ Kota.

Adapun capaian dari ketiga pelaksanaan inisiatif strategis tersebut adalah :

A. Sasaran Strategis : Organisasi yang fit for purpose
IKU : Nilai Kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

1. Inisiatif Strategis (IS) :

Penguatan Strategi Komunikasi Kanwil

Output/outcome :

Kalender kegiatan rencana aksi Strategi Komunikasi Kanwil

Target Waktu Penyelesaian : Semeseter II 2018

Status : Selesai

Keterangan :

- Telah disusun kalender kegiatan pengelolaan kinerja sebagaimana yang tercantum dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan) Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat Tahun 2018.
- Telah dilaksanakan tanda tangan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d. Five, serta penyerahan Piagam Penghargaan Pengelolaan Kinerja Terbaik pada KPPN-KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar pada sesuai Nota Dinas Nomor ND-085/ WPB.13/BG.01/2018 tanggal 29-01-2018.
- Telah ditunjuk para pengelola kinerja di Kanwil dan KPPN-KPPN untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PK di Jakarta pada tanggal 13 s.d. 16 Maret 2018 sesuai Surat Tugas Nomor ST-085/ WPB.13/BG.01/2018 tanggal 12-03-2018

- Telah dibahas permasalahan terkait Kontrak Kinerja dan manual IKU dengan KPPN-KPPN saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kanwil DJPb Prov. Jabar pada tanggal 22 s.d. 24 Maret 2018 di Hotel Grand Kamojang Garut sesuai Surat Tugas Nomor ST-118/WPB.13/BG.01/2018 tanggal 21-03-2018.
- Telah dibentuk forum komunikasi pengelolaan kinerja antara KPPN-KPPN, Kanwil dan LO pengelola Kinerja Kantor Pusat dalah wadah grup *Whatapps* Pengelola Kinerja Jabar.
- Telah dilaksanakan penyebaran kuesioner pada bulan Juni 2018 kepada para kepala KPPN dan para Pengelola Kinerja KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sebagai monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan kinerja.
- Telah dilaksanakan penyusunan reviu atas LAKIN KPPN Tahun 2017 pada bulan Mei Tahun 2018
- Telah dilaksanakan asistensi/ pendampingan pengelolaan kinerja bersama dengan dilaksanakannya Pembinaan dan Supervisi KPPN oleh Bidang SKKI serta pendampingan Zona Integritas WBK/WBBM, meliputi :
  1. KPPN Tasikmalaya
  2. KPPN Garut
  3. KPPN Karawang
  4. KPPN Sukabumi
  5. KPPN Cirebon
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi PK Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2018 di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
- Telah dilakukan Monitoring *Upload* Dokumen Pengelolaan Kinerja melalui Aplikasi Fitur *Upload Performance* PbnOpen pada KPPN-KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar sesuai Surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Jabar Nomor S-1055/WPB.13/BG.0104 /2018 tanggal 12 September 2018

B. Sasaran Strategis : Pembinaan yang berkesinambungan

IKU : Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

2. Inisiatif Strategis (IS) :

Peningkatan kapasitas Pembina Pengelola Perbendaharaan (*Treasury Management Representative*) lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar

Output/outcome :

Forum Komunikasi TMR dan Standar Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Target Waktu Penyelesaian : Semester I 2018

Status : Selesai

Keterangan :

- Telah dilakukan inventarisasi TMR yang ada di lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar.
- Telah dikoordinasikan dengan Bidang SKKI selaku bidang yang menangani kompilasi laporan TMR lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat.
- Telah dilaksanakan Forum Group Discussion (FGD) TMR lingkup Kanwil DJPb Prov. Jabar di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.

.

C. Sasaran Strategis : Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

IKU : Nilai Kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GPS) tingkat wilayah

3. Inisiatif Strategis (IS) :

Penguasaan Strategi Koordinasi Kanwil dengan Pemerintah Daerah/ Kota

Output/outcome :

Workshop dengan Pemda/ Pemkot

Target Waktu Penyelesaian: Semester I 2018

Status : Selesai

Keterangan :

- Telah dilaksanakan workshop dengan pemda/ pemkot pada bulan Juni 2018 untuk membahas peningkatan kualitas penyusunan GFS.

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaaan Provinsi Jawa Barat TA 2018

Berdasarkan data per 8 Januari 2018 dengan menggunakan *online monitoring* SPAN, realisasi penyerapan DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018 untuk semua jenis belanja sebesar Rp7.883.386.731 atau mencapai 92,43% dari total pagu sebesar Rp8.528.721.000. Penyerapan DIPA tahun 2018 ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 84,22% (naik 8,21%).

Seluruh kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2018, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp1.202.286.000 (95,63% dari pagu sebesar Rp1.257.259.000), belanja barang mencapai sebesar Rp6.439.965.731 (91,87% dari pagu sebesar Rp7.010.115.000), dan belanja modal sebesar Rp241.135.000 (92,27% dari pagu sebesar Rp261.347.000). Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2016-2018 dapat ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Perbandingan pagu dan realisasi per jenis belanja tahun 2016-2018

Tabel.3.4.

Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jabar TA 2016-2018 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun 2016		
	Pagu (Rp)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.036.479.000	8.912.855.509	98,63
Belanja Barang	7.355.635.000	6.728.122.766	91,47
Belanja Modal	443.146.000	430.218.000	97,08
Total	16.835.260.000	16.071.196.275	95,46
Jenis Belanja	Tahun 2017		
	Pagu (Rp)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.731.012.000	1.334.714.000	97,35
Belanja Barang	6.642.693.000	5.371.713.116	80,87
Belanja Modal	347.910.000	336.086.100	96,60
Total	8.361.615.000	7.042.513.216	84,22
Jenis Belanja	Tahun 2017		
	Pagu (Rp)	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.257.259.000	1.202.286.000	95,63
Belanja Barang	7.010.115.000	6.439.965.731	91,87
Belanja Modal	261.347.000	241.135.000	92,27
Total	8.528.721.000	7.883.386.731	92,43

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di atas persentase penyerapan DIPA secara keseluruhan turun naik yaitu pada tahun 2017 mengalami penurunan 11,24% dari tahun 2016 (95,46%) ke tahun 2017 (84,22%), dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 8,21% dari tahun 2017 (84,22%) ke tahun 2018 (92,43%). Kenaikan yang signifikan terjadi pada belanja barang yaitu sebesar 11% dari tahun 2017 (80,87%) ke tahun 2018 (91,87%). Namun untuk kedua Belanja yang lainnya mengalami sedikit penurunan. Belanja Pegawai menurun sebesar 1,72% dari tahun 2017 (97,35%) ke tahun 2018 (95,63%). Dan Belanja Modal menurun sebesar 4,33% dari tahun 2017 (96,60%) ke tahun 2018 (92,27%).

Perbandingan pagu dan realisasi belanja unit tahun 2018 per kegiatan/output

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat per Kegiatan/output

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat melaksanakan 4 (empat) Kegiatan/output. Adapun realisasi DIPA atas 4 (empat) kegiatan/output tersebut pada tahun 2018 ditunjukkan pada tabel di

bawah ini:

Tabel.3.5

Perbandingan pagu dan realisasi per kegiatan/output

Kode	Kegiatan/output	Pagu	Realisasi	%
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah				
1706.003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah	465.215.000	365.473.166	78,56
1706.009	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	1.371.360.000	1.130.959.839	82,47
1706.951	Layanan Internal (Overhead)	380.717.000	348.953.500	91,66
1706.994	Layanan Perkantoran	6.311.429.000	6.037.963.226	95,67
	Total	8.528.721.000	7.883.349.731	92,43

Sebagaimana ditunjukkan Tabel di atas presentase untuk kegiatan/output 1706.003 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah hanya mencapai 78,56%, paling kecil dibandingkan dengan 3 (tiga) kegiatan/output lainnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32 /MK.01/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian *Output* Belanja di Lingkungan Kementerian, efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (pencapaian *output*-nya lebih besar atau sama dengan 100%).

Seiring perkembangan dengan kebijakan Program Go Green, cakupan efisiensi tidak terbatas pada Kontrak/ Belanja Modal tapi juga berkembang pada efisiensi belanja operasional dan/atau non operasional perkantoran serta belanja langganan daya dan jasa sepanjang tidak mengurangi kinerja dan capaian output yang telah ditetapkan pada RKAKL DIPA. Untuk mengakomodasi efisiensi tersebut Menteri Keuangan memperbaharui SE-32/MK.01/2015 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-35/MK.01/2017 tentang Tata Cara Penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Pelaksanaan kebijakan penghematan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap ketiga jenis belanja, baik pada belanja pegawai, belanja barang serta belanja modal. Pelaksanaan efisiensi Belanja Pegawai terjadi pada kegiatan lembur yang selektif yaitu terhadap pekerjaan yang mendesak yang harus segera diselesaikan dan penghematan yang terjadi pada belanja uang makan. Untuk

penghematan belanja uang makan diperoleh dari pembayaran uang makan pegawai yang tidak full sebulan sebagai konsekuensi pegawai yang bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas.

Penghematan pada belanja barang terjadi pada belanja perjalanan dinas, langganan daya dan jasa (listrik, telpon, air, internet), biaya pemeliharaan dan biaya operasional kantor sehari-hari.
Sedangkan untuk penghematan pada belanja modal terjadi karena terdapat sisa belanja modal yang timbul selisih dari biaya penawaran pengadaan barang/jasa. Berapa besaran penghematan dana pada biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.6

Obyek penghematan/efisiensi

No	Obyek Penghematan	Pagu	Sisa Pagu / Hasil Efisiensi	%
1	Perjalanan Dinas	1.536.216.000	185.346.381	12,07
2	Kudapan dan Makan Siang Rapat	394.254.000	63.913.230	16,21
3	Langganan Daya dan Jasa	357.355.000	60.763.846	17,00
4	Pengadaan Barang/Jasa	287.347.000	20.822.900	7,25
5	Belanja Operasional	2.262.005.000	169.825.140	7,51
6	Belanja Non Operasional	536.645.000	34.103.455	6,35
7	Belanja Jasa lainnya	19.400.000	1.300.000	6,70
8	Belanja Pemeliharaan	1.878.240.000	45.359.317	2,41
	Total Hasil Efisiensi	7.271.462.000	581.434.269	8,00

Berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan, capaian yang diperoleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun lalu.

Pada tahun 2018 capaian SMART memperoleh nilai sebesar 85,98 naik sebesar 0,69 dibandingkan tahun 2017 (85,29). Perbandingan data capaian SMART tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: (data berdasarkan dari aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id/ SMART) sebagai berikut:

Tabel.3.7

Capaian kinerja berdasarkan SMART tahun 2016-2018

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
• Penyerapan Anggaran	95,46	84,22	92,43
• Konsistensi RPD awal	100	44,17	75,83
• Konsistensi RPD Revisi	100	100	98,92
• Capaian Output	100	100	100
• Hasil Efisiensi *)	4,54	15,78	7,57
Kinerja	**91,50**	**85,29**	**85,98**

Data diambil dari aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id/SMART

C. KINERJA LAINNYA

Selain 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2018 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Secara garis besar kinerja lainnya dibagi dalam 4 (empat) aspek yaitu Inovasi manajemen/pelayanan, Inisiatif pemberantasan korupsi, Penghargaan dan Capaian tahun 2018 lainnya. Keempat aspek kinerja lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

INOVASI MANAJEMEN/ PELAYANAN

1. INOVASI MANAJEMEN/ PELAYANAN

1) **JAKA MANTRA DENGAN EWS**(Sistem Jaringan Komunikasi Antar Mitra)

a. EARLY WARNING SYSTEM (EWS)

Peringatan Dini kepada Satker melalui notifikasi 5 (lima) hari kalender sebelum jatuh tempo atas :

- Uang Persediaan (UP)/TambahanUang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan , dan
- Rencana Penarikan Dana (RPD) yang belum diajukan SPM-nya

Contoh EWS TUP : Contoh EWS UP : Contoh EWS RPD :

Gambar.3.1

b. NOTIFIKASI PENYELESAIAN DISPENSASI SPM AKHIR TAHUN

Contoh Notifikasi Dispensasi : Aplikasi akan memberikannotifikasi ke Satker terkaitpenyelesaian surat dispensasipengajuan SPM akhir tahun. Satker tidak perlu mengambil surat tersebut namun memperlihatkan notifikasi keKPPN untuk diproses pengajuanSPMnya.

2) **Si Adon** (Sistem Pengaduan Online)

Gambar.3.2

Saluranpengaduanyang dapat dipergunakan oleh satker terkaitlayanan yangditerima. Pengaduan tersebut dikirim keKPPN/Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara online.

3) **Si JaKKi** (Sistem Jaringan Kompetensi Pegawai Kanwil-KPPN)

Gambar.3.3

adalah Aplikasi untuk memetakan kompetensi pegawai di setiap Seksi di Kanwil dan KPPN dengan database terpusat di Kanwil. Selain itu juga untuk mendata

kebutuhan bimtek pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi di setiap seksi.

4) **Si Pinter** (Sistem Pengendalian Internal)

Gambar.3.4

Adalah Aplikasi untuk membuat laporan pengaduan yang masuk yang melalui media telepon, email, pesan singkat, tatap muka dan media massa dan laporan pengendalian gratifikasi Inovasi Kanwil DJPB Prov. Jawa Barat.

5) **SEMAR** (Aplikasi Sistem Eletronik Manajemen Risiko)

Gambar.3.5

Aplikasi yang database terpusat di Kanwil membantu dalam pembuatan laporan Manajemen Risiko baik di Kanwil maupun KPPN. Dengan database terpusat di Kanwil akan memudahkan pemantauan dalam pembuatan laporan.

6) **Unit Revisi Cepat** (URC)

Unit RevisiCepat (URC) adalah inovasi yang dikembangkan oleh KanwilDJPB

Prov.Jawa Barat untuk mempercepat proses penyelesaian revisi DIPA yang biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung antar petugas revisi DIPA Satker dengan petugas FO revisi Kanwil.

Gambar.3.6

URC menggunakan kendaraan yang dimodifikasikhusus untuk melayani penerimaan berkas revisi yang menjadi kewenangan Kanwil dan petugas revisi dari pegawai Bidang PPA 1, Bagian Umum dan Bidang PAPKuntuk konsultasi e-rekon. Melalui URC penerimaan berkas revisi DIPA satker dapat dilakukan. Proses penerimaan berkas sangat simple jika dokumen diterima dalam keadaan lengkap dan benar, proses selanjutnya adalah upload ADK revisi ke dalam sistem aplikasi custom web SPAN kemudian proses approval serta posting hinggapenerbitan surat pengesahan revisi DIPA dari Kanwil.

7) Silih Emutan

Gambar.3.7

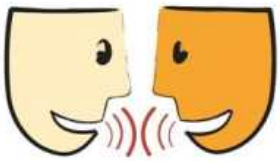

Silih Emutan artinya saling mengingatkan merupakan inovasi untuk mengingatkan dan memotivasi para pegawai yang dikemas dalam bentuk siaran dengan nama program Silih Emutan. Silih Emutan dilakukan melalui sarana radio dwi warna yang tayang setiap pukul 7.45 sampai selesai. Program acara silih emutan berisi materi antara lain integritas, motivasi, ajaran agama secara umum, peraturan terkait kepegawaian dan isu-isu strategis lainnya seperti kode etik, kedisiplinan, kepatuhan, pengendalian internal, benturan kepentingan, Whistle Blowing System, Motivasi dan informasi terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya silih emutan berkembang menjadi sarana informasi lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat.

8) Taman Anti Gratifikasi

Taman Anti Gratifikasi adalah taman yang dibuat di dalam maupun di luar ruangan dengan tujuan mengingatkan pegawai/stakeholder untuk selalu mendukung anti gratifikasi selain sebagai fungsi memperindah kantor :

- Taman Di dalam ruangan, terutama ditujukan kepada pegawai Internal Kanwil DJPBN agar selalu menolak segala pemberian dalam bentuk apapun yang

terkait dengan pelayanan yang diberikan.

Gambar.3.8

- Taman di luar ruangan, mengingatkan kepada stakeholder Kanwil agar tidak memberikan sesuatu kepada pegawai Kanwil atas semua layanan yang diberikan.

9) Antrian Online

Pada tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengembangkan inovasi baru yaitu Antrian Online. Tujuan dari inovasi ini adalah memberikan kepastian waktu bagi satuan kerja untuk mendapatkan antrian dan pelayanan. Berbeda dengan sistem antrian yang manual dimana satuan kerja setelah mengambil nomor antrian tapi harus menunggu lama jam berapa nomor antriannya dipanggil dan dilayani. Inovasi ini juga sangat bermanfaat bagi satuan kerja yang wilayah geografisnya jauh dari kanwil karena satker sudah tahu kapan dan jam berapa harus sudah datang ke Kanwil.

10) Si JIMAT (Surat Ijin Meninggalkan Tempat)

Surat Ijin dari atasan ketika pegawai meninggalkan tempat sering kali tidak menjadi perhatian bagi pegawai ketika pegawai meninggalkan tempat kerja. Para pegawai kadang mengabaikan membuat surat ijin tersebut sebelum ijin tetapi dibuat setelahnya. Untuk membantu permasalahan tersebut maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mengembangkan aplikasi Si JIMAT ini untuk mempermudah pemberitahuan ijinnya melalui aplikasi.

11) Inovasi Lainnya

Inovasi lain dalam upaya memberikan kesempurnaan pelayanan kepada stakeholder :

a. Penerbitan / Penyempurnaan SOP.

b. Penempelan Stiker Biaya Nol Rupiah (Gratis)
c. Pelaksanaan coaching dan conseling untuk memastikan tercapainya kinerja dan pengembangan pegawai.
d. Penandatanganan kerja sama penggunaan SIKP.
e. Co Location/ Layanan Bersama Kementrian Keuangan (DJKN dan LPSE) dandiperluas dengan PT. Taspen.
f. Forum Komunikasi PNBP.
g. Layanan Pemda pada *Front Office.*

Inisiatif Pemberantasan Korupsi

2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-1251 PB/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti WBK/WBBM Tahun 2018, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan dan pada tahun 2018 berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPANRB.

Tahapan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen perubahan di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat yang bertujuan meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
2. Melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan melakukan deklarasi oleh seluruh pimpinan dan pegawai dan perwakilan Satker bahwa Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat telah siap membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dalam bentuk penandatanganan dokumen Pakta Integritas pada tanggal 10 Februari 2018.
3. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan kepada seluruh pegawai Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan Satuan kerja mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
4. Membangun budaya kerja dan pola pikir di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan menjadikan pimpinan sebagai *role model* dan melibatkan seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM untuk memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan mengatasi kendala atau permasalahan selanjutnya dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas.
6. Melaksanakan pendokumentasian secara lengkap, rapi dan menggunakan aplikasi terhadap dokumen-domunen pada semua komponen yaitu komponen manajemen

perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan yang terakhir komponen peningkatan kualitas pelayanan publik.

Piagam Penghargaan

3. PENGHARGAAN

1) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat meraih perdikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari MenPANRB;
2) Pemenang Pertama Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

Gambar.3.9

3) Peringkat Pertama Rata-rata Nilai Kinerja KPPN Sebagaimana Hasil Pembinaan dan Supervisi Kanwil dari Direktur Jenderal Perbendaharaan;
4) Peringkat Kedua Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat Kantor Wilayah Tahun 2018 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
5) Peringkat Kedua Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

4. CAPAIAN TAHUN 2018 LAINNYA

Sebagai cikal bakal Museum Treasury, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah membangun Museum Perbendaharaan. Berbagai koleksi yang berasal dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat maupun dari KPPN di lingkup Provinsi Jawa barat telah dikumpulkan. Melalui bantuan Kantor Pusat barang-barang koleksi semakin bertambah karena adanya kiriman barang dari Kanwil dan KPPN di seluruh Indonesia.

Visi Museum Perbendaharaan:

“Menjadi sumber informasi, edukasi publik, serta sarana apresiasi sejarah perbendaharaan negara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan, profesional, dan akuntabel”

Sedangkan Misi yang akan diraih adalah:

1. Mewujudkan museum sebagai informasi pendidikan, dan dokumentasi sejarah pelaksanaan perbendaharaan di Indonesia.
2. Mewujudkan museum sebagai pusat pengemangan dan penelitian pelaksanaan perbendaharaan di Indonesia.
3. Mewujudkan museum sebagai sarana rekreasi edukatif di bidang perbendaharaa

Museum terbuka bagi siapa saja baik bagi para pelajar/ mahasiswa, pegawai negeri/ swasta, serta masyarakat umum yang ingin mengetahui dan mempelajari tentang keuangan, khususnya di bidang perbendaharaan secara lebih mendalam. Disamping

itu museum perbendaharaan juga berfungsi sebagai wahana rekreasi edukatif yang berkualitas karena ada penayangan film-film edukasi. Jadwal kunjungan Museum Perbendaharaan adalah setiap hari Sabtu, Minggu, dan Senin dari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB dan tidak dipungut biaya/ gratis.

Gambar.3.10

Pada tahun 2017, Museum Perbendaharaan telah resmi dibuka untuk umum oleh Bapak Haryana, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Dan pada bulan Desember tahun 2018, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menyempatkan diri untuk berkunjung ke Museum Perbendaharaan di sela acara padatnya di Bandung. Dalam kunjungannya Beliau sangat memberikan apresiasi yang tinggi atas berdirinya museum ini. Beliau berpesan agar museum ini dirawat dengan sebaik-baiknya dan terus menyempurnakan koleksi-koleksinya.

BAB IV

PENUTUP

- Simpluan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi
- Langkah Perbaikan di masa yang akan datang

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil Dtjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam tahun anggaran 2018 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan hasil nilai yang sangat baik. Secara umum kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 110,39% (sangat baik).
b. Dari total 19 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikuit:
    1. Capaian IKU yang hasilnya sama dengan target sebanyak 1 (satu) IKU;
    2. Capaian IKU yang hasilnya melampaui target sebanyak 14 (empat belas) IKU;
    3. Capaian IKU yang mendapatkan hasil maksimal yaitu 120% sebanyak 4 (empat) IKU.
c. Selain terpenuhinya target-target tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 juga mendapatkan prestasi-prestasi yang membanggakan, yaitu:
    1. Penghargaan sebagai Unit yang memperoleh Sertifikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari Kementerian Men PAN-RB, dan satu-satunya kanwil yang memperoleh sertifikat tersebut dari 34 kanwil lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
    2. Peringkat Terbaik Satu untuk Nilai kinerja pembinaan dan supervisi Kanwil.
    3. Peringkat Terbaik Satu untuk Pelaksanaan tugas kepatuhan internal.
    4. Peringkat Terbaik Kedua untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W.
    5. Peringkat Terbaik Kedua untuk Pengelolaan Kinerja berbasis SFO.

d. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat mempunyai satu-satunya yang mempunyai museum Perbendaharaan tingkat nasional. Keberadaan Museum Perbendaharaan tersebut juga telah mendapatkan sertifikat dari pemerintah daerah provinsi Jawa Barat sehingga masuk sebagai sarana wisata edukasi baik untuk para pelajar maupun masyarakat umum.

Langkah perbaikan di masa yang akan datang

Meskipun realisasi seluruh IKU telah berhasil mencapai target, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan terus berusaha dan berupaya mempertahankan kinerja-kinerja yang sudah sangat baik serta meningkatkan kinerja yang belum optimal..

Pada tahun 2018, terdapat 2 (dua) IKU yang kinerjanya walaupun telah melampaui target namun terdapat potensi untuk dapat ditingkatkan lebih maksimal, yaitu:

1. Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil dengan realisasi 97,39 dari target 93.
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil dengan realisasi 4,61 dari target 4,52.

Adapun langkah-langkah perbaikan untuk masa yang akan datang terhadap kinerja ketiga IKU tesebut adalah:

1. Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil
   a. Dalam rangka menghadapi atas kebijakan-kebijakan perpanjangan waktu terkait pertanggungjawaban Uang Persediaan, Revisi DIPA dan Hibah maka dilakukan koordinasi yang lebih intensi baik dengan Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan, KPPN maupun dengan satuan kerja.
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua transaksi yang telah disajikan dalam aplikasi OMSPAN dan segera menindaklanjuti apabila menemukan data yang dirasa memerlukan penanganan lebih lanjut. Hal ini untuk menjaga keakurasian dan kevalidan data dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil
   a. Meningkatkan kompetensi dan kedisiplinan para pegawai.
   b. Mengusahakan semua bentuk layanan dengan cara yang cepat dan tanggap serta dapat memberikan solusi yang tepat bila menemukan permasalahan.
   c. Membuat call center yang mudah untuk dihubungi oleh satuan kerja, seperti akun media sosial, sms, email dan telepon.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Direktur Jenderal Perbendaharaan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dan untuk seluruh jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA (LAKIN)
KANWIL DJPb PROV. JAWA BARAT
TAHUN 2018

1. Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Tahun 2018
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
3. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018
4. Tabel Renstra 2015-2019
5. Tabel RPJMN 2015-2019 Bagian anggaran 15.08
6. Kalender Kegiatan Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 2018
7. RKAKL DIPA Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat 2018

KONTRAK KINERJA
NOMOR: 22/PB/2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

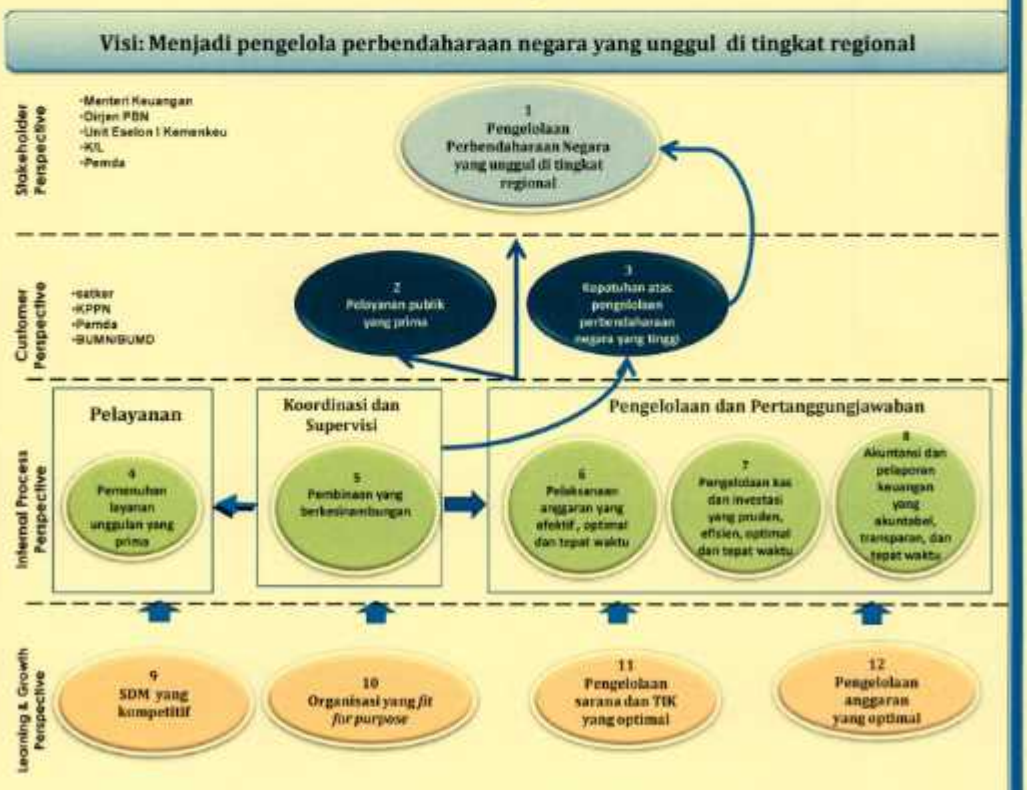

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80%
		1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	87
		1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	93
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,52 (skala 5)
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Pembinaan yang berkesinambungan	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90
		5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	85
		5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	90%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	87
		6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	70
7.	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%
		7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75
8.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	75
9.	SDM yang kompetitif	9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77
10.	Organisasi yang *fit for purpose*	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78
		10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	81
11.	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91%

12.	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah	Rp 9.394.281.000,-

Bandung, 31 Januari 2018

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Marwanto Harjowiryono
NIP 19590606 198312 1 001

Kepala Kantor Wilayah,

Yuniar Yanuar Rasyid
NIP 19590211 198101 2 001

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
I	**Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional**							
1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	-	87	87	-	87	87	87
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkatKanwil	-	-	-	-	-	93	93
II	**Pelayanan publik yang prima**							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	-	4,52	4,52	-	4,52	-	4,52
III	**Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi**							
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
IV	**Pemenuhan layanan unggulan yang prima**							
4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V	**Pembinaan yang berkesinambungan**							
5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	-	90	90	-	90	90	90
5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	85	85	-	85	85	85
5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	25%	40%	40%	70%	70%	90%	90%
VI	**Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu**							
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	-	87	87	-	87	87	87

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	70	70	70	70	70	70	70
VII	**Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, optimal dan tepat waktu**							
7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	-	75	75	-	75	75	75
VIII	**Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu**							
8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	-	-	-	-	-	75	75
IX	**SDM yang kompetitif**							
9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	-	-	-	-	-	77	77
X	**Organisasi yang *fit for purpose***							
10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	78	78
10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	-	-	-	-	-	81	81
XI	**Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal**							
11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	-	70%	70%	-	70%	91%	91%
XII	**Pengelolaan anggaran yang optimal**							
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	12%	29%	29%	60%	60%	95%	95%

Bandung, 31 Januari 2018
PNS yang dinilai,

Yuniar Yanuar Rasyid
NIP 19590211 198101 2 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Marwanto Harjowiryono	1	Nama	Yuniar Yanuar Rasyid
2	NIP	19590606 198312 1 001	2	NIP	19590211 198101 2 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IV/e	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d
4	Jabatan	Direktur Jenderal Perbendaharaan	4	Jabatan	Kepala Kanwil
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L		80%	100	12 bln	
2	Mewujudkan nilai Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil yang berkualitas		87	100	12 bln	
3	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil yang berkualitas		93	100	12 bln	
4	Memenuhi kepuasan satker terhadap layanan Kanwil		4,52 (skala 5)	100	12 bln	
5	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal		98%	100	12 bln	
6	Mewujudkan penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker secara tepat waktu		100%	100	12 bln	
7	Mewujudkan KPPN yang mendapatkan nilai kinerja baik sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil		90	100	12 bln	
8	Mewujudkan edukasi dan komunikasi yang efektif		85	100	12 bln	
9	Mewujudkan tingkat implementasi aplikasi SAKTI		90	100	12 bln	
10	Mewujudkan nilai laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil yang berkualitas		87	100	12 bln	
11	Mewujudkan rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN		70	100	12 bln	
12	Mewujudkan rencana penarikan dana satker yang akurat		88%	100	12 bln	

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
13	Melaksanakan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program secara berkualitas		75	100	12 bln	
14	Mewujudkan nilai Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas		75	100	12 bln	
15	Mewujudkan nilai rata-rata *hard competency* pegawai Kanwil yang baik		77	100	12 bln	
16	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal		78	100	12 bln	
17	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*		81	100	12 bln	
18	Memenuhi BMN sesuai standar		91%	100	12 bln	
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil		95%	100	12 bln	Rp 9.394.281.000

Bandung, 31 Januari 2018

Pejabat Penilai,

Marwanto Harjowiryono
NIP 19590606 198312 1 001

PNS yang dinilai,

Yuniar Yanuar Rasyid
NIP 19590211 198101 2 001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
1.	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	Penguatan Strategi Komunikasi Kanwil	Kalender kegiatan rencana aksi Strategi Komunikasi Kanwil	Semester I Tahun 2018	Bagian Umum	Rp 25.000.000
2.	Indeks edukasi dan komunikasi	Peningkatan kapasitas Pembina Pengelola Perbendaharaan (Tresury Management Representative) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Forum Komunikasi TMR dan Standar Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat	Semester I Tahun 2018	Bidang PPA I	Rp 10.000.000
3.	Nilai Kualitas Laporan Government Finance Statistik (GFS) tingkat wilayah	Penguasaan Strategi Koordinasi Kanwil dengan Pemda	Workshop dengan Pemda	Semester II Tahun 2018	Bidang PAPK	RP 24.550.000

Bandung, 31 Januari 2018

PNS yang dinilai,

Yuniar Yanuar Rasyid
NIP 19590211 198101 2 001

RENCANA KERJA TAHUNAN

UNIT ORGANISASI ESELON II : KANWIL DJPb PROV. JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2018

SASARAN STRATEGIS (SS)		KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80%
		1b-N	NilaikualitasLaporanKajianFiskal Regional Kanwil	87
		1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	93
2	Pelayanan publik yang prima	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,52 (skala 5)
3	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%
4	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
5	Pembinaanyang berkesinambungan	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90
		5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	85
		5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	90%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a-N	NilaikualitaslaporanreviupelaksanaananggaranKanwil	87
		6c-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada	70

			KPPN	
7	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%
		7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75
8	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N	Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	75
9	SDM yang kompetitif	9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77
10	Organisasi yang *fit for purpose*	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78
		10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	81
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

Bandung, 31 Januari 2018
Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat

Rizki Taufanto Karipany

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON II : KANWIL DJPb PROV. JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2018

SASARAN STRATEGIS (SS)		KODE IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	80%	91,28%	114,10%
		1b-N	Nilaikualitas LaporanKajianFiskal Regional Kanwil	87	92,96	106,85%
		1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	93	97,39	104,72%
2	Pelayanan publik yang prima	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,52 (skala 5)	4,61	101,99%
3	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98%	99,68%	101,71%
4	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
5	Pembinaanyang berkesinambungan	5a-N	Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	90	96,54	107,27%
		5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	85	88,14	103,69%
		5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	90%	100%	111,11%
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a-N	Nilaikualitas laporanreviupelaksanaananggaranKanwil	87	93,25	107,18%
		6c-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	70	96,54	120%

7	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	88%	95,09%	108,06%
		7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	75	100	120%
8	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N	Nilai kualitas Laporan *Govemment Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	75	86,09	114,79%
9	SDM yang kompetitif	9a-N	Nilai rata-rata *hard competency* pegawai	77	92	119,48%
10	Organisasi yang *fit for purpose*	10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78	97,74	120%
		10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*	81	95	117,28%
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N	Persentase pemenuhan BMN sesuai standar	91%	120,72	120%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	101,72%	107,07%

Bandung, 31 Januari 2018
Plt. Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat

Rizki Taufanto Karipany

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan, telah disusun 12 (duabelas) tujuan dan telah dilengkapi dengan 12 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 15
Target Kinerja 2015-2019

No	Tujuan/ SS	Indikator Kinerja	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	UIC
1.	Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L. serta mewujudkan kualitas penyusunan Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen Perbendaharaan							
	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L	0%	75%	75%	80%	80%	PPA I
		Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	80	80	80	80	80	PPA II
		Nilai kualitas LK BUN tingkat kanwil	92	92	92	92	92	PAPK
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada mitra kerja							
	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,06	4,09	4,09	4,09	4,09	PPA I PAPK
3.	Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi/konfirmasi seluruh UAPPA-W lingkup wilayah kerjanya							
	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepatuhan pengguna layanan	3	0	0	0	0	PAPK
4.	Mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar selalu mengedepankan pelayanan prima							
	Pelayanan Prima	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	PPA I

5.	Mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker							
	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker yang akurat	15%	15%	15%	15%	15%	PPA I
		Persentase rekonsiliasi *outstanding* pinjaman yang andal dan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	PPA II
6.	Mewujudkan laporan reviu pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta efektivitas laporan pembinaan adalah Pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal							
	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	75	75	75	75	75	PPA I
		Indeks ketepatan waktu laporan pembinaan BLU	3	3	3	3	3	PPA I
7.	Meningkatkan efektivitas penyusunan GFS regional oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan							
	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	Indeks ketepatan waktu Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah	3	3	3	3	3	PAPK
8.	Meningkatkan efektivitas penyusunan GFS regional oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan							
	Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan	Nilai laporan pembinaan kanwil yang berkualitas	75	75	75	75	75	SKKI
9.	Meningkatkan kompetensi dan integritas para pegawai							
	SDM yang profesional dan berintegritas	Persentase pegawai yang mendapatkan nilai *hard competency* baik	90	90	90	90	90	ESL III KANWIL
		Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai	95	95	95	95	95	SKKI, BAG UMUM
10	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penanganan risiko , pelaksanaan							

	pengelolaan dan pemantauan pengendalian intern							
	Organisasi sehat yang berkinerja tinggi	Persentase mitigasi risiko yang efektif	45%	0	0	0	0	SKKI
		Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern	80	85	85	85	85	SKKI
		Nilai kualitas pengelolaan kinerja	75	80	80	80	80	UMUM
11	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana BMN yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil							
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Persentase Barang Milik Negara dengan kondisi baik	95%	95%	95%	95%	95%	BAG UMUM
12	Mengoptimalkan pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan pencapaian output							
	Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Kanwil	95%	95%	95%	95%	95%	BAG UMUM

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan membutuhkan sumber pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, indikasi kebutuhan pendanaan sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Kebutuhan Pendanaan 2015-2019

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam ribuan rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	193.368	193.368	202.842	212.782	223.208
2.	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	98.000	98.500	102.802	107.839	113.123
3.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi	14.500	14.500	15.210	15.955	16.737
4.	Pelayanan Prima	169.173	169.173	169.173	169.173	169.173
5.	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	68.013	68.013	71.345	74.841	78.508

6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal	545.183	545.183	571.896	599.919	629.315
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	185.132	185.132	194.203	203.719	213.701
8.	Pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan	511.880	511.880	536.962	563.273	590.873
9.	SDM yang professional dan berintegritas	22.334	21.840	21.504	20.496	20.496
10	Organisasi sehat yang berkinerja tinggi	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	2.363.746	2.600.120	2.860.132	3.146.145	3.460.760
12	Pengelolaan anggaran yang optimal	173.320	173.320	173.320	173.320	173.320
Total		**4.350.649**	**4.587.029**	**4.925.389**	**5.293.462**	**5.695.214**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Milyar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
				Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Dapat Memberikan Fasilitasi Terbaik Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan, Sesuai Dengan Standar Internasional	*Persentase rumusan masukan untuk kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai*	80%	80%	80%	80%	80%	-
015	05	1685	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal								**46,7**
				Peningkatan kepercayaan terhadap kinerja dan citra DJBC	*Indeks penyelesaian rumusan peraturan di bidang kepatuhan internal*	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	3 (Skala 4)	-
					Rata-rata persentase tingkat efektivitas kegiatan monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	85%	85%	85%	85%	-
015	**08**		**Program Pengelolaan Perbendaharaan negara**								**7.414,2**
				Meningkatkan pengelolaan perbendaharaan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan.	*Persentase (%) penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja K/L*						-
					Jumlah penerimaan dari pengelolaan kas.						-
					Persentase Akurasi Perencanaan Kas berdasarkan CPIN						-
					Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman						-
					Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN secara tepat waktu						-

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Milyar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
					Jumlah LK-KL dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK						-
					Indeks kepuasan pengguna layanan						-
015	08	1698	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran								**149,6**
				Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Negara	*Indeks Penyelesaian UU PPAFBN Secara Tepat Waktu*	3	3	3	3	3	-
					Indeks Jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan Opini Audit yang Baik	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	-
					Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-
015	08	1699	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran								**40,9**
				Menjamin Kelancaran Pelaksanaan Apbn	*Persentase Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L*	91%	91%	91%	91%	91%	-
					Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan revisi Pelaksanaan Anggaran dan Spending Review	3	3	3	3	3	-
					Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi terkait Pelaksanaan Anggaran	80 (efektif)	80 (efektif)	85 (sangat efektif)	85 (sangat efektif)	90 (sangat efektif)	-
015	08	1700	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum								**30,9**
				Mewujudkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Secara Efektif dan Efisien Oleh Satker Blu Sehingga Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanannya Kepada Masyarakat	*Persentase Satker BLU yang Kinerjanya Baik*	90%	90%	90%	90%	94%	-

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Milyar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
					Persentase Penyelesaian Rancangan Penetapan Satker BLU	100%	100%	100%	100%	100%	-
					Persentase Satker BLU yang Menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	-
015	08	1701	Peningkatan Pengelolaan Kas negara								**1.164,3**
				Optimalisasi Idle Cash Pemerintah Menutup Cost Of Fund Pemerintah Dalam Pembiayaan Defisit Apbn	*Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas*	2,6 T	3 T	3,4 T	3,9 T	4,5 T	-
					Persentase Akurasi Perencanaan Kas berdasarkan CFTN	95%	95%	95%	95%	95%	-
015	08	1702	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman								**345,7**
				Mengoptimalkan Penerimaan APBN Hasil Penerusan Pinjaman Sehingga Mampu Mendukung Pengelolaan Keuangan Negara yang Berkelanjutan	*Persentase Pencapaian target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman dari Penerusan Pinjaman dan Hasil dari Restrukturisasi Penerusan Pinjaman*	90%	90%	90%	90%	90%	-
					Persentase Penyediaan Dana Investasi Pemerintah, Penerusan Pinjaman, Kredit Program dan Pembiayaan Lainnya yang Disetujui secara Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	-
015	08	1703	Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan								**85,8**
				Tersedianya sistem perbendaharaan yang mudah dan akuntabel serta sesuai dengan kebijakan pengelolaan perbendaharaan negara hasil stakeholder	*Tingkat Penyelesaian Harmonisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan sesuai dengan Penyelesaian Permasalahan dan Perkembangan Proses Bisnis*	95%	95%	95%	95%	95%	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KODE			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Milyar)
KL	PROG	KEG				2015	2016	2017	2018	2019	
					Persentase Jumlah Sistem Perbendaharaan yang Dihasilkan sesuai dengan Kebutuhan Stakeholders	97%	97%	97%	97%	97%	-
					Persentase jumlah peserta diklat yang lulus ujian sertifikasi Penyusun Perbendaharaan	85%	85%	85%	85%	85%	-
015	08	1704	Pengembangan Sistem Perbendaharaan								**680,0**
				Mewujudkan Sistem Perbendaharaan Negara yang Modern	*Persentase Tingkat Penyempurnaan Proses Bisnis dan Perangkat Regulasi yang Mendukung SPAN dan SAKTI*	90%	90%	90%	90%	90%	-
					Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SPAN dan SAKTI	72%	75%	86%	100%	100%	-
					Persentase Implementasi Strategi Pengelolaan Perubahan dalam rangka SPAN	90%	90%	90%	90%	90%	-
015	08	1705	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara								**3.255,6**
				Mempercepat Penyaluran Dana APBN Kepada Stakeholders	*Persentase SP2D yang Diterbitkan Tepat Waktu*	100%	100%	100%	100%	100%	-
					Nilai Kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN	92%	92%	92%	92%	92%	-
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standardisasi	90%	90%	90%	90%	90%	-
015	08	1706	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah								**1.661,2**
				Meningkatkan Pemahaman Stakeholders Terhadap Ketentuan Pengelolaan Perbendaharaan	*Nilai Kualitas LKPP Tingkat Kanwil/UAPPA-W*	92	92	92	92	92	-
					Persentase Penyerapan Belanja Negara dalam DIPA K/L	91%	91%	91%	91%	91%	-

KANWIL DITJEN PBN PROVINSI JAWA BARAT

BAGIAN UMUM

12	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan Ruang Perpustakaan - Pemeliharaan dan Perbaikan Toilet Tamu dan Toilet Lantai II - Penggantian Atap Aula Atas, dll	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu	1.242.253.000	
12	Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jan-Juni 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu	33.189.000	
13	Penyediaan box dan label arsip	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu	10.000.000	
14	Input Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung pada aplikasi SIMPEL	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu		
	PENGELOLAAN ASET				
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan SIMAK BMN Semesteran	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, kabu		
16	Pelaksanaan Stock Opname - Semesteran	Minggu V Juni, Minggu V Desember 2018	Kasubbag Kasubbag TU/RT; Kabu		
17	Menyusun kerapihan barang persediaan dalam rak	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT		
18	Perbaikan daftar inventaris ruangan	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT		
19	Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4	Jan - Juni 2018	Kasubbag TU/RT		
20	Pengajuan Usulan Penetapan Status Penggunaan Gedung dan Bangunan serta Tanah	Jan - Des 2018			
21	Penyusunan RKBMN	Jan - Des 2018			
22.	Monitoring kebersihan gedung dan halaman	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT		
No.	**Uraian Jenis Kegiatan**	**Jadwal Pelaksanaan (Bulan)**	**Penanggungjawab Kegiatan**	**Anggaran (Rp.)**	**Keterangan**

12	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Perbaikan Ruang Perpustakaan - Pemeliharaan dan Perbaikan Toilet Tamu dan Toilet Lantai II - Penggantian Atap Aula Atas, dll	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu	1.242.253.000	
12	Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jan-Juni 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu	33.189.000	
13	Penyediaan box dan label arsip	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu	10.000.000	
14	Input Pengadaan Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung pada aplikasi SIMPEL	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, Kabu		
	PENGELOLAAN ASET				
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan SIMAK BMN Semesteran	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, kabu		
16	Pelaksanaan Stock Opname - Semesteran	Minggu V Juni, Minggu V Desember 2018	Kasubbag Kasubbag TU/RT; Kabu		
17	Menyusun kerapihan barang persediaan dalam rak	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT		
18	Perbaikan daftar inventaris ruangan	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT		
19	Penghapusan Kendaraan Dinas Roda 4	Jan - Juni 2018	Kasubbag TU/RT		
20	Pengajuan Usulan Penetapan Status Penggunaan Gedung dan Bangunan serta Tanah	Jan - Des 2018			
21	Penyusunan RKBMN	Jan - Des 2018			
22.	Monitoring kebersihan gedung dan halaman	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT		
No.	**Uraian Jenis Kegiatan**	**Jadwal Pelaksanaan (Bulan)**	**Penanggungjawab Kegiatan**	**Anggaran (Rp.)**	**Keterangan**

23	**KEARSIPAN**				
24	Pengarsipan digital surat masuk dan keluar pada subbagian TURT	Jan- Desember 2018	Kasubbag TU/RT; Kabu	-	Perekaman data arsip aktif Subbagian TU RT padaaplikasi kearsipan
25.	Pengelolaan/penatausahaan persuratan yang dikirimmelalui aplikasi Si Jaka Mantra user TURT	Jan- Desember 2018	Kasubbag TU/RT	-	
	PERPUSTAKAAN				
26.	Melakukan inventarisasi dan pemenuhan kebutuhan buku yang menunjang kinerja kanwil	Jan-Juni 2018	Kasubbag TU/RT; kabu	-	
27.	Membudayakan kepedulian pegawai terhadap perpustakaan melalui kesadaran menyumbang koleksi buku dan budaya baca di perpustakaan	Jan - Des 2018	Kasubbag TU/RT, kabu	-	
	SUBBAG PK				
1	Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017	Januari 2018	Kasubbag PK	100.000	Penjilidan Laporan
2	Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2018	Januari 2018	Kasubbag PK	1.000.000	• Snack • Penjilidan Kontrak Kinerja, Manual IKU dan Lembar Penetapan Manual IKU
3	Performance Dialogue/DKO/Bom Level II (Dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan)	Jan – Des 2018	Kasubbag PK	6.000.000	Snack
4	Penyusunan WBK-WBBM Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja	April 2018	Kasubbag PK	1.500.000	Penyimpanan LKE WBK-WBBM ke memory eksternal dengan kapasitas 2 Terra byte

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
5	Pembinaan Pengelolaan Kinerja pada KPPN (2 KPPN dan 2 Pegawai)	April 2018	Kasubbag PK	2.000.000	SPD selama 2 hari untuk 2 pegawai
6	Penyusunan Laporan Capaian IKU dan Laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Triwulan I	April 2018	Kasubbag PK	500.000	Penjilidan Laporan
7	Rapat Koordinasi Daerah Pengelolaan Kinerja (bersamaan dengan Rapat Koordinasi Daerah tentang Keuangan, Kepegawaian dan TURT) Selama 2 hari mengundang 2 pegawai/KPPN	April/Mei 2018	Kasubbag PK	5.000.000	Snack dan Konsumsi (SPD dan Akomodasi ditanggung masing-masing KPPN)
8	Penyusunan Laporan Capaian IKU dan Laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Triwulan II	Juli 2018	Kasubbag PK	500.000	Penjilidan Laporan
9	Pembinaan Pengelolaan Kinerja pada KPPN (2 KPPN dan 2 Pegawai)	Agustus 2018	Kasubbag PK	2.000.000	SPD selama 2 hari untuk 2 pegawai
10	Rapat Koordinasi Daerah Pengelolaan Kinerja (bersamaan dengan Rapat Koordinasi Daerah tentang Keuangan, Kepegawaian dan TURT) Selama 2 hari mengundang 2 pegawai/KPPN	September 2018	Kasubbag PK	5.000.000	Snack dan Konsumsi (SPD dan Akomodasi ditanggung masing-masing KPPN)
11	Penyusunan Laporan Capaian IKU dan Laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Triwulan III	Oktober 2018	Kasubbag PK	500.000	Penjilidan Laporan
	KEPEGAWAIAN				
1	Penatausahaan KP4 Pegawai dan PPKP	Jan 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
2	Penatausahaan Dosir Pegawai	Jan-Des 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	-	-
3	Penatausahaan KGB Pegawai	Jan – Des 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
4	Penetapan peringkat jabatan pegawai pelaksana	Jan - Feb 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
5	Pelaksanaan GKM	Jan – Des 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
6	Pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi Kepegawaian	Jan – Des 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
7	Penatausahaan usulan diklat pegawai	Jan - Des 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
8	Inventarisasi dan pemetaan pegawai terkait mutasi internal Kanwil	Jan - Des 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	-	-
9	Inventarisasi dan pemetaan pegawai terkait mutasi lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jabar	Jan - Des 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu		-
10	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Evaluasi Kinerja TA 2017 & Rencana Kerja TA 2018	Februari 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	(60 x Rp.182.000) + Rp.300.000 Rp. 11.220.000	Lokasi Kanwil, dengan mengundang seluruh Kepala KPPN didampingi 1 orang pejabat es IV
11	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Semester I/Triwulan II dan *Capacity Building*	Juli 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	Rp 78.630.000	Lokasi Kanwil, dengan mengundang seluruh Kepala KPPN didampingi 1 orang pejabat es IV, disesuaikan dengan jumlah peserta & tempat pelaksanaan
12	Pemilihan Pegawai Terbaik Tahun 2018	September 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	110 x Rp.14.000 Rp.1.540.000	Polling
13	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Triwulan III	Oktober 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	(70 x Rp.700.000) + (70 x Rp.300.000) + (70 x Rp.150.000) + (70 x 50.000) + RP.300.000 Rp. 84.300.000	Lokasi luar kota, dengan mengundang seluruh Kepala KPPN didampingi 1 orang pejabat es IV

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
14	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Langkah-langkah akhir tahun anggaran 2018	November 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	(60 x Rp.182.000) + Rp.300.000 Rp. 11.220.000	Lokasi Kanwil, dengan mengundang seluruh Kepala KPPN didampingi 1 orang pejabat es IV
15	UKP 2018	April & Oktober 2018	Kasubbag Kepegawaian	2 x 2 x 2 (Rp. 430.000 + 200.000) Rp. 3.840.000	-
16	Usulan Satya Lencana Karya Satya 2018	Maret 2018	Kasubbag Kepegawaian	2 x 1 x (Rp. 430.000 + 200.000) Rp. 1.260.000	-
17	pelaksanaan penilaian perilaku pegawai	Juli & Des 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	-	-
18	Pelaksanaan upacara hari kemerdekaan	17 Agustus 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	-	-
19	Pelaksanaan upacara hari oeang	20 Oktober 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	-	-
20	Pelaksanaan hard competency pegawai	Nopember 2018	Kasubbag Kepegawaian; Kabu	-	-
21	Pengusulan Pensiun Pegawai	Jan – Des 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
22	Penatausahan layanan kepegawaian lainnya	Jan – Des 2018	Kasubbag Kepegawaian	-	-
	SUBBAG KEUANGAN				
1	Penyusunan Laporan Keuangan 2017 dan Tahun 2018	Januari 2018 dan Juli 2018	Kasubbag Keuangan	80.140.000	
2	Penyusunan Laporan Keuangan 2018 Wilayah	April, Juli, Oktober 2018	Kasubbag Keuangan		
3	Penyusunan Laporan UAKPA 2018	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
4	Pengajuan SPM UP,	Januari 2018	Kasubbag Keuangan		

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
5	Penyusunan Laporan UAKPA 2018	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
6	Pengajuan SPM UP,	Januari 2018	Kasubbag Keuangan		
7	Penyelesaian SPP/ SPM GU, SPM LS Lembur/ Uang Makan/ Lainnya, Permohonan TUP	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
8	Pembuatan SPT S 1701 untuk seluruh pegawai	Januari-Februari 2018	Kasubbag Keuangan		
9	Penetapan SK Pengelola Keuangan TA 2018	Januari 2018	Kasubbag Keuangan		
10	Penetapan SK Pengelola SAI TA 2018 lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jabar	Januari - Februari 2018	Kasubbag Keuangan		
11	Pembayaran Honor PPNPN, Satpam	Feb - Des 2018	Kasubbag Keuangan	418.600.000	
12	Pembayaran Honor PPNPN, Sopir	Feb - Des 2018	Kasubbag Keuangan	167.440.000	
13	Pembayaran Honor PPNPN, Pramubakti	Feb - Des 2018	Kasubbag Keuangan	76.180.000	
14	Pembayaran Honor PPNPN, Petugas Kebersihan / CS	Feb - Des 2018	Kasubbag Keuangan	*572.000.000*	revisi dari Pemeliharaan Gedung kantor
15	Usulan revisi POK/ DIPA TA 2018	Januari- Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
16	Usulan revisi penyelesaian pagu minus belanja pegawai TA 2018	Oktober-Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
17	Pembuatan SPD	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
18	Update data pegawai pada Aplikasi GPP (KP, KGB, Perubahan keluarga, Pensun dan Mutasi)	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
19	Permintaan droping Tukin dan LPP Tukin lingkup Kanwil DJPB Provinsi Jabar	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
20	Laporan Realisasi Anggaran	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
21	LPJ Bendahara Pengeluaran	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
22	Update data pada Monika (RKA K/L, Tukin, SAI)	Januari -Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
23	Setoran Pajak (Pph, PPn)	Jan - Desember 2018	Kasubbag Keuangan		

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
24	Penataan Arsip Keuangan	Jan - Desember 2018	Kasubbag Keuangan		
	Perjalanan DINAS				
1	Pembinaan Kakanwil pada 12 KPPN	Januari -Desember 2018	Kasubbag Kepeg; Kabu	87.900.000	3 orang, 2 Hari, 10 KPPN
2	Konsultasi Kakanwil ke Kantor Pusat	Januari -Desember 2018	Kasubbag Kepeg; Kabu	59.580.000	3 orang, 6 kali
3	Penyusunan dan Penyampaian LAKIN 2017	Minggu IV Januari 2018	Kasubbag PK	2.000.000	
4	Penyampaian Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Two Triwulan.IV thn 2017 dan Triw I,II dan III Tahun 2018	Januari -Oktober 2018	Kasubbag PK	4.400.000	
5	UKP 2018	April & Oktober 2018	Kasubbag Kepegawaian	2 x 2 x 2 (Rp. 430.000 + 200.000) Rp. 3.840.000	
6	Usulan Satya Lencana Karya Satya 2018	Maret 2018	Kasubbag Kepegawaian	2 x 1 x (Rp. 430.000 + 200.000) Rp. 1.260.000	
7	Konsultasi dan Pengiriman Laporan Keuangan	Januari & Juli 2018	Kasubbag Keuangan	1.540.000	1 orang x 1 hari x 2 kali /Perjadin
8	Konsultasi dan Pengiriman Usulan Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif TA 2018	Februari 2018	Kasubbag Keuangan	2.310.000	3 orang x 1 Hari x 1 kali
9	Memenuhi undangan sosialisasi/ Bimtek dari KPPN Bandung I/ GKN/ Rocankeu	Maret – Desember 2018	Kasubbag Keuangan, Kepegawaian, TURT, dan PK	3.000.000	5 orang x 1 Hari x 4 kali translok
10	Penertiban Rumah Dinas			5.400.000	6 orang x 2 Hari x 3 kali

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
11	Penyelesaian SPM ke KPPN Bandung I	Januari – Desember 2018	Kasubbag Keuangan	1.800.000	1 orang x 1 Hari x 12 kali translok
12	Pengiriman Laporan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN	Juni dan Desember 2018	Kasubbag Keuangan	600.000	1 orang, 2 kali
13	Pendampingan Training Online SAKTI	Januari – Februari 2018	Kasubbag Keuangan	4.800.000	5 orang 2 Hari

Bandung, Januari 2018
Plt. Kepala Bagian Umum

Rizki Tavianto Karipany
NIP 19650320 199210 1 001

BIDANG PPA I

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018
BIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN I

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggung jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Monitoring Perencanaan Kas	Januari 2018	Kepala Bidang PPA I	1.750.000	-521211 Belanja Bahan 625.000,- -521218 Belana Barang Persediaan
2	Focus Group Discus (FGD) terkait spending review	Februari 2018	Kepala Bidang PPA I	44.545.000	-521211 Belanja Bahan 36.545.000,- -522141 Belanja sewa 8.000.000,-
3	Focus Group Discus (FGD) terkait BLU	Februari 2018	Kepala Bidang PPA I	20.860.000	-521211 Belanja Bahan 12.360.000,- -522141 Belanja sewa 8.000.000,-
4	Reviu Pelaksanaan Anggaran	Februari 2018	Kepala Bidang PPA I	6.050.000	-521211 Belana Bahan
5	Monitoring PNBP	Maret 2018	Kepala Bidang PPA I	4.400.000	521211 Belana Bahan 1.250.000,- 521218 Belana Barang Persediaan 524113 Belanja Perjadin Dalam Kota 900.000,-
6	Monitoring Pelaksanaan Anggaran/ URC	Maret 2018	Kepala Bidang PPA I	9.650.000	524111 Belanja Perjadin 9.650.000,-
7	Rapat Koordinasi daerah Pelaksanaan Anggaran Semester II 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV tahun 2017	Maret 2018	Kepala Bidang PPA I	27.945.000	-521211 Belanja Bahan 19.945.000,- -522141 Belanja sewa 8.000.000,-
8	Monitoring Perencanaan Kas	April 2018	Kepala Bidang PPA I	1.750.000	521211 Belana Bahan 625.000,-
No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Penanggung jawab	Anggaran	Keterangan

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggung jawab Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
9	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I tahun 2018	April 2018	Kepala Bidang PPA I	11.370.000	521211 Belana Bahan 11.370.000,- 521218 Belana Barang Persediaan
10	Monitoring Pelaksanaan Anggaran/ URC	Mei 2018	Kepala Bidang PPA I	9.650.000	524111 Belanja Perjadin 9.650.000,-
11	Pembinaan On The Spot pada Satker BLU	Mei 2018	Kepala Bidang PPA I	61.350.000	524111 Belanja Perjalanan
12	Monitoring Pelaksanaan Anggaran/ URC	Juni 2018	Kepala Bidang PPA I	9.650.000	524111 Belanja Perjadin 9.650.000,-
13	Monitoring Perencanaan Kas	Juli 2018	Kepala Bidang PPA I	1.750.000	521211 Belana Bahan 625.000,- 521218 Belana Barang Persediaan
14	Reviu Pelaksanaan Anggaran	Juli 2018	Kepala Bidang PPA I	6.050.000	-521211 Belana Bahan
15	Monitoring Pelaksanaan Anggaran/ URC	Agustus 2018	Kepala Bidang PPA I	9.650.000	524111 Belanja Perjadin 9.650.000,-
16	Rapat Koordinasi daerah Pelaksanaan Anggaran Semester I 2018 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II tahun 2018	Agustus 2018	Kepala Bidang PPA I	27.945.000	-521211 Belanja Bahan 19.945.000,- -522141 Belanja sewa 8.000.000,-
17	Monitoring Pelaksanaan Anggaran/ URC	September 2018	Kepala Bidang PPA I	1.200.000	524113 Belanja Perjadin Dalam Kota
18	Monitoring PNBP	September 2018	Kepala Bidang PPA I	4.400.000	521211 Belana Bahan 1.250.000,- 521218 Belana Barang Persediaan 2.250.000 524113 Belanja Perjadin Dalam Kota 900.000,-
19	Monitoring Perencanaan Kas	Oktober 2018	Kepala Bidang PPA I	1.750.000	521211 Belana Bahan 625.000,- 521218 Belana Barang Persediaan 1.125.000

20	Survey dalam rangka pengumpulan data terkait SBM	Oktober 2018	Kepala Bidang PPA I	26.600.000	521211 Belana Bahan 5.500.000,- 524113 Belanja Perjadin Dalam Kota 19.250.000,-
21	Pembinaan On The Spot pada Satker BLU	Oktober 2018	Kepala Bidang PPA I	8.100.000	524113 Belanja Perjadin Dalam Kota 8.100.000 ,-
22	Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III tahun 2018	Oktober 2018	Kepala Bidang PPA I	11.370.000	521211 Belana Bahan 11.370.000 ,-
23	Penyelesaian Revisi DIPA 2018	November 2018	Kepala Bidang PPA I	11.500.000	521211 Belana Bahan 11.500.000 ,-
24	Sosialisasi terkait peraturan	November 2018	Kepala Bidang PPA I	27.945.000	-521211 Belanja Bahan 19.945.000,- -522141 Belanja sewa 8.000.000,-
25	Penyerahan DIPA Petikan TA 2019	Desember 2018	Kepala Bidang PPA I	86.380.000	-521211 Belanja Bahan 67.980.000,- -521213 Honor Output Kegiatan 2.500.000,- -522141 Belanja sewa 8.000.000,- -522151 Belanja Jasa Profesi 3.400.000,- -524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,-

Bandung, Januari 2018
Kepala Bidang PPA I,

Rizki Tavianto Karipany
NIP 19650320 199210 1 001

BIDANG PPA II

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018
BIDANG PPA II

No.	Uraian Jenis Kegiatan	TANGGAL/BULAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Survey Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)	8 s.d. 9 Januari 2018	Kepala Bidang PPA II	6.000.000	
2	Rekonsiliasi *Outstanding* Pinjaman Periode 31 Desember 2017	15 s.d 17 Januari 2018		6.000.000	
3	Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (LKT/LRT)	18 s.d. 24 Januari 2018			
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa	1 s.d. 28 Februari 2018		15.000.000	
5	FGD Penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2017	6 Februari 2018		2.400.000	
6	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	14 s.d.15 Februari 2018		8.000.000	KPPN Tasikmalaya/ Pemda
7	*FGD* dan permintaan data dan informasi dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2017	19 s.d.20 Februari 2018		3.240.000	
8	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	5 s.d. 6 Maret 2018		8.000.000	KPPN Bogor/ Pemda
9	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	22 s.d. 23 Maret 2018		8.000.000	KPPN Cirebon/ Pemda
10	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	3 s.d. 4 April 2018		8.000.000	KPPN Sukabumi/ Pemda
11	FGD Penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan I-2018	3 Mei 2018		2.400.000	
No.	Uraian Jenis Kegiatan	TANGGAL/BULAN	PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN	KETERANGAN

		PELAKSANAAN	KEGIATAN	(Rp.)	
12	*FGD* dan permintaan data dan informasi dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2017	7 s.d.8 Februari 2018		3.240.000	
13	Rapat Koordinasi dengan Pemda dan BLUD di Wilayah Provinsi Jawa Barat	17 Mei 2018		3.000.000	KPPN Bandung I/ KPPN Bandung II
14	FGD dengan Pemda di Wilayah Provinsi Jawa Barat	30 Mei 2018		16.000.000	
15	Monitoring Kredit Program	4 s.d. 20 Juni 2018		30.000.000	
16	Rekonsiliasi *Outstanding* Pinjaman Periode 30 Juni 2018	Juli 2018 (tanggal sesuai surat Dit.SMI)		6.000.000	
17	FGD Penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan II-2018	26 Juli 2018		2.400.000	
18	FGD Penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan II-2018	6 s.d.7 Agustus 2018		3.240.000	
19	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	20 s.d. 21 Agustus 2018		8.000.000	KPPN Tasikmalaya/ Pemda
20	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	12 s.d. 13 September 2018		8.000.000	KPPN Bekasi/ Pemda
21	Rapat Koordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat	16 s.d. 17 Oktober 2018		8.000.000	KPPN Kuningan/ Pemda
22	FGD Penyusunan Kajian Fiskal Regional Triwulan III-2018	1 November 2018		2.400.000	
23	*FGD* dan permintaan data dan informasi dalam rangka penyusunan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2018	5 s.d.6 November 2018		3.240.000	
24	FGD dengan Pemda di Wilayah Provinsi Jawa Barat	22 November 2018		16.000.000	

No.	Uraian Jenis Kegiatan	TANGGAL/BULAN PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
25	Monitoring Kredit Program	3 s.d. 14 Desember 2018		30.000.000	
	Total Biaya Bidang PPA 2			**200.560.000**	

Bandung, Januari 2018
Kepala Bidang PPA II,

Ana Sariasih
NIP 19720922 199803 2 001

I. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018
BIDANG : SKKI

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Layanan Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal			**708.160.000**	
	Pembinaan Proses Bisnis dan Supervisi Teknis Aplikasi (051)			**551.640.000**	
1	Pembinaan KPPN		Kasi SPB		
	KPPN Bekasi dan KPPN Kuningan,	Februari 2018		39.440.000	Akun 524111
	KPPN Karawang, KPPN Garut, KPPN Purwakarta,	Maret 2018		59.160.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II	April 2018		6.000.000	Akun 524113
	KPPN Cirebon	April 2018		19.720.000	Akun 524111
	KPPN Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi	April 2018		78.880.000	Akun 524111
	KPPN Cirebon	Juli 2018		19.720.000	Akun 524111
	KPPN Purwakarta, KPPN Karawang, KPPN Tasikmalaya	September 2018		59.160.000	Akun 524111
	KPPN Bogor, KPPN Garut, KPPN Sukabumi	Oktober 2018		59.160.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I	Oktober 2018		3.000.000	Akun 524113
	KPPN Kuningan, KPPN Sumedang, KPPN Bekasi	November 2018		59.160.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I	November 2018		3.000.000	Akun 524113
2	Monitoring dan Evaluasi STA				
	KPPN Bekasi dan KPPN Kuningan,	Februari 2018	Kasi SPB	7.720.000	Akun 524111
	KPPN Karawang, KPPN Garut, KPPN Purwakarta,	Maret 2018		11.580.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II	April 2018		600.000	Akun 524113
	KPPN Cirebon	April 2018		3.860.000	Akun 524111
	KPPN Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi	Mei 2018		11.580.000	Akun 524111
	KPPN Bekasi dan KPPN Kuningan,	Juli 2018		7.720.000	Akun 524111

No.	UraianJenisKegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	KPPN Karawang, KPPN Garut, KPPN Purwakarta,	September 2018		11.580.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II	Oktober 2018		600.000	Akun 524113
	KPPN Cirebon	Oktober 2018		3.860.000	Akun 524111
	KPPN Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi	November 2018		11.580.000	Akun 524111
3	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas KI dan Evaluasi		Kasi KI		
	KPPN Bekasi dan KPPN Kuningan,	Februari 2018		7.720.000	Akun 524111
	KPPN Karawang, KPPN Garut, KPPN Purwakarta,	Maret 2018		11.580.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II	April 2018		600.000	Akun 524113
	KPPN Cirebon	April 2018		3.860.000	Akun 524111
	KPPN Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi	Mei 2018		11.580.000	Akun 524111
	KPPN Bekasi dan KPPN Kuningan,	Juli 2018		7.720.000	Akun 524111
	KPPN Karawang, KPPN Garut, KPPN Purwakarta,	September 2018		11.580.000	Akun 524111
	KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II	Oktober 2018		600.000	Akun 524113
	KPPN Cirebon	Oktober 2018		3.860.000	Akun 524111
	KPPN Tasikmalaya, KPPN Sumedang, KPPN Bogor, KPPN Sukabumi	November 2018		11.580.000	Akun 524111
4	Penyusunan Laporan		Kasi SPB		
	Pencetakan/ Penggandaan/ Laminasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		4.000.000	521211
	ATK dan Supplies Komputer	Januari s.d. Desember 2018		13.000.000	521811
5	Pelaksanaan Pengendalian dan Kepatuhan Internal serta Manajemen Risiko (052)		Kasi KI	156.520.000	
A	Pelaksanaan Pengendalian dan Kepatuhan Internal				

No.	UraianJenisKegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		2.000.000	521211
	Dokumentasi/ Penggandaan/ Laminasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		2.000.000	521211
	ATK dan Supplies Komputer	Januari s.d. Desember 2018		8.500.000	521811
B	Penerapan Manajemen Risiko				
	Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		2.000.000	521211
	Dokumentasi/ Penggandaan/ Laminasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		2.000.000	521211
	ATK dan Supplies Komputer	Januari s.d. Desember 2018		8.500.000	521811
C	Penyelasai LHP Itjen BPK				
	Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		4.000.000	521211
	Dokumentasi/ Penggandaan/ Laminasi	Januari, April, Juli, Oktober 2018		5.200.000	521211
D	Pelaksanaan Pembinaan KI, Koordinasi WBK WBBM dan ISO	Februari s.d. Mei 2018		46.880.000	Akun 524111
		Juli s.d. Desember 2018		70.200.000	Akun 524111
		Februari s.d. Maret 2018		1.280.000	Akun 524113
		Juli s.d. Agustus 2018		1.280.000	Akun 524113

Bandung, Januari 2018
Kepala Bidang SKKI,

Andri Ristanto
NIP 19741229 199903 1 001

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018
BIDANG : PAPK

No	Uraian Jenis Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)	Penanggungjawab Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
	LKPP Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Pemerintah Tingkat Wilayah			**465.610.000**	
1	**Penyusunan LKPP Tk. Wilayah/Koordinator Kuasa BUN**			**238.252.000**	
	a Rekonsiliasi Data Tingkat Wilayah	Jan. s.d. Des.	Kepala Bidang	13.000.000	Monitoring data dari aplikasi e-rekon
	b Rapat Koordinasi dan Sosialisasi	Maret dan Oktober 2017	Kepala Bidang	68.312.000	Sosialisasi dengan UAPPA-W
	c Konsultasi dan Pembinaan Penyusunan LKPP	Jan, April, Mei , Agst, Okt dan Nov	Kepala Bidang	144.440.000	Kerja sama dengan Bidang SKKI dalam rangka pembinaan KPPN
	d Penyusunan LKPP Tingkat Wilayah	Peb, April, Mei dan Okt	Kepala Bidang	12.500.000	Penyusunan LKPP Unaudited, Audited dan Triwulan
2	**Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Tk Wilayah**			**227.358.000**	
	a Sosialisasi/Workshop/Diseminasi	Maret	Kepala Bidang	30.738.000	Sosialisasi dengan Pemda
	b Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	Mei, Juli dan Sept dan Okt.	Kepala Bidang	181.620.000	Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemda
	c Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tk Wilayah	April, Juli dan Sept	Kepala Bidang	15.000.000	Penyusunan Laporan GFS Unaudited, Audited dan Semesteran

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA : (527094) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
ALOKASI : Rp. 9.394.281.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
015.08.09	**Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara**			**9.394.281.000**		
1706	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah			9.394.281.000		
1706.003	***Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah [Base Line]***	*10,00 Laporan*		*605.425.000*		
	Lokasi : KOTA BANDUNG					
1706.003.001	**LK BUN Tingkat Wilayah**			223.410.000		
051	**Koordinasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis**	2,00KEGIATAN		**56.150.000**	U	
521211	Belanja Bahan			40.150.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- Konsumsi Peserta [69 UAPPA x 2 ORANG x 2 KEG]	276,00 OK	65.000	17.940.000		
	- Konsumsi Panitia dan Narasumber [17 ORANG x 2 KEG]	34,00 OK	65.000	2.210.000		
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	2,00 KEG	10.000.000	20.000.000		
522141	Belanja Sewa			16.000.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- Sewa Peralatan/Peralatan	2,00 KEG	8.000.000	16.000.000		
052	**Analisis Hasil Telaahan Laporan UAPPA-W**	1,00KEGIATAN		**8.000.000**	U	
521211	Belanja Bahan			8.000.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000		
053	**Konsultasi dan Pembinaan Penyusunan LK BUN Tingkat Wilayah**	2,00KALI		**138.260.000**	U	
524111	Belanja perjalanan biasa			137.060.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	>> Konsultasi ke Pusat			127.060.000		
	- Transport [3 ORANG x 2 KALI]	6,00 OK	500.000	3.000.000		
	- Akomodasi [2 HARI x 3 ORANG x 2 KALI]	12,00 OH	610.000	7.320.000		
	- Uang Harian [3 HARI x 3 ORANG x 2 KALI]	18,00 OH	530.000	9.540.000		
	> Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan			117.200.000		
	- Transport [2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	40,00 OK	500.000	20.000.000		
	- Akomodasi [2 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	80,00 OH	570.000	45.600.000		
	- Uang Harian [3 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	120,00 OH	430.000	51.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.200.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- Transport Lokal [2 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	8,00 OK	150.000	1.200.000		
054	**Penyusunan LK BUN Tingkat Wilayah**	2,00KEGIATAN		**21.000.000**	U	
521211	Belanja Bahan			4.000.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- Dokumentasi/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	4.000.000	4.000.000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			17.000.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- ATK dan Suplies Komputer	2,00 KEG	8.500.000	17.000.000		
1706.003.002	**Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah**			282.015.000		
051	**Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Bimtek/FGD**	1,00KEGIATAN		**24.225.000**	U	
521211	Belanja Bahan			16.225.000		RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)					
	- Konsumsi Peserta [28 PEMDA x 2 ORANG x 1 KEG]	56,00 OK	65.000	3.640.000		
	- Konsumsi Panitia dan Narasumber [9 ORANG x 1 KEG]	9,00 OK	65.000	585.000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1,00 KEG	10.000.000	10.000.000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1,00 KEG	2.000.000	2.000.000	
522141	Belanja Sewa			8.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
052	**Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi**	1,00KALI		**226.790.000**	U
521211	Belanja bahan			22.750.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Bahan Habis Pakai dan Perlengkapan Peserta [65 ORANG x 1 SET]	65,00 OK	350.000	22.750.000	
524111	Belanja perjalanan biasa			84.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Perjalanan Dinas Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi [2 ORANG x 1 KALI x 28 PEMDA]	56,00 PEMDA	1.500.000	84.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1.800.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Transport Lokal Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi [3 ORANG x 4 KALI]	12,00 OK	150.000	1.800.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			118.240.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Paket Meeting Pegawai PEMDA (Fullday Meeting) [28 PEMDA x 2 ORANG x 2 HARI]	112,00 OK	530.000	59.360.000	
	- Paket Fullday Meeting Pegawai KAnwil [10 ORANG x 2 HARI]	20,00 OH	530.000	10.600.000	
	- Uang Saku [68 ORANG x 2 HARI]	136,00 OH	105.000	14.280.000	
	- Transport [68 ORANG x 1 PREK]	68,00 OF	500.000	34.000.000	
053	**Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah**	2,00KEGIATAN		**31.000.000**	U
521211	Belanja Bahan			22.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Kepustakaan	1,00 TAHUN	20.000.000	20.000.000	
	- Dokumentasi/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	2.000.000	2.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			9.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	9.000.000	9.000.000	
1706.009	***Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah [Base Line]***	***13,00 Layanan***		***1.491.860.000***	
	Lokasi : KOTA BANDUNG				
1706.009.001	**Layanan Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal**			708.160.000	
051	**Pembinaan Proses Bisnis dan Supervisi Teknis Aplikasi**	2,00KALI		**551.640.000**	U
A	*Pelaksanaan Proses Bisnis*			*414.880.000*	
524111	Belanja perjalanan biasa			394.400.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Transport [4 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	80,00 OK	500.000	40.000.000	
	- Akomodasi [4 HARI x 4 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	320,00 OH	570.000	182.400.000	
	- Uang Harian [5 HARI x 4 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	400,00 OH	430.000	172.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			20.480.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Transport Lokal Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi [4 HARI x 4 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	64,00 OK	150.000	9.600.000	
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [4 HARI x 4 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	64,00 OH	170.000	10.880.000	
B	*Pelaksanaan Supervisi KPPN*			*119.760.000*	
524111	Belanja perjalanan biasa			117.200.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Transport [2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	40,00 OK	500.000	20.000.000		
	- Akomodasi [2 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	80,00 OH	570.000	45.600.000		
	- Uang Harian [3 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	120,00 OH	430.000	51.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			2.560.000		RM
	- Transport Lokal Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi [1 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	8,00 OK	150.000	1.200.000		
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	8,00 OH	170.000	1.360.000		
C	*Penyusunan Laporan*			*17.000.000*		
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			4.000.000		RM
	- Pencetakkan/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	4.000.000	4.000.000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			13.000.000		RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	13.000.000	13.000.000		
052	**Pelaksanaan Pengendalian dan Kepatuhan Internal serta Manajemen Risiko**	1,00KALI		**156.520.000**	U	
A	*Pelaksanaan Pengendalian dan Kepatuhan Internal*			*12.500.000*		
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			4.000.000		RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1,00 TAHUN	2.000.000	2.000.000		
	- Dokumentasi/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	2.000.000	2.000.000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			8.500.000		RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	8.500.000	8.500.000		
B	*Penerapan Manajemen Resiko*			*12.500.000*		
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			4.000.000		RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1,00 TAHUN	2.000.000	2.000.000		
	- Dokumentasi/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	2.000.000	2.000.000		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			8.500.000		RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	8.500.000	8.500.000		
C	*Penyelesaian LHP Itjen /BPK*			*9.200.000*		
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			9.200.000		RM
	- Pencetakkan/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	4.000.000	4.000.000		
	- Konsumsi [20 ORANG x 4 KALI x 1 HARI]	80,00 OK	65.000	5.200.000		
D	*Pelaksanaan Pembinaan Kepatuhan Internal, Koordinasi WBK WWBM dan ISO*			*122.320.000*		
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			117.200.000		RM
	- Transport [2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	40,00 OK	500.000	20.000.000		
	- Akomodasi [2 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	80,00 OH	570.000	45.600.000		
	- Uang Harian [3 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 10 KPPN]	120,00 OH	430.000	51.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			5.120.000		RM
	- Transport Lokal Pembinaan, Konsultasi dan Koordinasi [2 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	16,00 OK	150.000	2.400.000		
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [2 HARI x 2 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	16,00 OH	170.000	2.720.000		
1706.009.002	**Layanan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Pusat**			433.790.000		
051	**Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Pusat**	1,00KEGIATAN		**340.090.000**	U	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	*Pelaksanaan Spending Review*			*44.545.000*	
521211	Belanja Bahan			36.545.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	> Pelaksanaan FGD			8.100.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	2.250.000	2.250.000	
	- Konsumsi [2 ORANG x 45 SATKE x 1 KEG]	90,00 OK	65.000	5.850.000	
	> Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi			19.945.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta [69 SATKE x 2 ORANG x 1 KEG]	138,00 OK	65.000	8.970.000	
	- Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber (Makan dan Snack) [15 ORANG x 1 KEG]	15,00 OK	65.000	975.000	
	> Penyusunan Laporan Spending Review			8.500.000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.000.000	4.000.000	
522141	Belanja Sewa			8.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
B	*Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*			*22.740.000*	
521211	Belanja Bahan			22.740.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	2,00 KEG	2.500.000	5.000.000	
	- Konsumsi Peserta [2 ORANG x 40 SATKE x 2 KEG]	160,00 OK	65.000	10.400.000	
	- Pencetakkan/Penggandaan/Laminasi	2,00 KEG	2.500.000	5.000.000	
	- Konsumsi Panitia dan Reviewer [6 ORANG x 2 KEG x 3 HARI]	36,00 OK	65.000	2.340.000	
C	*Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran*			*55.890.000*	
521211	Belanja Bahan			39.890.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	2,00 KEG	10.000.000	20.000.000	
	- Konsumsi Peserta [2 ORANG x 69 UAPPW x 2 KEG]	276,00 OK	65.000	17.940.000	
	- Konsumsi Panitia ,Peserta Kanwil dan Narasumber [15 ORANG x 2 KEG]	30,00 OK	65.000	1.950.000	
522141	Belanja Sewa			16.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	2,00 KEG	8.000.000	16.000.000	
D	*Reviu Pelaksanaan Anggaran*			*12.100.000*	
521211	Belanja Bahan			12.100.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	2,00 KEG	2.250.000	4.500.000	
	- Konsumsi Peserta [20 ORANG x 2 KEG]	40,00 OK	65.000	2.600.000	
	- Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	2,00 KEG	2.500.000	5.000.000	
E	*Pelaksanaan Pembinaan Satuan Kerja BLU*			*90.490.000*	
521211	Belanja Bahan			12.860.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta [2 ORANG x 16 SATKE x 1 KEG]	32,00 OK	65.000	2.080.000	
	- Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Nrasumber [12 ORANG x 1 KEG]	12,00 OK	65.000	780.000	
522141	Belanja Sewa			8.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
524111	Belanja perjalanan biasa			61.530.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA : (527094) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
ALOKASI : Rp. 9.394.281.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Transport [3 ORANG x 1 KALI x 7 BLU]	21,00 OK	500.000	10.500.000	
	- Akomodasi [2 HARI x 3 ORANG x 1 KALI x 7 BLU]	42,00 OH	570.000	23.940.000	
	- Uang Harian [3 HARI x 3 ORANG x 1 KALI x 7 BLU]	63,00 OH	430.000	27.090.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			8.100.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [3 ORANG x 2 KALI x 9 BLU]	54,00 OK	150.000	8.100.000	
F	*Pelaksanaan Pembinaan Terkait Peraturan/Kebijakan Pelaksanaan Anggaran*			*27.945.000*	
521211	Belanja Bahan			19.945.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta [2 ORANG x 69 SATKE x 1 KEG]	138,00 OK	65.000	8.970.000	
	- Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Nrasumber [15 ORANG x 1 KEG]	15,00 OK	65.000	975.000	
522141	Belanja Sewa			8.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
G	*Penyerahan DIPA*			*86.380.000*	
521211	Belanja Bahan			67.980.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta Satker Provinsi [2 ORANG x 394 SATKE x 1 KEG]	788,00 OK	65.000	51.220.000	
	- Konsumsi Peserta Pemda [3 ORANG x 28 KAB/K x 1 KEG]	84,00 OK	65.000	5.460.000	
	- Konsumsi Panitia, Peserta Kanwil dan Narasumber [20 ORANG x 1 KEG]	20,00 OK	65.000	1.300.000	
521213	Honor Output Kegiatan			2.500.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	> Panitia Kegiatan (Pemprov)			2.500.000	
	- Ketua	1,00 OK	400.000	400.000	
	- Sekretaris/Anggota	7,00 OK	300.000	2.100.000	
522141	Belanja Sewa			8.000.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Sewa Perlengkapan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi			3.400.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Honor Narasumber (Gubernur) [1 ORG x 2 JAM]	2,00 OJ	1.700.000	3.400.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.500.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Transport Lokal Panitia Kanwil	30,00 OK	150.000	4.500.000	
052	**Pelaksanaan Survei Bahan Sumbangan Standar Biaya Masukan**	1,00KEGIATAN		**26.600.000**	U
521211	Belanja Bahan			5.500.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	3.000.000	3.000.000	
	- Percetakan/Penggandaan/Laminasi	1,00 KEG	2.500.000	2.500.000	
524111	Belanja perjalanan biasa			17.500.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka menyusun SBM [2 ORANG x 5 KALI]	10,00 OK	1.750.000	17.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.600.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 ORANG x 12 KALI]	24,00 OK	150.000	3.600.000	
053	**Penyelesaian Pengesahan Revisi DIPA**	1,00TAHUN		**11.500.000**	U
521211	Belanja Bahan			11.500.000	RM
	(KPPN.022-BANDUNG I)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 KEG	10.500.000	10.500.000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1,00 KEG	1.000.000	1.000.000	
054	**Monitoring Pelaksanaan Anggaran**	2,00KALI		**55.600.000**	B
A	*Monitoring Perencanaan Kas*			*7.000.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			2.500.000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakkan/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	2.500.000	2.500.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			4.500.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
B	*Monitoring PNBP*			*8.800.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			2.500.000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakkan/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	2.500.000	2.500.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			4.500.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			1.800.000	RM
	- Transport Lokal Monitoring PNBP [2 ORANG x 1 HARI x 6 KALI]	12,00 OH	150.000	1.800.000	
C	*Monitoring Pelaksanaan Anggaran*			*39.800.000*	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			38.600.000	RM
	- Transport [2 ORANG x 1 KALI x 10 KPPN] a	20,00 OK	500.000	10.000.000	
	- Akomodasi [1 HARI x 2 ORANG x 1 KALI x 10 KPPN] b	20,00 OH	570.000	11.400.000	
	- Uang Harian [2 HARI x 2 ORANG x 1 KALI x 10 KPPN] c	40,00 OH	430.000	17.200.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			1.200.000	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 ORANG x 2 KALI x 2 KPPN]	8,00 OK	150.000	1.200.000	
1706.009.003	**Layanan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah**			349.910.000	
051	**Penyediaan Informasi Anggaran Daerah**	1,00KALI		**183.280.000**	B
A	*Penyediaan Informasi Fiskal Regional*			*31.400.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			7.100.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 THN	4.500.000	4.500.000	
	- Konsumsi Peserta [20 ORANG x 2 KEG]	40,00 OK	65.000	2.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.022-BANDUNG I)			5.600.000	RM
	- Honor Narasumber (Regional Economist) [1 ORANG x 4 JAM x 1 KEG]	4,00 OJ	1.400.000	5.600.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			17.500.000	RM
	- Perjalanan Dinas [2 ORANG x 5 KALI]	10,00 OK	1.750.000	17.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			1.200.000	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 ORANG x 4 FREK]	8,00 OF	150.000	1.200.000	
B	*Penyediaan Informasi Keuangan Daerah*			*115.360.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			12.600.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 THN	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta [20 ORANG x 2 KEG]	40,00 OK	65.000	2.600.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			100.360.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Transport [2 ORANG x 26 PEMDA x 1 KALI]	52,00 OK	500.000	26.000.000	
	- Akomodasi [2 ORANG x 26 PEMDA x 1 KALI x 1 HR]	52,00 OH	570.000	29.640.000	
	- Uang Harian [2 ORANG x 26 PEMDA x 1 KALI x 2 HR]	104,00 OH	430.000	44.720.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			2.400.000	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 ORANG x 4 FREK x 2 KAB]	16,00 OF	150.000	2.400.000	
C	*Penyediaan Informasi Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah*			*36.520.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			7.100.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 THN	4.500.000	4.500.000	
	- Konsumsi Peserta [20 ORANG x 2 KEG]	40,00 OK	65.000	2.600.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			27.020.000	RM
	- Transport [2 ORANG x 7 PEMDA x 1 KALI]	14,00 OK	500.000	7.000.000	
	- Akomodasi [2 ORANG x 7 PEMDA x 1 KALI x 1 HR]	14,00 OH	570.000	7.980.000	
	- Uang Harian [2 ORANG x 7 PEMDA x 1 KALI x 2 HR]	28,00 OH	430.000	12.040.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			2.400.000	RM
	- Perjalanan Dinas Dalam Kota [2 ORANG x 4 FREK x 2 KAB]	16,00 OF	150.000	2.400.000	
052	**Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah**	1.00KEGIATAN		**95.320.000**	
A	*Pelaksanan Kajian Fiskal Regional*			*32.900.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			24.900.000	RM
	> Pelaksaanaan FGD			7.100.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
	- Konsumsi [20 ORANG x 2 FREK]	40,00 OF	65.000	2.600.000	
	> Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi			17.800.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta Pemda [28 PEMDA x 2 ORANG x 1 KEG]	56,00 OK	65.000	3.640.000	
	- Peserta K/L terkait [10 K/L x 2 ORANG x 1 KEG]	20,00 OK	65.000	1.300.000	
	- Konsumsi Peserta KPPN [12 KPPN x 2 ORANG x 1 KEG]	24,00 OK	65.000	1.560.000	
	- Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 ORANG x 1 KEG]	20,00 OK	65.000	1.300.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.022-BANDUNG I)			8.000.000	RM
	- Sewa Ruangan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
B	*Pelaksanaan FGD/Rakor/Sosialisasi Profil Keuangan Daerah*			*30.040.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			22.040.000	RM
	> Pelaksanaan FGD			7.100.000	
	- Konsumsi [20 ORANG x 2 FREK]	40,00 OF	65.000	2.600.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
	> Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi			14.940.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta Pemda [2 ORANG x 1 KEG x 28 PEMDA]	56,00 OK	65.000	3.640.000	
	- Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 ORANG x 1 KEG]	20,00 OK	65.000	1.300.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.022-BANDUNG I)			8.000.000	RM
	- Sewa Ruangan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
C	*Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah*			*32.380.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			24.380.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Pelaksanaan FGD			9.440.000	
	- Konsumsi Peserta Pemda [28 PEMDA x 2 ORANG x 1 KEG]	56,00 OK	65.000	3.640.000	
	- Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 ORANG x 1 KEG]	20,00 OK	65.000	1.300.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
	> Pelaksanaan Rakor serta Sosialisasi			14.940.000	
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	- Konsumsi Peserta Pemda [2 ORANG x 1 KEG x 28 PEMDA]	56,00 OK	65.000	3.640.000	
	- Konsumsi Panitia dan Narasumber [20 ORANG x 1 KEG]	20,00 OK	65.000	1.300.000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.022-BANDUNG I)			8.000.000	RM
	- Sewa Ruangan/Peralatan	1,00 KEG	8.000.000	8.000.000	
053	**Pembinaan dan Monitoring atas Investasi Pemerintah, Pinjaman Kredit Program, dan Dana Transfer**	4,00KALI		**71.310.000**	U
A	*Pelaksanaan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman*			*20.910.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			20.910.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
	- Konsumsi Debitur [3 ORANG x 29 DEBIT x 2 KEG]	174,00 OK	65.000	11.310.000	
	- Konsumsi Petugas Rekonsiliasi [20 ORANG x 2 KEG]	40,00 OK	65.000	2.600.000	
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan	1,00 TAHUN	2.500.000	2.500.000	
B	*Pengelolaan Register Hibah*			*13.500.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			4.500.000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakkan/Penggandaan/Laminasi	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			9.000.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	9.000.000	9.000.000	
C	*Pelaksanaan Rekonsiliasi Kredit Program*			*6.300.000*	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			4.500.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 TAHUN	4.500.000	4.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			1.800.000	RM
	- Transport Lokal [2 ORANG x 6 FREK]	12,00 OF	150.000	1.800.000	
D	*Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer dan Dana Desa*			*30.600.000*	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			7.100.000	RM
	- ATK dan Suplies Komputer	1,00 THN	4.500.000	4.500.000	
	- Konsumsi [20 ORANG x 2 FREK]	40,00 OF	65.000	2.600.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			17.500.000	RM
	- Perjalanan Dinas [2 ORANG x 5 KALI]	10,00 OK	1.750.000	17.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			6.000.000	RM
	- Transport Lokal [2 ORANG x 2 FREK x 10 LOKAS]	40,00 OF	150.000	6.000.000	
1706.951	***Layanan Internal (Overhead) (Base Line)***	***1,00 Layanan***		***318.417.000***	
	Lokasi : KOTA BANDUNG				
997	**Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**	4,00UNIT		**10.488.000**	U
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.022-BANDUNG I)			10.488.000	RM
	- Penggantian Inventaris Pegawai Lama	3,00 OT	1.748.000	5.244.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Pengadaan Inventaris Pegawai Baru	3,00 OT	1.748.000	5.244.000		
998	**Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan**	70,00M2		**228.359.000**	U	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.022-BANDUNG I)			228.359.000		RM
	- SLO	1,00 PKT	13.794.000	13.794.000		
	> Rehabilitasi Rumah Dinas Jalan Margasari Nomor 8 Bandung			214.565.000		
	- Pekerjaan Fisik	70,00 M2	2.722.358	190.565.000		
	- Perencanaan	1,00 PKT	9.000.000	9.000.000		
	- Pengawas	1,00 PKT	8.000.000	8.000.000		
	- Pengelolaan Kegiatan	1,00 PKT	7.000.000	7.000.000		
999	**Dukungan Internal Lainnya**	2,00KEGIATAN		**79.570.000**	U	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			75.370.000		RM
	> Peningkatan Kualitas SDM			27.370.000		
	- Konsumsi [119 ORANG x 2 KALI]	238,00 OK	65.000	15.470.000		
	- Barang Habis Pakai [119 ORANG x 1 SET x 2 KALI]	238,00 SET	50.000	11.900.000		
	> Pengelolaan IKU DAMS/LAKIP dan ABK			6.000.000		
	- Biaya Pengelolaan IKU/DAMS/LAKIP dan ABK	12,00 BULAN	500.000	6.000.000		
	> Bagian Kehumasan			30.000.000		
	- Biaya Penyelenggaraan Kehumasan	3,00 KEG	10.000.000	30.000.000		
	> Penyelesaian RKA-K/L			12.000.000		
	- Biaya Penyelesaian RKA-K/L	1,00 TAHUN	12.000.000	12.000.000		
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.022-BANDUNG I)			3.600.000		RM
	- Honor Narasumber Sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM [2 ORANG x 1 JAM x 2 KALI]	4,00 OJ	900.000	3.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			600.000		RM
	- Transports Narasumber [2 ORANG x 2 KALI]	4,00 OK	150.000	600.000		
1706.994	***Layanan Perkantoran [Base Line]***	***1,00 Layanan***		***7.078.579.000***		
	Lokasi : KOTA BANDUNG					
001	**Gaji dan Tunjangan**	1,00TAHUN		**1.694.400.000**	P	
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*			*1.694.400.000*		
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.022-BANDUNG I)			982.080.000		RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 TAHUN	982.080.000	982.080.000		
512211	Belanja uang lembur (KPPN.022-BANDUNG I)			712.320.000		RM
	- Uang Lembur Golongan II [7 ORANG x 2 JAM x 80 HARI]	1.120,00 OJ	17.000	19.040.000		
	- Uang Lembur Golongan III [94 ORANG x 2 JAM x 80 HARI]	15.040,00 OJ	20.000	300.800.000		
	- Uang Lembur Golongan IV [13 ORANG x 2 JAM x 80 HARI]	2.080,00 OJ	25.000	52.000.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan II [7 ORANG x 80 HARI]	560,00 OH	35.000	19.600.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan III [94 ORANG x 80 HARI]	7.520,00 OH	37.000	278.240.000		
	- Uang Makan Lembur Golongan IV [13 ORANG x 80 HARI]	1.040,00 OH	41.000	42.640.000		
002	**Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**	1,00TAHUN		**5.384.179.000**	P	
A	*Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran*			*1.888.020.000*		
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.022-BANDUNG I)			1.518.020.000		RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran [114 PEGAW x 1 TAHUN]	114,00 OT	1.520.000	173.280.000		
	- Kertas Berharga/Materai	1,00 TAHUN	3.000.000	3.000.000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA : (527094) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
ALOKASI : Rp. 9.394.281.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Honorarium PPNPN			1.234.220.000	
	- Honor Satpam [10 ORANG x 13 BLN]	130,00 OB	3.220.000	418.600.000	
	- Honor Sopir [4 ORANG x 13 BLN]	52,00 OB	3.220.000	167.440.000	
	- Honor Pramubhakti [2 ORANG x 13 BLN]	26,00 OB	2.930.000	76.180.000	
	- Honor Cleaning Service [16 ORG x 13 BLN]	208,00 OB	2.750.000	572.000.000	
	> Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN			107.520.000	
	- Uang Lembur Sopir [4 ORANG x 2 JAM x 60 HARI]	480,00 OJ	13.000	6.240.000	
	- Uang Lembur Satpam [10 ORANG x 2 JAM x 60 HARI]	1.200,00 OJ	13.000	15.600.000	
	- Uang Lembur Pramubhakti [2 ORANG x 2 JAM x 60 HARI]	240,00 OJ	13.000	3.120.000	
	- Uang Lembur Cleaning Service [16 ORG x 2 JAM x 60 HARI]	1.920,00 OJ	13.000	24.960.000	
	- Uang Makan Lembur Satpam [10 ORANG x 60 HARI]	600,00 OH	30.000	18.000.000	
	- Uang Makan Lembur Sopir [4 ORANG x 60 HARI]	240,00 OH	30.000	7.200.000	
	- Uang Makan Lembur Pramubhakti [2 ORANG x 60 HARI]	120,00 OH	30.000	3.600.000	
	- Uang Makan Lembur Cleaning Service [16 ORG x 60 HARI]	960,00 OH	30.000	28.800.000	
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (KPPN.022-BANDUNG I)			115.000.000	RM
	- Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	1,00 THN	115.000.000	115.000.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			90.000.000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	1,00 THN	80.000.000	80.000.000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Kepustakaan	1,00 KEG	10.000.000	10.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.022-BANDUNG I)			165.000.000	RM
	- ATK dan Supplies Komputer	1,00 THN	165.000.000	165.000.000	
B	*Langganan Daya dan Jasa*			*815.000.000*	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.022-BANDUNG I)			750.000.000	RM
	- Belanja Langganan Listrik	1,00 THN	750.000.000	750.000.000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.022-BANDUNG I)			60.000.000	RM
	- Belanja Langganan Telepon	1,00 THN	60.000.000	60.000.000	
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.022-BANDUNG I)			5.000.000	RM
	- Belanja Langganan Air	1,00 THN	5.000.000	5.000.000	
C	*Pemeliharaan Perkantoran*			*1.824.533.000*	
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.022-BANDUNG I)			1.344.424.000	RM
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	10.271,00 M2	8.000	82.168.000	
	- Pemeliharaan Gedung Bertingkat	17.118,00 M2	72.570	1.242.253.000	
	- Biaya instalasi listrik, telepon dan air	1,00 PKT	20.003.000	20.003.000	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.022-BANDUNG I)			60.000.000	RM
	- Pengadaan Peralatan dan Bahan Pemeliharaan	1,00 THN	60.000.000	60.000.000	
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			33.189.000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Jabatan	393,00 M2	71.200	27.981.000	
	- Pemeliharaan halaman rumah jabatan	651,00 M2	8.000	5.208.000	
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.022-BANDUNG I)			486.920.000	RM
	- Kendaraan Pejabat Eselon II	1,00 UNIT	38.330.000	38.330.000	
	- Kendaraan Roda 4	6,00 UNIT	33.350.000	200.100.000	
	- Kendaraan Roda 2	2,00 UNIT	3.560.000	7.120.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA : (527094) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
ALOKASI : Rp. 9.394.281.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Kendaraan Roda 6/ Kendaraan layanan mobile	1,00 UNIT	37.110.000	37.110.000	
	- Inventaris Kantor [114 PEG x 1 THN]	114,00 OT	80.000	9.120.000	
	- Komputer/Laptop	112,00 UNIT	730.000	81.760.000	
	- Printer	58,00 UNIT	690.000	40.020.000	
	- UPS	12,00 UNIT	120.000	1.440.000	
	- Mesin Fotocopy	5,00 UNIT	1.000.000	5.000.000	
	- Tabung Pemadam Api	20,00 UNIT	200.000	4.000.000	
	- AC Split dan AC Window	62,00 UNIT	610.000	37.820.000	
	- Faksimil	6,00 UNIT	800.000	4.800.000	
	- Genset	2,00 UNIT	10.150.000	20.300.000	
D	*Pelaksanaan Operasional Kantor*			*756.626.000*	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.022-BANDUNG I)			136.560.000	RM
	- Honor Pengelola Keuangan	1,00 THN	106.560.000	106.560.000	
	- Honor Tim SAI	1,00 THN	30.000.000	30.000.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			246.254.000	RM
	- Penyelesaian LHP dan SAI	1,00 TAHUN	7.000.000	7.000.000	
	> Pengadaan Seragam			82.354.000	
	- Seragam Pegawai [114 PEG x 1 STEL]	114,00 OT	551.000	62.814.000	
	- Seragam Satpam [10 ORANG x 1 STEL]	10,00 OT	1.219.000	12.190.000	
	- Seragam Sopir [4 ORANG x 1 STEL]	4,00 OT	425.000	1.700.000	
	- Seragam Pramubhakti [2 ORANG x 1 STEL]	2,00 OT	425.000	850.000	
	- Seragam Cleaning Service [16 ORG x 1 STEL]	16,00 OT	300.000	4.800.000	
	> Obat-obatan dan Dokter			27.900.000	
	- Obat-obatan [114 PEG x 1 THN]	114,00 OT	150.000	17.100.000	
	- Dokter	12,00 BLN	900.000	10.800.000	
	> Penyelenggaraan Rapat GKM/Jamuan Tamu			120.000.000	
	- Konsumsi Rapat/GKM/Jamuan Tamu	12,00 BLN	10.000.000	120.000.000	
	> Pelantikan Eselon III dan IV			9.000.000	
	- Biaya Pelantikan	2,00 KEG	4.500.000	9.000.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			3.400.000	RM
	- ATK dan Bahan Habis Pakai Pelaksanaan Rakor [34 ORANG x 2 KALI]	68,00 OK	50.000	3.400.000	
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN.022-BANDUNG I)			19.200.000	RM
	- Honor Pejabat PBJ,Pejabat Pemeriksa/Penerima BJ, Pengurus BMN dan Persediaan	1,00 THN	16.800.000	16.800.000	
	- Honorarium rohaniwan calam rangka Pelantikan [3 ORANG x 2 KEG]	6,00 OK	400.000	2.400.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			20.940.000	RM
	- Konsumsi dalam rangka Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA [34 ORANG x 3 HARI x 2 KEG]	204,00 OK	85.000	17.340.000	
	- Konsumsi [40 ORG x 1 HR x 2 KEG]	80,00 OH	45.000	3.600.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			1.000.000	RM
	- Pengelolaan Website	1,00 THN	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			203.080.000	RM
	> Konsultasi Ke Pusat			59.580.000	
	- Transport [3 ORG x 6 KL]	18,00 OH	500.000	9.000.000	

71.324

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG : (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA : (527094) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT
ALOKASI : Rp. 9.394.281.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Kendaraan Roda 6/ Kendaraan layanan mobile	1,00 UNIT	37.110.000	37.110.000	
	- Inventaris Kantor [114 PEG x 1 THN]	114,00 OT	71.316	8.130.000	
	- Komputer/Laptop	112,00 UNIT	730.000	81.760.000	
	- Printer	58,00 UNIT	690.000	40.020.000	
	- UPS	12,00 UNIT	120.000	1.440.000	
	- Mesin Fotocopy	5,00 UNIT	1.000.000	5.000.000	
	- Tabung Pemadam Api	20,00 UNIT	200.000	4.000.000	
	- AC Split dan AC Window	62,00 UNIT	610.000	37.820.000	
	- Faksimili	6,00 UNIT	800.000	4.800.000	
	- Genset	2,00 UNIT	10.150.000	20.300.000	
	- Sound System	1,00 SET	990.000	990.000	
D	*Pelaksanaan Operasional Kantor*			*756.626.000*	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.022-BANDUNG I)			136.560.000	RM
	- Honor Pengelola Keuangan	1,00 THN	106.560.000	106.560.000	
	- Honor Tim SAI	1,00 THN	30.000.000	30.000.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			246.254.000	RM
	- Penyelesaian LHP dan SAI	1,00 TAHUN	7.000.000	7.000.000	
	> Pengadaan Seragam			82.354.000	
	- Seragam Pegawai [114 PEG x 1 STEL]	114,00 OT	551.000	62.814.000	
	- Seragam Satpam [10 ORANG x 1 STEL]	10,00 OT	1.219.000	12.190.000	
	- Seragam Sopir [4 ORANG x 1 STEL]	4,00 OT	425.000	1.700.000	
	- Seragam Pramubhakti [2 ORANG x 1 STEL]	2,00 OT	425.000	850.000	
	- Seragam Cleaning Service [16 ORG x 1 STEL]	16,00 OT	300.000	4.800.000	
	> Obat-obatan dan Dokter			27.900.000	
	- Obat-obatan [114 PEG x 1 THN]	114,00 OT	150.000	17.100.000	
	- Dokter	12,00 BLN	900.000	10.800.000	
	> Penyelenggaraan Rapat GKM/Jamuan Tamu			120.000.000	
	- Konsumsi Rapat/GKM/Jamuan Tamu	12,00 BLN	10.000.000	120.000.000	
	> Pelantikan Eselon III dan IV			9.000.000	
	- Biaya Pelantikan	2,00 KEG	4.500.000	9.000.000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.022-BANDUNG I)			3.400.000	RM
	- ATK dan Bahan Habis Pakai Pelaksanaan Rakor [34 ORG x 2 KL]	68,00 OK	50.000	3.400.000	
521213	Honor Output Kegiatan (KPPN.022-BANDUNG I)			19.200.000	RM
	- Honor PPEI,Pejabat Pemeriksa/Penerima BI, Pengurus BMN dan Persediaan	1,00 THN	16.800.000	16.800.000	
	- Honorarium rohaniwan dalam rangka Pelantikan [3 ORANG x 2 KEG]	6,00 OK	400.000	2.400.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			20.940.000	RM
	- Konsumsi dalam rangka Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA [34 ORANG x 3 HARI x 2 KEG]	204,00 OK	85.000	17.340.000	
	- Konsumsi [40 ORG x 1 HR x 2 KEG]	80,00 OH	45.000	3.600.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.022-BANDUNG I)			1.000.000	RM
	- Pengelolaan Website	1,00 THN	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja perjalanan biasa (KPPN.022-BANDUNG I)			203.080.000	RM
	> Konsultasi Ke Pusat			59.580.000	
	- Transport [3 ORG x 6 KL]	18,00 OH	500.000	9.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

KEMEN/LEMB : (015) **KEMENTERIAN KEUANGAN**
UNIT ORG : (08) **Ditjen Perbendaharaan**
UNIT KERJA : (527094) **KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT**
ALOKASI : **Rp. 9.394.281.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2018			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Akomodasi [2 HARI x 3 ORG x 6 KL]	36,00 OH	610.000	21.960.000	
	- Uang Harian [3 HARI x 3 ORG x 6 KL]	54,00 OH	530.000	28.620.000	
	> RAKOR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN			55.600.000	
	- Transport [2 ORANG x 10 KPPN]	20,00 OK	350.000	7.000.000	
	- Akomodasi [2 ORANG x 2 HARI x 10 KPPN]	40,00 OH	570.000	22.800.000	
	- Uang Harian [2 ORANG x 3 HARI x 10 KPPN]	60,00 OH	430.000	25.800.000	
	> Koordinasi/rapat/pembinaan/konsultasi			87.900.000	
	- Transport [3 ORG x 10 KPPN]	30,00 OH	500.000	15.000.000	
	- Akomodasi [2 HARI x 3 ORG x 10 KPPN]	60,00 OH	570.000	34.200.000	
	- Uang Harian [3 HARI x 3 ORG x 10 KPPN]	90,00 OH	430.000	38.700.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			14.400.000	RM
	- Transport Lokal Rakor Penyusunan LK UAPPA-W [2 ORANG x 2 KPPN x 3 HR x 2 KEG]	24,00 OK	150.000	3.600.000	
	- Transport lokal koordinasi/rapat/pembinaan/konsultasi [3 ORG x 2 KPPN x 12 KL]	72,00 OH	150.000	10.800.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.022-BANDUNG I)			111.792.000	RM
	- Pelaksanaan Rakor/Sosialisasi/Workshop/Diseminasi Kanwil DJPB [34 ORANG x 2 KALI x 2 HARI]	136,00 OH	822.000	111.792.000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Pendukung
3. * = Blokir

Bandung, 2 Januari 2018
Kuasa Pengguna Anggaran

Yunlar Yahuar Rasyid
NIP. 195902111981012001

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 59
Telepon : 022-7207046, 7207049 Faximile : 022-7207048
Website : //www.djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id
Bandung 40122